



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam pembangunan di Kabupaten Lumajang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2024 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
8. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Tim Penggerak (*Driver Team*) adalah penggerak bagi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang responsif gender.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
12. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender dengan lebih fokus, efektif, efisien, sistematis, terukur dan berkelanjutan agar mendorong percepatan tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG agar lebih konkret dan terarah guna menjamin perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender;
- b. sebagai acuan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- c. mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur; dan
- d. meningkatkan sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan strategi PUG.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2022-2024 meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan Pokja PUG;
 - b. *Focal Point* PUG;
 - c. sosialisasi PUG;
 - d. PPRG; dan
 - e. implementasi PUG;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian PUG tahun 2022-2024.

BAB III
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah PUG terhubung dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - e. PPRG di Perangkat Daerah; dan
 - f. fokus prioritas pada program daerah dan bidang-bidang di Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan Pokja PUG dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan implementasi strategi PUG dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Implementasi Rencana Aksi Daerah PUG dilaksanakan oleh Pokja PUG yang dipimpin oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditinjau kembali paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

- (1) Sistematika Rencana Aksi Daerah PUG tahun 2022-2023 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU GENDER
BAB IV : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
BAB V : MONITORING DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BAB VI : PENUTUP
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGELOLAAN DATA

Pasal 8

- (1) Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG.
- (2) Tata cara dan instrumen pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG.

Pasal 9

- (1) Pokja PUG menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah PUG dan dilaporkan secara periodik kepada Bupati.
- (2) Pokja PUG melakukan pengelolaan data, dokumentasi, dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagai catatan tahunan dan laporan perkembangan pelaksanaan PUG.
- (3) Pokja PUG mengembangkan sistem pengelolaan data, dokumentasi, dan informasi PUG termasuk PPRG berbasis teknologi informasi.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2022-2024, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga vertikal dan horizontal, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, perguruan tinggi dan kelompok profesi agar dapat mensinergikan kapasitas dan otoritas PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG tahun 2022-2024 bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN
2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi global dalam mempromosikan kesetaraan gender di berbagai negara di dunia. Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah tujuan yang telah disepakati oleh pemerintah dan organisasi internasional. Kesetaraan gender telah menjadi perjanjian dan komitmen internasional bagi pemerintahan di seluruh dunia. Pengarusutamaan gender merupakan mandat yang telah disepakati oleh setiap negara dari Aksi Beijing *Platform* 1995 sebagai pendekatan strategis dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada semua tingkatan pembangunan. *Platform* (janji) mengikat seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan, termasuk entitas (lembaga) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komunitas pembangunan internasional dan aktor lembaga masyarakat, untuk melakukan aksi.

Tuntutan pelaksanaan kebijakan untuk memperbaiki kesetaraan gender pada tingkat global, nasional dan lokal merupakan stimulus baru melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). SDG's tujuan ke-5 ditujukan untuk "mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan gadis". Tujuan ke-5 tersebut merinci target-target yang merujuk pada serangkaian tantangan seperti diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, hak kepemilikan dan pemanfaatan teknologi yang ramah perempuan dan gadis. Kemajuan global dalam mencapai target-target ini tidak mudah. Walaupun kemajuan yang mengesankan misalnya dalam mewajibkan anak perempuan pada pendidikan dasar, kesetaraan gender pada banyak domain lain masih jauh untuk dapat dicapai di negara-negara berkembang.

Kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya instruksi presiden terkait pengarusutamaan gender pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional. Selanjutnya di tahun 2011, diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) empat menteri yaitu Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPPPA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan RPJMN Tahun 2009-2014, RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Namun sampai saat ini masih banyak perempuan yang masih terabaikan karena kurang informasi dan kurang menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara dalam pembangunan.

Permasalahan kesetaraan gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang juga belum menunjukkan arah pembangunan yang konsisten naik. Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2017 sampai 2020 cenderung mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tahun 2017 menunjukkan angka sebesar 87,72 sementara pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,16 menjadi 87,88 dan sampai tahun 2021 naik menjadi 88,39. Pencapaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, dimana pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Timur sebesar 91,67 dan Indonesia sebesar 91,27.

Peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan dan lembaga perekonomian adalah salah satu indikator yang menggambarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan yang berperan serta dalam pemerintahan di Kabupaten Lumajang. Perkembangan jumlah perempuan yang berperan di berbagai bidang sampai tahun 2017 yaitu jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga publik/pemerintahan sebanyak 3.667 orang atau 0,018 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 199.879 orang, jumlah tersebut telah mencapai 17 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD atau meningkat sebesar 11.810 orang atau 0,0014 persen. Sedangkan perempuan yang bekerja di sektor swasta sebanyak 196.212 orang atau 98 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sejumlah 199.879 orang dari target sebanyak 11.810 orang.

Jumlah kekerasan perempuan dan anak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 28 kasus kekerasan. Terjadi penurunan di tahun 2018 menjadi 23 kasus, namun mengalami kenaikan yang signifikan sampai dengan tahun 2020 mencapai 43 kasus. Dari ketiga jenis kekerasan tersebut, kasus tertinggi adalah kekerasan terhadap anak (perempuan) mencapai 58 kasus, kemudian disusul kekerasan terhadap perempuan sebanyak 40 kasus, dan yang terakhir adalah kekerasan terhadap anak (laki-laki) sebanyak 20 kasus.

Dalam hal kedudukan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana yang tertuang dalam salah satu pasal di UUD 1945 bahwa semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Namun, sampai saat ini juga masih ditemukan adanya kesenjangan dan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam hal memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan utamanya dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berakibat pada perempuan-perempuan di Kabupaten Lumajang tidak sepenuhnya memperoleh hak yang sama seperti laki-laki pada umumnya.

Oleh karena itu, sebagaimana latar belakang permasalahan di atas, dan sebagai bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan nasional, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen serius dalam merespon kebijakan Global melalui SDG's dan kebijakan Nasional dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender guna melakukan percepatan implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Rencana Aksi Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang tepat dan efektif dengan mencermati setiap *output* maupun *outcome* yang dihasilkan, baik secara kelembagaan maupun implementasi pelaksanaan rencana aksi pembangunan daerah yang responsif gender guna mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan dan tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kabupaten Lumajang adalah:

- a. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya;
- c. mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur;
- d. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan strategi Pengarusutamaan Gender;

1.3 Sasaran

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini adalah semua *stakeholder* pemerintah dan non pemerintah yang meliputi seluruh unsur pembangunan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

1.4 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 134).

1.5 Sistematika Penyusunan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II Analisa Situasi Pengarusutamaan Gender

- 2.1. Aspek Pendidikan
- 2.2. Aspek Kesehatan
- 2.3. Aspek Ekonomi

BAB III Permasalahan dan Isu Gender

- 3.1. Permasalahan Gender
- 3.2. Isu Gender

BAB IV Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

- 4.1. Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Daerah
- 4.2. Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pembangunan di Daerah
- 4.3. Matriks Rencana Aksi

BAB V Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lumajang

- 5.1. Monitoring
- 5.2. Evaluasi

BAB VI PENUTUP

BAB II ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada hakikatnya terkait erat dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- a. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) yang diwakili dengan Angka Harapan Hidup dalam perhitungannya;
- b. pengetahuan (*knowledge*) yang diwakili dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah dalam perhitungannya; dan
- c. standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diwakili dengan Pengeluaran Perkapita dalam perhitungannya.

Hasil analisis Indeks Pembangunan Manusia, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Angka IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

URAIAN	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia	Lumajang	Indeks	64,23	64,83	65,33	65,46	66,07
	JawaTimur	Indeks	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
	Indonesia	Indeks	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2017 s.d 2021 naik dari 64,23 pada tahun 2017 menjadi 66,07 pada tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan laju 0,61 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,13.

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten/kota yang mempunyai IPM kategori rendah. Pada tahun 2016 pada posisi 35 sedangkan pada tahun 2017 sd. 2021 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. IPM di Kabupaten Lumajang juga masih terpaut jauh dengan rata-rata IPM di Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 72,29.

Tabel 2.2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)		Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah PPP)		IPM		Kesenjangan	IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
2021	68,19	72,15	12,00	11,85	7,23	6,16	14.152	7.463	71,25	62,98	8,27	88,39
2020	68,06	72,02	11,99	11,71	7,01	5,87	13.876	7.379	70,69	62,27	8,42	88,09
2019	67,91	71,85	11,98	11,70	6,83	5,66	14.210	7.539	70,57	62,13	8,44	88,04

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)		Harapan Lama Sekolah (HLS)		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah PPP)		IPM		Kesenjangan	IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
2018	67,67	71,60	11,97	11,69	6,82	5,65	13.701	7.259	70,11	61,61	8,50	87,88
2017	67,47	71,41	11,96	11,68	6,81	5,64	13.037	6.921	69,55	61,01	8,54	87,72

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan BPS.go.id

Dari tabel di atas tampak bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten Lumajang semakin meningkat setiap tahunnya, begitu pula kesenjangan gender semakin menurun sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbaikan setiap tahunnya dalam pembangunan gender. Rata-rata di setiap komponen pembentuk IPM, perempuan cenderung lebih rendah kecuali pada komponen Angka Harapan Hidup. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2019

Provinsi/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2017	2018	2019	2020	2021
NASIONAL	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27
JAWATIMUR	90,76	90,77	90,91	91,07	91,67
JEMBER	84,32	84,23	84,30	84,66	84,82
LUMAJANG	87,72	87,88	88,04	88,09	88,39
PROBOLINGGO	84,57	84,86	84,95	85,38	85,39
MALANG	88,33	88,38	88,66	88,68	88,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa keadilan gender di Kabupaten Lumajang masih jauh di bawah angka nasional, Provinsi dan kabupaten sekitarnya kecuali Kabupaten Probolinggo.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Tabel 2.4.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Provinsi/Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2017	2018	2019	2020	2021
NASIONAL	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26
JAWA TIMUR	69,37	69,71	73,04	73,03	72,36
JEMBER	68,65	70,45	67,65	65,61	66,16
LUMAJANG	60,11	59,23	59,16	58,91	59,38

Provinsi/Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2017	2018	2019	2020	2021
PROBOLINGGO	64,86	67,06	68,22	68,69	65,05
MALANG	74,37	75,49	69,68	69,54	76,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017-2021

Dari tabel tersebut di atas tampak apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, Kabupaten Lumajang selalu lebih rendah dari Kabupaten sekitar, Provinsi, dan Nasional. Perkembangan IDG Kabupaten Lumajang tiap tahunnya menunjukkan penurunan walaupun tidak signifikan, terdapat komponen dalam IDG yang masih rendah yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen yang dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5.
Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2021	16	50,92	23,98	59,38
2020	16	48,94	23,66	58,91
2019	16	50,39	23,72	59,16
2018	18	60,15	23,56	59,23
2017	18	53,36	23,50	60,11

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang

2.1. Aspek Pendidikan

2.1.1. Harapan Lama Sekolah

A. Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Hasil analisis indeks Pendidikan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indeks Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pendidikan	Lumajang	Indeks	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55
	Jawa Timur	Indeks	0,61	0,61	0,62	0,63	0,63
	Indonesia	Indeks	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021 (data diolah)

Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang tahun 2017 sd. 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks pendidikan sebesar 0,53 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi sebesar 0,55.

Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini terlihat pada tahun 2021 indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang hanya pada angka 0,55, sedangkan Provinsi Jawa Timur mencapai 0,63 dan Indonesia sebesar 0,64 pada tahun 2021.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut BPS, Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Hasil analisis angka harapan lama sekolah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7.
Angka Harapan Lama Sekolah
Tahun 2017-2021 di Kabupaten Lumajang

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	Lumajang	Angka	11,78	11,79	11,80	11,81	11,88
	Jawa Timur	Angka	13,09	13,10	13,16	13,19	13,36
	Indonesia	Angka	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Angka HLS Pada Kabupaten Lumajang tahun 2021 berada pada angka 11,88 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,88 tahun atau setara dengan SMA.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021 cenderung terus mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan serta masih lebih rendah dari pada AHLS Provinsi Jawa Timur dan Indonesia.

1) Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi Kasar digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Hasil analisis Angka Partisipasi Kasar, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017- 2021
di Kabupaten Lumajang

Uraian	Daerah	Tingkatan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar	Lumajang	SD/MI	110,04	110,04	109,99	108,53	107,49
		SMP/MTS	95,63	95,63	87,03	94,11	96,62
	Jawa Timur	SD/MI	106,79	106,69	105,56	104,35	104,52
		SMP/MTS	92,22	94,93	94,24	96,40	97,17
	Indonesia	SD/MI	108,50	108,61	107,32	106,32	106,20
		SMP/MTS	90,23	91,52	90,57	92,06	92,80

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Lumajang tahun 2017 sd. 2021 cenderung turun, pada tahun 2017 nilai Angka Partisipasi Kasar SD/MI sebesar 110,04 dan menurun sampai tahun 2021 menjadi sebesar 107,49, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS di Kabupaten Lumajang tahun 2017 sd. 2021 cenderung turun. Pada tahun 2017 nilai Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS sebesar 95,63 dan menurun sampai tahun 2019 menjadi sebesar 87,03, tetapi naik pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 92,80 dan 96,62.

Tren Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Lumajang masih di atas Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 104,52 dan Indonesia sebesar 106,32 pada tahun 2020, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 97,17 akan tetapi masih diatas Indonesia yang sebesar 92,06 pada tahun 2020.

2) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) artinya persentase anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat dijenjang pendidikan yang seharusnya. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Nilai APM yang lebih besar dari 100% disebabkan karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah, dan adanya siswa yang mengulang atau tidak naik kelas. Hasil analisis Angka Partisipasi Murni, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Angka Partisipasi Murni Tahun 2017-2021
di Kabupaten Lumajang

Uraian	Daerah	Tingkatan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Murni (APM)	Lumajang	SD/MI	95,90	96,53	97,06	96,85	96,24
		SMP/MTs	75,95	76,90	76,59	79,03	79,03
	Jawa Timur	SD/MI	99,74	99,78	99,99	100,26	97,90
		SMP/MTs	104,34	100,80	98,75	99,72	83,80
	Indonesia	SD/MI	99,69	99,57	100,02	99,98	97,80
		SMP/MTs	102,35	102,58	101,76	100,41	80,59

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Lumajang tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif, tahun 2017 Angka Partisipasi Murni SD/MI sebesar 95,90 naik pada tahun 2018 menjadi 96,53 dan naik kembali sampai dengan 2019 sebesar 97,06, tetapi turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 96,85, serta turun kembali pada tahun 2021 sebesar 96,24, sedangkan pada tingkatan SMP/MTs di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 nilai Angka Partisipasi Murni pada tahun 2017 sebesar 75,95 dan naik pada 2018 sebesar 76,90 tetapi menurun kembali pada tahun 2019 sebesar 76,59 dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi 79,03, sedangkan di tahun 2021 tetap sebesar 79,03.

Tren Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 97,90 dan Indonesia sebesar 97,80 pada tahun 2021, sedangkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 83,80 dan Indonesia yang sebesar 80,59 pada tahun 2021.

3) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kesejahteraan di bidang pendidikan secara sederhana dapat dijelaskan melalui capai angka rata-rata lama sekolah. Definisi dari angka rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pengukuran angka rata-rata lama sekolah membutuhkan komponen partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tabel 2.10
Angka Rata-rata Lama Sekolah
di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Lumajang	Angka	6,20	6,21	6,22	6,40	6,67
	Jawa Timur	Angka	7,34	7,39	7,59	7,78	7,88
	Indonesia	Angka	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Selama periode 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang sebesar 6,20 dan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2017 sd. 2021 yaitu sebesar 6,20 pada tahun 2017, Capaian angka pada tahun 2018 sebesar 6,21 dan mengalami peningkatan secara konsisten menjadi 6,22 pada tahun 2019. Peningkatan cukup besar pada tahun 2020 menjadi 6,40 serta meningkat kembali secara cukup signifikan di 2021 yaitu sebesar 6,67 atau setara pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa secara umum, jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Lumajang semakin tinggi. Namun demikian, peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang belum mampu melampaui capaian rata-rata lama sekolah di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu 7,88 pada tahun 2021 atau setara dengan tahun pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

4) Persentase Sekolah yang Terakreditasi B

Tabel 2.11
Capaian Persentase Sekolah Terakreditasi B
di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 -2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Sekolah yang terakreditasi B	%	75,05	81,30	82,85	83,06	86,42

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lumajang, 2021

Dari rentang waktu antara tahun 2017-2021 persentase sekolah yang terakreditasi B mengalami kenaikan. Dilihat dari Persentase di Tahun 2017 sebesar 75,05%, mengalami kenaikan sd. tahun 2021 menjadi 86,42%. Hal ini menunjukkan kualitas baik dan diakui oleh Lembaga Akreditasi dan berarti juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lumajang semakin merata dan berkualitas baik.

2.2. Aspek Kesehatan

2.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diperoleh dari hasil perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH), dimana UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil analisis Indeks Kesehatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12
Indeks Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kesehatan	Lumajang	Indeks	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
	Jawa Timur	Indeks	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79
	Indonesia	Indeks	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2020

Tren indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sd. 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks kesehatan sebesar 0,76 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi sebesar 0,77. Secara umum tren Indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 0,79 dan Indonesia sebesar 0,79 pada tahun 2021. Artinya, terdapat kesenjangan Indeks Kesehatan Lumajang dengan Jawa Timur sebesar 0,02 dan dengan Indonesia sebesar 0,02.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH Kabupaten Lumajang selama periode tahun 2017-2021 terus meningkat setiap tahun. Hasil analisis Usia Harapan Hidup, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.23
Usia Harapan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (UHH)	Lumajang	Tahun	69,50	69,70	69,94	70,10	70,21
	Jawa Timur	Tahun	70,80	70,97	71,18	71,30	71,38
	Indonesia	Tahun	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, usia harapan hidup mengalami kenaikan dari 69,50 pada tahun 2017 menjadi 70,21 di tahun 2021.

Tren Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat pada tabel, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini terlihat dari Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 belum mampu melampaui capaian usia harapan hidup di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu 71,38 dan Indonesia yang berada pada angka 71,57.

1) Persentase Keluarga Sehat Kabupaten Lumajang

Pada tahun 2019-2021 persentase keluarga sehat di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 8% di tahun 2019 menjadi 9% di tahun 2020 dan 10,8% di tahun 2021. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan pada taraf keluarga di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.13
Capaian Persentase Keluarga Sehat
di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Keluarga Sehat	%	N/A	N/A	8	9	10.8

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang, 2021

2) Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut dan penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Sedangkan Angka Kematian Ibu yaitu jumlah kematian ibu dalam 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.14
Angka Kematian Ibu Sehat
di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	66	104	98	97	309

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang, 2021

Tren angka kematian ibu di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 angka kematian ibu sebesar 66 per 100.000 KH ini adalah angka terendah kematian ibu pada 5 tahun terakhir dan naik pada 2017 sebesar 104, tetapi turun pada tahun 2019 menjadi 98 dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi 97. Tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 309 dan ini capaian tertinggi di 5 tahun terakhir, hal ini berarti perlu adanya upaya-upaya dalam menurunkan angka kematian ibu.

3) Angka Kematian Bayi

Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neo natal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Hasil analisis angka kematian bayi, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.15
Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,9	9,45	10,1	10,05	7,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lumajang, 2021

Tren angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 8,90, naik sebesar 9,45 dan naik kembali sampai tahun 2020 menjadi 10,1 pada tahun 2019 dan 10,05 pada tahun 2020. Penurunan terendah adalah pada tahun 2021 di mana angka kematian bayi turun menjadi 7,4 per 1.000 KH.

4) Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yaitu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Tekanan darah tinggi merupakan hasil pengukuran tekanan darah terakhir atau hasil pengukuran minimal 1 kali setahun. Pengukuran dilakukan pada penduduk yang berusia ≥ 15 tahun.

Tabel 2.16
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
di Kabupaten Lumajang 2017 -2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	13,21	20,28	46,6	29,7	43,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang,2021

Tren Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*. Tahun 2017 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 13,21 dan pada 2018 naik sebesar 20,28 kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 46,6 dan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi 29,7, sedangkan pada tahun 2021 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi naik signifikan kembali menjadi 43,7.

5) Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) adalah merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pancreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang di produksi secara efektif. Insulin adalah hormone yang mengatur ke seimbangan kadar gula darah, akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosadi dalam darah (hiperglikemi).

Tabel 2.17
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	-	26,47	95,1	96	112,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang, 2021

Tren Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2018 persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 26,47 dan naik signifikan pada 2019 sebesar 95,1% dan pada 2020 naik secara signifikan sebesar 96% sedangkan tahun 2021 sebesar 112,5%.

6) Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) sesuai standar merupakan indikator SPM dengan target 100%. Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (psikotik akut dan skizofrenia) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan Kesehatan jiwa dan edukasi.

Tabel 2.18
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di
Kabupaten Lumajang 2017 -2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	-	65,38	91,4	88,2	101,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang, 2021

Tren Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2018 Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 65,38% dan naik signifikan pada 2019 sebesar 91,4%, akan tetapi turun pada tahun 2020 sebesar 88,2%, namun naik kembali secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 101,1%.

7) Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus

Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus (*Success Rate*) adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan menggambarkan kualitas pengobatan TB.

Tabel 2.19
Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB
Semua Kasus di Kabupaten Lumajang 2017 -2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus	%	95,20	94,70	84,40	91	90

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang,2021

Tren Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*. Pada tahun 2017 capaiannya sebesar 95,20 dan turun pada 2018 sebesar 26,47%, turun kembali di 2019 menjadi 84,40% sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 91% namun turun kembali di 2021 menjadi 90%.

8) Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV.

Tabel 2.20
Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan
Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	-	13.70	41.7	43,9	97.3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang,2021

Tren Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 capaiannya sebesar 13,70. Pada 2018 naik lagi sebesar 41,7%, kemudian tahun 2020 menjadi 43,9%, dan naik kembali secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 97,3%.

9) Angka Penemuan Kasus Baru Kusta

Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium Leprae* yang menyerang berbagai bagian tubuh diantaranya saraf dan kulit. Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak dan mata. Kusta menular melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui pernapasan. Kusta tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi dan sosial bagi penderitanya terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Tabel 2.21
Angka Penemuan Kasus Baru Kusta
di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	%	15,62	16,83	13,05	7,2	10,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lumajang, 2021

Tren Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*. Pada tahun 2017 capaiannya sebesar 15,62% dan naik pada 2018 sebesar 16,83%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 13,05% dan turun kembali menjadi 7,2%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10,7%.

10) IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tabel 2.22
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 -2021

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat sektor pelayanan kesehatan	Indeks	N/A	81,01	81,84	85,05	85,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Lumajang, 2021

Pada tahun 2018-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat akan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 81,01 di tahun 2018 menjadi 81,84 di tahun 2019 dan naik menjadi 85,05 di tahun 2020, mengalami kenaikan lagi sebesar 85,56 di tahun 2021. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan dalam pelayanan serta sarana dan prasarana di Kabupaten Lumajang.

B. Stunting

Persentase balita *stunting* (Balita Gizi Buruk) adalah jumlah anak balita pendek selama 1 tahun di bagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama. Balita pendek (*stunting*) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, nilai z -skornya $< -2SD$ dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z -skornya $< -3 SD$.

Dalam upaya perbaikan *stunting* harus meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70%nya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor, seperti: ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya sehingga memerlukan peran semua sektor dalam mengisi kontribusi demi prevalensi balita *stunting* yang semakin rendah dan dan semakin baik.

Tabel 2.23
Prevalensi *Stunting* Kab Lumajang Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Prevalensi Stunting	%	8,52	6,74	8,41	10,63	6,6

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2017 persentase balita *stunting* sebesar 8,52 dan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 6,74, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,41 dan naik kembali menjadi 10,63 pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,6.

C. Persentase Balita Gizi Kurang

Gizi kurang merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Balita dikategorikan mengalami gizi kurang apabila berat badannya berada pada rentang Z skor ≥ -2.0 sd. Z skor ≤ -3.0 . Anak dengan status gizi kurang ditandai dengan tidak adanya kenaikan berat badan setiap bulannya atau mengalami penurunan berat badan sebanyak dua kali selama enam bulan.

Tabel 2.24
Presentase Balita Gizi Kurang
Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase balita gizi kurang	%	7,22	6,78	8,25	9,63	7,3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tren persentase balita gizi kurang di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 persentase balita gizi kurang sebesar 7,22 dan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 6,78, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,25 dan naik kembali menjadi 9,63 pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,3.

D. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan suatu kondisi kekurangan gizi pada tingkatan yang sudah berat, dimana status gizinya berada jauh di bawah standar. Gizi buruk akan terjadi manakala kebutuhan tubuh akan kalori, protein, atau bahkan keduanya tidak tercukupi. Menurut WHO, salah satu masalah gizi buruk terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein serta karena adanya gangguan kesehatan. Anak disebut gizi buruk apabila berat badannya kurang dari berat badan normal. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z skor <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis.

Tabel 2.25
Presentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase balita gizi kurang	%	0,6	0,56	0,77	1,25	1,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tren persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 persentase balita gizi kurang sebesar 0,6 dan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 0,56, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 0,77 dan tahun 2019 naik lagi sebesar 1,25, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,20.

E. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Suatu desa dikatakan sebagai desa siaga aktif jika desa tersebut minimal memiliki poskesdes yang buka setiap hari. Semua desa di Kabupaten Lumajang sudah membentuk desa siaga yaitu sebanyak 205 desa/kelurahan.

Tabel 2.26
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase balita gizi kurang	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2.3 Aspek Ekonomi

2.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Hasil analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lumajang
Tahun 2017-2021

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	Lumajang	%	2.91	2.55	2.81	3.36	3,51
	Jawa Timur	%	4.00	3.99	3.92	5.84	5,74
	Indonesia	%	5.5	5.30	5.30	7.07	6,49

Sumber: www.bps.go.id

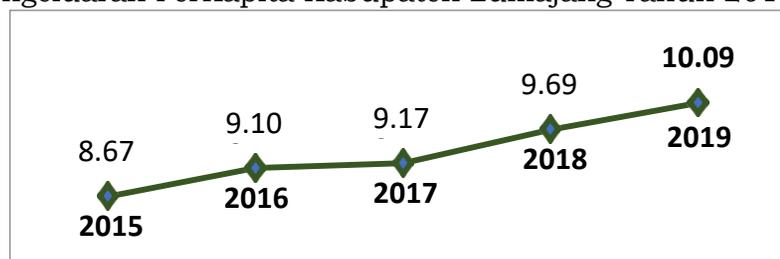
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 2,91 pada 2017 menjadi 2,55 pada tahun 2018 tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2019 - 2021 sebesar 3,51 pada tahun 2021 karena dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 dimana Provinsi Jawa Timur mencapai 5,74 dan Indonesia sebesar 6,49.

2.3.2 Pengeluaran Perkapita

Dari sisi ekonomi, pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang besar di sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat di sektor ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam bekerja dikarenakan tuntutan faktor ekonomi yang mengharuskan untuk bekerja atau karena adanya motivasi lain.

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Grafik 2.5.
Pengeluaran PerKapita Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di Kabupaten Lumajang, perempuan berada di bawah laki-laki dengan perbedaan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 7681 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2019, dan sebesar 7487 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2018. Seperti halnya Lumajang, di kabupaten sekitar, Jawa Timur dan nasional juga memiliki tren yang sama, dimana pengeluaran per kapita perempuan berada di bawah pengeluaran per kapita laki-laki.

Tabel 2.28
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sekitar, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi/Kabupaten	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)									
	Perempuan					Laki-laki				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
JAWA TIMUR	10137	9820	9580	9459	9264.48	16837	16321	15671	15063	14579.32
Jember	6242	6026	5800	-	5673.93	14732	14025	13462	-	12772.82
Banyuwangi	8047	7810	7516	-	7126.32	19421	18701	18124	-	16785.13
Bondowoso	9540	9249	9032	-	8623.95	14685	14453	13849	-	12992.76
Lumajang	7776	7447	7077	-	6782.12	15457	14934	14041	-	13247.96
Probolinggo	7573	7342	7077	-	6999.24	17320	16801	16173	-	15478.30
INDONESIA	9244	9042	8752	8591	8464.16	15866	15546	14932	14554	14163.15

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015-2019

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU GENDER

Kualitas SDM yang masih rendah di Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Lumajang pada posisi 35, sedangkan pada tahun 2017 sd. 2021 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke-36 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Selanjutnya angka kemiskinan masih tinggi. Tren angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung turun naik. Pada tahun 2016 dan 2017, angka kemiskinan masih pada posisi 2 (dua) digit yaitu 11,22 dan 10,87, sedangkan angka kemiskinan paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34% menjadi 9,83%. Angka kemiskinan di Kabupaten Lumajang masih lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia mulai tahun 2016 - 2020. Angka kemiskinan di Indonesia paling rendah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,22%. Kemiskinan juga diakibatkan oleh pengangguran. Problem pengangguran karena terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya kompetensi pencari kerja, hubungan industri pekerja dan perusahaan yang belum berjalan dengan baik, sistem pengupahan dan jaminan sosial yang belum berjalan dengan optimal.

Permasalahan kesetaraan gender juga belum menunjukkan tren yang konsisten naik. Indeks Pembangunan Gender (IPM) pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 87,72 dan pada tahun 2019 naik menjadi 88,04, akan tetapi pada tahun 2020 turun menjadi 87,88. Pencapaian IPG di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, dimana pada tahun 2019 IPG di Provinsi Jawa Timur sebesar 90,91 dan Indonesia sebesar 91,07 pada tahun 2020.

Selanjutnya pandemi virus Corona (Covid-19) merupakan krisis kesehatan publik dan humanitarian terbesar. Pemulihan situasi sosial dan ekonomi pasca Covid-19 tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Penduduk dunia lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu fokus pada kesehatan masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan akibat pandemi Covid-19 juga perlu menjadi prioritas.

3.1. Permasalahan Gender

3.1.1. Bidang Pendidikan

Isu Gender Bidang Pendidikan meliputi:

- a. Angka partisipasi sekolah laki-laki pada rentang usia 7-12 (98.10) lebih rendah dari angka partisipasi sekolah perempuan (100). Demikian juga pada rentang usia 13-15 (96.70) sedangkan APS perempuannya sebesar (98.96). Angka Partisipasi Sekolah laki-laki rentang usia 16-18 (55.38), sedangkan Angka Partisipasi Sekolah perempuan rentang usia 16-18 (50.02). Hal ini menunjukkan

bahwa Angka Partisipasi Sekolah untuk laki-laki di Kabupaten Lumajang rentang usia 16-18 lebih tinggi daripada Angka Partisipasi Sekolah perempuan.

- b. Angka Partisipasi Murni Laki-laki pada jenjang pendidikan SD sederajat (95.13) lebih kecil dari angka partisipasi murni perempuan (98.54). Pada jenjang SMP sederajat Angka Partisipasi Murni laki-laki (87.56) lebih tinggi daripada Angka Partisipasi Perempuan (70.83) sedangkan pada jenjang SMA Angka Partisipasi Murni laki-laki (45.87) lebih tinggi daripada angka partisipasi perempuan (43.95), Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan pada perempuan masih rendah.
- c. Angka Partisipasi Kasar pada Laki-laki di Kabupaten Lumajang rentang usia 7-12 (104.49) lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar perempuan (112.47), sedangkan Angka Partisipasi Kasar untuk laki-laki rentang usia 13-15 (106.37) lebih tinggi daripada Angka Partisipasi Kasar perempuan (82.33). Angka Partisipasi Kasar laki-laki rentang usia 16-18 (60.76) lebih tinggi dari Angka Partisipasi Kasar perempuan (60.25).
- d. Pendidikan inklusif bagi anak disabilitas belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dalam hal ini, masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak disabilitas ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak pendidikan dan kemudahan akses pendidikan serta melawan diskriminasi, namun belum didukung dengan kualitas guru dan jumlah guru yang memadai dalam merespon keberadaan anak disabilitas dalam rombongan belajar. Persepsi guru yang merasa anak berkebutuhan khusus mengganggu capaian pendidikan serta belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi – LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas.
- e. Selama periode 2016-2020, Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang sebesar 6,05 dan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,2. Pada tahun 2018, capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang sebesar 6,21 tahun dan mengalami peningkatan secara konsisten menjadi sebesar 6,22 tahun pada tahun 2019, dan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2020 sebesar 6,4 atau setara pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa secara umum, jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Lumajang semakin tinggi. Namun demikian, peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang belum mampu melampaui capaian rata-rata lama sekolah di Jawa Timur secara keseluruhan, misalnya: 7,78 pada tahun 2020 atau setara dengan tahun pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- f. Masih terdapat usia perkawinan di bawah 18 tahun sebanyak 199 orang (laki-laki) dan 540 orang (perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang masih rentan dengan perkawinan di bawah umur. Perlu usaha yang terus menerus agar angka ini dapat diturunkan.

3.1.2 Bidang Kesehatan

Isu Gender Bidang Kesehatan meliputi:

- a. Usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sd. tahun 2020, Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari 69,38 pada tahun 2016 menjadi 70,10 di tahun 2020. Tren Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tabel mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Lumajang Usia Harapan Hidup masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini terlihat dari Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 belum mampu melampaui capaian Usia Harapan Hidup di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu 71,30 dan Indonesia yang berada pada angka 71,47.
- b. Tren Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Tahun 2016 merupakan tahun tertinggi Angka Kematian Ibu dalam 5 tahun dengan angka kematian sebesar 118,28. Sedangkan tahun 2017 merupakan terendah selama 5 tahun terakhir dengan angka kematian sebesar 66. Kemudian Angka Kematian Ibu naik turun sehingga pada tahun 2020 menjadi 97,93. Tren Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lumajang masih di atas Provinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 89,92.
- c. Tren angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 11,24 ini adalah tertinggi kematian bayi pada 5 tahun terakhir dan menurun pada 2017 sebesar 8,90 dan terendah selama 5 tahun terakhir, tetapi naik sampai tahun 2020 menjadi 10,05. Tren angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mencapai 23.
- d. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase BBLR mengalami fluktuasi pada persentase terhadap bayi lahir. Pada tahun 2016 mencapai 4,44% dan mengalami penurunan di Tahun 2019 menjadi 4,24% namun terdapat kenaikan kembali pada tahun 2020 mencapai 4,67%. Selanjutnya dari data di atas dapat di ketahui bahwa angka gizi buruk dari 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, Persentase angka gizi buruk mengalami penurunan menjadi 2,42% dibandingkan dengan persentase pada tahun 2019 yaitu 2,92%. Pada data kelahiran di Kabupaten Lumajang juga memiliki tren penurunan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 namun kembali mengalami kenaikan tahun 2020 yang mencapai 15.447 kelahiran.

- e. Tren prevalensi balita *Stunting* di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2016 persentase balita *stunting* sebesar 13,12% dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 6,74%, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,74% dan naik kembali menjadi 10,60% pada tahun 2020.
- f. Pada tahun 2019-2020, persentase keluarga sehat di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 8% di tahun 2019 menjadi 9% di tahun 2020. Walaupun kenaikannya tidak signifikan, tetapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan pada taraf keluarga di Kabupaten Lumajang.
- g. Pada tahun 2019-2020, Indeks Kepuasan Masyarakat akan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 81,84 di tahun 2019 menjadi 85,05 di tahun 2020. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan dalam pelayanan serta sarana dan prasarana di Kabupaten Lumajang.

3.1.3. Bidang Ekonomi

Isu gender Bidang Ekonomi meliputi:

- a. informasi pasar kerja belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat, kebanyakan karena latar pendidikan yang rendah;
- b. tren tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan dari 65,25 pada 2016 menjadi 63,7 pada tahun 2017 tetapi meningkat pada 2018 sebesar 68,1, akan tetapi menurun kembali pada 2019 sebesar 65,92 serta naik kembali sebesar 66,92 pada tahun 2020. Secara umum, tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lumajang masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Jawa Timur mencapai 71,20 dan Indonesia sebesar 67,50 pada tahun 2019, sedangkan data untuk tahun 2020 di Indonesia belum tersedia;
- c. tren tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dari 2,75 pada 2016 menjadi 2,91 pada tahun 2017 tetapi turun pada 2018 sebesar 2,55 akan tetapi naik kembali pada 2019 sebesar 2,81 serta naik kembali sebesar 3,36 pada tahun 2020. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2020 Jawa Timur mencapai 5,84 dan Indonesia sebesar 7,07 pada tahun 2020;
- d. rendahnya tingkat kemampuan pelaku usaha mikro untuk beradaptasi terhadap pengembangan teknologi informasi;
- e. aspek manajemen dan permodalan serta aspek usaha yang dijalankan oleh koperasi masih rendah;

- f. kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas dalam bidang kepariwisataan;
- g. masih belum maksimalnya peran masyarakat sekitar obyek wisata dalam pengembangan wisata;
- h. kelembagaan dan sumber daya manusia kelompok tani masih kurang dalam penerapan teknologi budidaya pertanian;
- i. minimnya akses permodalan dan sarana prasarana produksi bagi Industri Kecil Menengah;
- j. kurangnya pengetahuan manajemen produksi dan usaha Industri Kecil Menengah.

3.1.4. Bidang Publik

Isu gender di Bidang Publik meliputi:

- a. kesetaraan gender pada suatu wilayah dapat terlihat dari nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yang ada di wilayah tertentu pada suatu periode. Penurunan IDG di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan setempat dalam bidang politik dan ekonomi pada tahun 2019 berkurang. IDG Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 dikaji dari indikator indeks perempuan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, meliputi perempuan duduk di legislatif (16,00%), indeks pengambil keputusan (50,39%), dan indeks distribusi pendapatan perempuan (23,72%);
- b. fungsi dan peran pokja PUG Kabupaten masih belum optimal;
- c. akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang masih terbatas.

3.1.5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. masih adanya marginalisasi terhadap perempuan;
- b. masih adanya marginalisasi terhadap disabilitas;
- c. minimnya pendidikan pengetahuan dan ketrampilan kaum perempuan sehingga kurang memiliki daya saing didunia kerja;
- d. kurangnya pemahaman tentang pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dimasyarakat;
- e. belum semua pemangku kepentingan yang memahami pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan;
- f. tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.2. Isu Gender

Upaya pembangunan manusia di Kabupaten Lumajang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup selama beberapa tahun telah mengalami kemajuan yakni peningkatan nilai pembangunan tersebut. Namun, hasil yang dicapai dari upaya pembangunan kualitas hidup masih menunjukkan adanya kesenjangan gender di beberapa aspek kehidupan.

IPG di Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 mengalami peningkatan masalah gender timbul salah satunya akibat pengaruh dari kemajuan dan perkembangan sebuah daerah itu sendiri seperti beberapa bentuk ketidakadilan gender di daerah seperti halnya subordinasi, marjinalisasi, beban ganda (termasuk masalah domestifikasi pekerjaan perempuan), kekerasan atau penganiayaan, dan stereotipe.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai IPG (Indeks Pembangunan Gender) di Kabupaten Lumajang masih lebih rendah dibandingkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hal ini dapat dimaknai bahwa secara umum kenaikan IPG dari tahun ke tahun yang dialami oleh Kabupaten Lumajang bukanlah suatu prestasi yang cukup baik bagi Pemerintahan Kabupaten. Perkembangan nilai IPG tidak mampu mengimbangi nilai IPM menunjukkan perempuan masih minim wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dalam mengelola dan mengembangkan usaha.

Pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Lumajang dapat dibahas lebih lanjut dengan melihat persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Jaminan persamaan status dan kedudukan ini meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas dasar. Namun, pada realita yang berkembang di masyarakat, upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai budaya patriarkhi. Nilai-nilai budaya tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.

Kesetaraan gender pada suatu wilayah dapat terlihat dari nilai IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) yang ada di wilayah tertentu pada suatu periode. Pada tahun 2020, IDG di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, IDG di Provinsi Jawa Timur berada pada angka 69,16 lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur angka 69,06. Sedangkan penurunan IDG di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan setempat dalam bidang politik dan ekonomi lebih berkembang pada tahun 2019 berkurang.

Selanjutnya, permasalahan pembangunan gender juga dapat dipengaruhi karena adanya stereotipe yang telah berkembang di masyarakat. Stereotipe yang selama ini berkembang di masyarakat mengenai perempuan ialah perempuan sebagai makhluk yang lemah dan hanya berkutat pada urusan rumah tangga saja. Hal ini yang harus diubah untuk mencapai terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. IPG Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan 88,04 (2019) menjadi 88,06 (2020).

Persamaan dalam peranan bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan “status dan kedudukan”, tetapi lebih kepada persoalan pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian pemberdayaan dalam konteks ini, perempuan diposisikan memiliki peranan yang strategis. Untuk mengetahui lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka perlu mengkaji setiap komponen IDG.

Angka kemiskinan terhadap perempuan menjadi tantangan yang cukup perlu dihadapi dengan baik, kemiskinan terhadap perempuan (yang menjadi kepala keluarga) cukup berdampak terhadap pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, maka beberapa hal terkait program dan kebijakan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang responsif gender. Selain kemiskinan, sektor lain seperti ketenagakerjaan juga menjadi hal yang cukup berpengaruh, kiprah dan keterlibatan perempuan di dunia kerja juga menjadi komposit pembentuk IPG, termasuk didalamnya pekerjaan yang dilakukan perempuan dan kuantitas perempuan yang bekerja.

Apabila IPG, IDG, dan IPM dilakukan sebuah kajian yang lebih detail dan mendasar dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsif gender, dapat dipastikan peningkatan 3 aspek tersebut terjadi secara berkesinambungan. Artinya, apabila nilai IPM telah mengalami kenaikan maka IPG dan IDG juga memiliki nilai yang tidak selisih terlalu banyak dengan IPM. Sehingga, tidak banyak gap yang membatasi pembangunan gender di Provinsi Jawa Timur.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

4.1. PUG Dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Daerah

Dalam setiap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lumajang, isu Gender merupakan masalah utama yang merupakan prioritas pemerintah kabupaten dalam penyelesaiannya. Hal ini tergambar jelas pada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- f. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2020, tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender;
- g. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang;
- h. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- i. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- j. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/376/427.12/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/406/427.12/2007 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Lumajang;
- k. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/376/427.12/2020 tentang Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- l. Intruksi Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

4.2. PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena perempuan/laki-laki, dan bukan karena kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi kesenjangan gender, Pemerintah melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, penguatan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Dalam pelaksanaan PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1.
Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga. Komitmen dari tingkat leaders atau pengambil keputusan
2	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan dan program sebagai bentuk komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan
3	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender
4	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, dalam mengimplementasi pengarusutamaan gender yang merupakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender.
5	Data Terpilah	Adanya system informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan.
6	Alat Analisis	Adanya alat analisis, untuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pengarusutamaan gender
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarusutamaan gender. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi.

Berdasarkan tujuh prasyarat pengarusutamaan gender tersebut di atas, untuk kondisi di Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komitmen

Komitmen Bupati Lumajang dalam melaksanakan Pengarusutamaan dalam mengambil keputusan yang dilakukan penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat Keputusan antara lain:

- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang;
- b. Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- c. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- e. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2020, tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender;
- f. Keputusan Bupati Nomor 188.45/376/427.12/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/406/427.12/2007 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Tim Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Di Kabupaten Lumajang;
- g. Keputusan Bupati Nomor 188.45/376/427.12/2020 tentang Tim Tekhnis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

Selain itu, komitmen juga tersirat dan tertuang pada internal proses perspektif, yang merupakan serangkaian proses yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Adanya Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lumajang Yang Efektif.

Kebijakan yang responsif gender adalah kebijakan yang efektif, yang berorientasi pada ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terarah dan fokus, dengan alat ukur keberhasilan pembangunan yang jelas dan terukur. Sedangkan sasaran pemanfaat pembangunan adalah seluruh masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, kelompok marginal, rentan, disabilitas, anak dan lansia.

- b. Terwujudnya masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

Kata “makmur” dalam rumusan visi Lumajang tersebut dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial yang memadai. Kata “bermartabat” dengan

bermartabat Kabupaten Lumajang memiliki kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain.

- c. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro dan pariwisata.

Kata “berkelanjutan” mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*), percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk didalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

- d. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri, termasuk di dalamnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta peningkatan dukungan terhadap kesetaraan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

- e. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implemetasi *smart city* (Kota Cerdas) sampai pada lini desa.

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan gender di Kabupaten Lumajang, tergambar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang respon terhadap gender dan Rencana Strategis perangkat daerah.

3. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Lumajang ditandai dengan adanya:

- a. Tim Driver Kabupaten, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum;

- b. Pokja PUG, yang merupakan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lumajang;
 - c. Focal Point PUG, yang merupakan Tim Penggerak Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah;
 - d. Fasilitator PUG, yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi, atau membantu percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Lumajang.
 - e. Tim Teknis yang merupakan tim yang beranggotakan aparatur dan atau individu yang memiliki kemampuan analisa gender dengan tugas khusus melakukan telaah dokumen perencanaan dan anggaran daerah maupun perangkat daerah.
4. Sumber Daya
- Kabupaten Lumajang memiliki sumber daya terlatih PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) sejumlah 69 orang yang tersebar di semua instansi perangkat daerah yang ada di kabupaten Lumajang dan 37 pendamping desa yang terlatih PPRG Desa. Jumlah Gender Champion di Kabupaten Lumajang berjumlah 9 orang yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang baik pribadi atau pejabat, aktifis LSM atau masyarakat yang peduli terkait dengan perkembangan dan kemajuan pengarusutamaan gender serta mendorong untuk berkontribusi tercapainya kesetaraan gender di daerah. Sedangkan untuk fasilitator Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah 4 orang yang terdiri dari (3 orang perangkat daerah dan 1 orang lembaga masyarakat).
5. Data Terpilah
- Kabupaten Lumajang membangun sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terpilah dalam upaya percepatan pembangunan responsif gender diantaranya:
- a. Forum satu data;
 - b. Profil data gender.
6. Alat Analisis
- Alat analisis gender yang digunakan Kabupaten Lumajang adalah *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan Pedoman Pengarusutamaan Gender. Kegiatan yang telah di proses Gender Budget Statement (GBS)/Pernyataan Anggaran Gender yang disusun oleh Perangkat Daerah.
7. Partisipasi Masyarakat
- Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dengan adanya Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) yang melibatkan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat (SK Forum Puspa No. 188.45/359/427.12/2020) Lembaga Masyarakat (PKK Kabupaten Lumajang):
- a. Pawon Urip;
 - b. Kegiatan Sekolah Perempuan Bersinergi Antara Lembaga Masyarakat PKK Dengan LSM Aman.

4.3. Matriks Rencana Aksi

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir. Rencana aksi daerah ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabuapten dan perangkat daerah yang masuk dalam RPJMD dan renstra Perangkat Daerah. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengavaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi.

Tabel 4.2.

Matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lumajang Tahun 2022- 2023

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	AKTIVITAS		2022	2023	2024		
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1. Meningkatkan aktivitas ekonomi / nilai PDRB	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pameran Dagang Nasional	Pameran APKASI bagi produk IKM	Jumlah produk yang dipromosikan dalam pameran APKASI	jenis produk	20 jenis produk dari 15 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan	20 jenis produk dari 14 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan, 1 IKM disabilitas	20 jenis produk dari 13 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan, 2 IKM disabilitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1. Petugas pajak laki laki: 25 orang 2. Petugas pajak perempuan : 25 orang
						Pameran Dagang Lokal	Pameran Jatim Fair bagi produk IKM	Jumlah produk yang dipromosikan dalam pameran jatim fair	jenis produk	20 jenis produk dari 15 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan	20 jenis produk dari 14 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan, 1 IKM disabilitas	20 jenis produk dari 13 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan, 2 IKM disabilitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET		OPD	KETERANGAN
						Pameran Dekranasda Provinsi Jawa Timur bagi produk kerajinan IKM	Jumlah produk yang dipromosikan dalam pameran Dekranasda	jenis produk	20 jenis produk dari 14 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan, 1 IKM disabilitas	20 jenis produk dari 13 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan, 2 IKM disabilitas	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah. Perindustrian, dan Perdagangan	
						Pameran Batik Bordir bagi produk kerajinan IKM	Jumlah IKM yang mengikuti pameran Batik Bordir	IKM	10 IKM batik dan bordir, terdiri dari 5 IKM laki - laki, 5 IKM Perempuan	10 IKM batik dan bordir, terdiri dari 5 IKM laki - laki, 5 IKM Perempuan	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah. Perindustrian, dan Perdagangan	
					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Sosialisasi Kebijakan Prosedur Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi kebijakan produk ekspor	orang	30 orang terdiri dari 20 orang laki - laki dan 10 orang perempuan	30 orang terdiri dari 20 orang laki - laki, 9 orang perempuan, 1 disabilitas	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah. Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan pemasaran online bagi IKM							
								Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemasaran online	orang	80 peserta terdiri dari : 35 IKM laki - laki, 40 IKM perempuan, 5 IKM disabilitas	50 peserta terdiri dari : 20 IKM laki - laki, 25 IKM perempuan, 5 IKM disabilitas	75 peserta terdiri dari : 30 IKM laki - laki, 35 IKM perempuan, 10 IKM disabilitas	Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah. Perindustrian, dan Perdagangan	
							Temu Investasi Kawasan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti temu investasi KIHT	orang	30 peserta terdiri dari : 25 IKM laki - laki, 5 IKM perempuan			Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah. Perindustrian, dan Perdagangan	
							Rapat Koordinasi Pra Pembentukan Kawasan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi pra pembentukan kawasan industri	orang	60 peserta terdiri dari : 50 IKM laki - laki, 10 IKM perempuan			Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah. Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat Koordinasi Evaluasi Pembentukan Kawasan Industri	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi evaluasi pembentukan kawasan industri	orang	60 peserta terdiri dari : 50 IKM laki-laki, 10 IKM perempuan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan Kemasan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kemasan	orang	20 peserta terdiri dari : 5 IKM laki-laki, 15 IKM perempuan	30 peserta terdiri dari : 10 IKM laki-laki, 20 IKM perempuan	50 peserta terdiri dari : 10 IKM laki-laki, 38 IKM perempuan dan 2 disabilitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
							Bantuan Kemasan IKM	Jumlah IKM yang mendapat bantuan kemasan	IKM	25 peserta terdiri dari : 15 IKM laki-laki, 10 IKM perempuan	30 peserta terdiri dari : 20 IKM laki-laki, 10 IKM perempuan	30 peserta terdiri dari : 10 IKM laki-laki, 20 IKM perempuan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET		OPD	KETERANGAN
							Fasilitasi Merk, halal, uji nutrisi dan SNI	Jumlah IKM yang mendapat bantuan fasilitasi Merk, Halal dan Uji Nutrisi	IKM	105 IKM terdiri dari 30 IKM laki-laki dan 75 IKM Perempuan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
							Pelatihan Peningkatan Mutu dan Bantuan Sarpras penunjang mesin dan Peralatan Aneka Keripik	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan mendapat bantuan	IKM	14 IKM terdiri dari 9 IKM laki-laki dan 5 IKM perempuan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
							Pelatihan Peningkatan Mutu IK Kopi	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan peningkatan IK Kopi	IKM	30 IKM terdiri dari 28 IKM laki-laki dan 2 IKM perempuan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET		OPD	KETERANGAN	
							Revitalisasi rumah produksi	Jumlah IKM yang mendapat bantuan revitalisasi rumah produksi	IKM	3 IKM terdiri dari 3 IKM Perempuan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
							Pelatihan Peningkatan Gula Merah yang Sehat	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan Gula Merah	IKM	60 IKM terdiri dari 20 IKM laki-laki, 40 IKM perempuan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
							Pelatihan Peningkatan Mutu IK Perhiasan Perak	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan peningkatan IK Perhiasan Perak	IKM	30 IKM terdiri dari 29 IKM laki-laki, 1 IKM perempuan		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	IKM	150 IKM terdiri dari 90 IKM laki-laki, 50 IKM perempuan, 10 IKM disabilitas			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
							Pelatihan Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	IKM	90 orang terdiri dari 60 IKM laki-laki, 30 IKM perempuan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pendampingan Kemitraan yang Berorientasi Ekspor	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	IKM	30 orang terdiri dari 20 IKM laki-laki dan 10 IKM perempuan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
							Temu Mitra dalam rangka pengembangan kemitraan IKM serta pelatihan online bekerjasama dengan marketplace	Jumlah IKM yang mengikuti temu mitra	IKM	150 orang terdiri dari 90 IKM laki-laki dan 60 IKM perempuan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
							Pendampingan Produksi dan Akses Bahan Baku untuk Memenuhi Standar Kemitraan	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	IKM	60 orang terdiri dari 40 IKM laki-laki dan 20 IKM perempuan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Bimbingan Teknis dan Bantuan Sarana Prasarana IKM Tempe	Jumlah IKM Yang mendapatkan Bimtek dan Bantuan Mesin Peralatan Produksi Tempe	IKM	5 orang terdiri dari 5 IKM laki-laki			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
			5. Meningkatkan jumlah usaha mikro	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan dan dikembangkan	Usaha Mikro	310 UM	320 UM	330 UM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
			Meningkatnya Pengeluaran per kapita	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Pasar Ramadhan bagi pelaku usaha laki - laki, perempuan dan disabilitas	Jumlah peserta yang mengikuti pasar ramadhan	peserta	58 peserta terdiri dari : 10 instansi, 24 pelaku usaha laki - laki, 23 pelaku usaha perempuan, 1 pelaku usaha kelompok disabilitas	58 peserta terdiri dari : 10 instansi, 24 pelaku usaha laki - laki, 23 pelaku usaha perempuan, 1 pelaku usaha kelompok disabilitas	58 peserta terdiri dari : 10 instansi, 24 pelaku usaha laki - laki, 23 pelaku usaha perempuan, 1 pelaku usaha kelompok disabilitas	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan evaluasi Tim Focal Point Gender	Jumlah peserta yang mengikuti rapat	orang	15 orang terdiri dari 10 orang laki - laki dan 5 orang perempuan	15 orang terdiri dari 10 orang laki - laki dan 5 orang perempuan	15 orang terdiri dari 10 orang laki - laki dan 5 orang perempuan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
		Mempertahankan kontribusi PDRB sub sektor perikanan	Meningkatnya PDRB Sub sektor Perikanan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	pembinaan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan	Jumlah poklamsar yang terbina jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan	kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30	30	30	Dinas Perikanan	Terpilainya Poklamsar laki-laki dan Poklamsar perempuan
							pengambilan sample hasil perikanan (ikan segar dan olahan)	Jumlah poklamsar yang terpantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan	kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30	35	35	Dinas Perikanan	Poklamsar laki-laki dan Poklamsar perempuan
					Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu)	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan	pembinaan dalam rangka memfasilitasi usaha dan investasinya	Jumlah pengolahan dan pemasar hasil perikanan terfasilitasi usaha dan investasinya	kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	80	80	80	Dinas Perikanan	Poklamsar laki-laki dan Poklamsar perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					Daerah Kabupaten/Kota	Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	pelatihan diversifikasi hasil perikanan (pelatihan masak)	Jumlah masyarakat terbina pengembangan produk perikanan bernilai tambah bagi pelaku usaha	pelaku usaha perikanan	30	30	30	Dinas Perikanan	Pelaku usaha perikanan laki-laki dan Pelaku usaha perikanan perempuan
		1. Meningkatkan Nilai Investasi	1. Meningkatkan Nilai Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Lumajang	Promosi Penanaman Modal	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1. Melaksanakan kegiatan Business Meeting yang mengundang pelaku usaha guna dilakukan paparan potensi investasi di Kabupaten Lumajang	1. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Kegiatan	1	2	2	DPMPTSP	jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi sebanyak 50 pelaku usaha dalam setiap kegiatannya dengan sasaran: 50 % P 50 %

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														Membuat data referensi potensi investasi terpilah sesuai gender dan membuat absensi gender setiap/ semua kegiatan acara
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha tentang regulasi terbaru di bidang Penanaman Modal	1. Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	3	3	DPMPPTSP	Membuat undangan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal terpilah gender, dengan sasaran : L = 50% P = 50% Menyampaikan materi tentang pentingnya kesetaraan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
		1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1. Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1. Perencanaan materi promosi (DTW), konsep promosi dan desain, 2. Menyusun Materi Promosi, 3. Cetak Materi Promosi	masy	Media	2	3	3	Dinas Pariwisata	Gender pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
							Penyediaan media promosi kepariwisataan media cetak		Kali	1	1	1	Dinas Pariwisata	
							pembuatan materi video kepariwisataan		Kali	2	2	2	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							pembuatan dan penyebarluasan promosi kepariwisataan melalui media elektronik	Kali	3	3	3	Dinas Pariwisata		
							pengambilan materi foto kepariwisataan	Kali	4	4	4	Dinas Pariwisata		
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Partisipasi Pameran promosi kepariwisataan Lumajang	event	6	6	6	Dinas Pariwisata		
							Partisipasi Pameran promosi kepariwisataan Lumajang	boyolali, jogja srby	Kali	1	1	1	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pameran promosi kepariwisataan	Closing Ceremonial (Topeng Kaliwungu, Topeng Kaliwungu, Pendukung, Kalender even 2022, Fasilitas even Air Show, Mahameru Akustik) Yang menikmati pertunjukan Kegiatan belajar Bersama Target bisa laki-laki bisa perempuan	Kali	1	2	2	Dinas Pariwisata	Resposif Gender
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	data dan jenis informasi pariwisata yang terupdate dan disajikan	Dinikmati oleh laki-laki dan perempuan		5 data dan 4 informasi	5 data dan 4 informasi	5 data dan 4 informasi	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<i>Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah ruang kreatif/Zona Kreatif yang disediakan	Jumlah Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang dibina 80 orang	zona	1	1	1	Dinas Pariwisata	Resposif Gender Bisa Laki-laki dan perempuan targetnya
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	<i>Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</i>		<i>Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar</i>		orang	100	100	100	Dinas Pariwisata	
						Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah kompetensi SDM Pariwisata tingkat dasar yang dibina	SDM ekonomi kreatif tingkat dasar yang dibina	orang	50	50	50	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	orang	80	80	80	Dinas Pariwisata	
						Pelatihan Digitalisasi: branding, Pemasaran dan Penjualan pada Desa Wisata, Homestay, Kuliner, Souvenir, Fotografi (Peserta pelatihan berbasis Gender	orang	80	80	80	Dinas Pariwisata	Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
						Pelatihan Pemandu Wisata Outbond (DAK-NF)		Peserta pelatihan berbasis Gender	orang	80	80	80	Dinas Pariwisata	Target Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
						Pelatihan pengelolaan desa wisata (DAK-NF)		Peserta pelatihan berbasis Gender	orang	80	80	80	Dinas Pariwisata	Laki-laki 50 % Perempuan 50 %

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pelatihan pengelolaan usaha homestay/ pondok wisata (DAK-NF)	Peserta pelatihan berbasis Gender	orang	80	80	80	Dinas Pariwisata	Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
							Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higenis Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata (DAK-NF)	Peserta pelatihan berbasis Gender	orang	80	80	80	Dinas Pariwisata	Target Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
						Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata an bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	pelatihan dasar SDM kepariwisata an bagi masyarakat umum disekitar tempat wisata yang dibina		Kegiatan	3	3	3	Dinas Pariwisata	
							Pelatihan Ketrampilan Kriya						Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Fasilitasi Kegiatan Ekonomi Kreatif Pasinan Dingklik		Paket	1	1	1	Dinas Pariwisata	
						Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	SDM ekonomi kreatif yang dibina		Kegiatan	2	2	2	Dinas Pariwisata	
					<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>		kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang berkembang		Orang	100	100	100	Dinas Pariwisata	
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Pelatihan Souvenir Desa tamaan ayu	Orang	100	100	100	Dinas Pariwisata	
							Bimbingan teknis luar kantor pelatihan souvenir		Orang	100	100	100	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Presentase Daya Tarik Destinasi Wisata yang memenuhi kriteria 3A	DTW	1	1	1	Dinas Pariwisata	
					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	DTW	1	1	1	Dinas Pariwisata	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		DTW	1	1	1	Dinas Pariwisata	
							Penyusunan Peraturan Bupati tentang Masterplan Rencana Pengembangan KSP Desa Ranupani					Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		kawasan strategis pariwisata kabupaten / kota yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	10	10	10	Dinas Pariwisata	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	sarana dan prasarana pendukung destinasi yang terpelihara		Destinasi	1	1	1	Dinas Pariwisata	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	destinasi pariwisata kabupaten / kota yang pengelolaannya menggunakan metode kerjasama dengan masyarakat		Kerjasama	1	1	1	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata (DAK-NF)	Berbasis Gender Laki - Laki dan perempuan	orang	50	50	50	Dinas Pariwisata	Target Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
							Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata (DAK NF)	Berbasis Gender Laki - Laki dan perempuan	orang	50	50	50	Dinas Pariwisata	Target Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Berbasis Gender Laki - Laki dan perempuan	DTW	1	1	1	Dinas Pariwisata	Target Laki-laki 50 % Perempuan 50 %
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	permohonan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten / kota yang diverifikasi	Berbasis Gender Laki - Laki dan perempuan	Dokumen	25	25	25	Dinas Pariwisata	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Verifikasi berkas administrasi permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata	Berbasis Gender Laki - Laki dan perempuan					Dinas Pariwisata	
			3.Meningkatnya kemandirian fiskal daerah										BPRD	5
			4.Meningkatnya akses infrastruktur daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Saluran Irigasi	Jumlah Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa untuk Irigasi yang Terbangun	m'	1.200	1.200	1.200	DPUTR	
							Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air baru yang terbangun	buah	10	10	10	DPUTR	
						Pembangunan Bendung Irigasi	Pembangunan Bendungan/ DAM	Jumlah Bendung irigasi yang terbangun	buah	1	1	1	DPUTR	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Irigasi rawa yang terbangun	m'	500	500	500	DPUTR	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Saluran Irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun	m'	2.500	2.500	2.500	DPUTR	
						Peningkatan Bendung Irigasi	Peningkatan Saluran Irigasi	Jumlah Bendung irigasi yang terbangun	buah	3	3	3	DPUTR	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi yang Terehabilitasi	m'	9.500	9.500	9.500	DPUTR	Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang aman bagi penggunaannya (perempuan, anak-anak, lansia, difabel) dan inklusif
							Rehabilitasi bangunan reservoir pengendali banjir	Jumlah bangunan reservoir pengendali banjir yang terehabilitasi	m'	600	650	650	DPUTR	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pembangunan Parapet	Panjang bantaran dan tanggul sungai yang terehabilitasi	m'	700	750	750	DPUTR	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Normalisasi saluran	Panjang jaringan irigasi yang di normalisasi	m3	15.000	15.000	15.000	DPUTR	
							Rehabilitasi pintu air	Jumlah pintu air direhabilitasi	buah	75	75	75	DPUTR	
							Normalisasi sungai	Jumlah Sungai yang dibersihkan / dikeruk	m3	23.000	23.000	23.000	DPUTR	
							Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi terpelihara	m'	2.550	2.600	2.650	DPUTR	Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang aman bagi penggunaanya (perempuan, anak-anak, lansia, difabel) dan inklusif
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Monev Kinerja J.I.	Jumlah cakupan wilayah/kecamatan UPT SDA	kecamatan	21	21	21	DPUTR	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pelatihan dan Pembinaan HIPPA	Jumlah kegiatan pelatihan dan pembinaan HIPPA di Korwil PU SDA	Korwil SDA	7	7	7	DPUTR	Sasaran pada kegiatan pelatihan dan pembinaan HIPPA yaitu para petani pemakai air laki-laki dan perempuan . Dengan adanya kegiatan ini diharapkan agar para petani semakin berdaya dan memahami terkait pengelolaan irigasi.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung/Bangunan yang dibangun	unit	3	3	3	DPUTR	Pembangunan Bangunan Gedung yang berstandart responsif gender dan inklusif
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pelatihan / Desk Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa	Jumlah peserta pelatihan	peserta	200	200	200	DPUTR	Pelatihan / Desk Proposal Bantuan Keuangan Khusus Desa dengan prosentase laki-laki 50%, perempuan 45%, disabilitas 5%

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Verifikasi dokumen BKK	Jumlah dokumen BKK yang terverifikasi	dokumen	250	250	250	DPUTR	
						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Jalan yang responsif gender dan inklusif	Jumlah lahan yang dibebaskan	bidang	500	500	500	DPUTR	
						Pengelolaan Leger Jalan	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten	Jumlah panjang ruas jalan yang di leger	km	60	60	60	DPUTR	
							Pemasangan patok rumija di jalan kabupaten	Jumlah jalan yang berpatok	ruas	16	16	16	DPUTR	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan	Jumlah panjang jalan yang di survei	km	1.109	1.109	1.109	DPUTR	
							Survey Kondisi Jembatan	Jumlah jembatan yang disurvei	unit	425	425	425	DPUTR	
						Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang jalan kab yang dibangun	km	3,3	3,3	3,3	DPUTR	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	km	268,08	268,08	268,08	DPUTR	Peningkatan Jalan yang aman bagi penggunaanya (perempuan, anak-anak, lansia, difabel) dan inklusif
							Pembangunan Talud	panjang talud yang di bangun	km	3,5	3,5	3,5	DPUTR	
						Rehabilitasi Jalan	Pembangunan drainase	Panjang drainase yang dibangun	km	12,52	12,52	12,52	DPUTR	
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara berkala	km	11	12	12	DPUTR	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara rutin	km	859,72	859,72	859,72	DPUTR	
						Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	unit	2	3	2	DPUTR	
						Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	unit	2	3	3	DPUTR	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang pelihara rutin	unit	5	5	5	DPUTR	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara berkala	unit	406	406	406	DPUTR	
						Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Penanganan darurat Penujangan Jalan	panjang jalan yang ditangani akibat bencana/tanggap darurat	km	5	5	5	DPUTR	
				Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisai Rencana Tata Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	peserta	100	100	100	DPUTR	Sosialisai Rencana Tata Ruang dengan prosentase laki-laki 50%, perempuan 45%, disabilitas 5%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan evaluasi Tim Focal Point Gender	Jumlah peserta yang mengikuti rapat	peserta	15	15	15	DPUTR	Rapat koordinasi dan evaluasi dengan peserta 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
		2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH										DLH	
			1. Meningkatkan kualitas air	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan tanah)	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas airnya	titik	36	36	36	DLH	Pemantauan kualitas air dilakukan oleh 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
			2. Meningkatkan kualitas udara				Pemantauan kualitas lingkungan (udara)	Jumlah lokasi yang dipantau kualitas udaranya	titik	8	8	8	DLH	Pemantauan kualitas udara dilakukan oleh 2 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pembahasan persetujuan teknis/kajian teknis pemenuhan baku mutu lingkungan	Jumlah fasilitasi pemenuhan pengendalian pencemaran lingkungan	kegiatan	40	41	42	DLH	Pembahasan persetujuan teknis/kajian teknis dihadiri oleh peserta 50% laki-laki, 50% perempuan
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rapat Koordinasi Pengendalian Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rapat Koordinasi	kegiatan	1	1	1	DLH	Rapat diadakan dengan jumlah perbandingan undangan laki-laki dan perempuan kisaran 60 : 40

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembinaan Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim di Kelurahan atau Desa	Sosialisasi dan Pembinaan	lokasi	10	10	10	DLH	Sosialisasi dan Pembinaan diadakan sejumlah lokasi yang dibina. Dan dengan target perbandingan undangan yang hadir antara laki-laki dan perempuan sebesar 60 : 40
						Rapat Koordinasi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)	Rapat Koordinasi	kegiatan	1	1	1	DLH	Rapat diadakan dengan jumlah perbandingan undangan laki-laki dan perempuan kisaran 60 : 40

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupten/Kota	Pemenuhan Akreditasi Laboratorium Lingkungan	Jumlah Uji Kualitas Lingkungan yang difasilitasi	sampel	120	180	240	DLH	Tidak dapat ditentukan	
						Penyusunan PERDA retribusi laboratorium	Jumlah produk hukum yang dikeluarkan	dokumen	1	-	-	DLH	Proses Penyusunan Perda dihadiri oleh peserta 50% laki-laki, 50% perempuan	
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Pembangunan sumur resapan	Jumlah lokasi Tangkapan air yang direhabilitasi	lokasi	0	0	0	DLH	Tidak ada anggaran untuk perencanaan pembangunan sumur resapan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di lahan kritis bekas tambang Kabupaten Lumajang	Jumlah lahan kritis yang direhabilitasi	lokasi	1	1	1	DLH	Lahan kritis bekas tambang ditargetkan menjadi sasaran prioritas, dan melibatkan peran serta masyarakat dan instansi yang memiliki kesetaraan gender yang seimbang
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Verifikasi lapangan terhadap pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten yang diverifikasi/diregistrasi	kegiatan	20	20	20	DLH	Melakukan verifikasi lapangan terhadap lokasi pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten (80% pria, 20% wanita)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat koordinasi penanganan pengaduan	Jumlah rapat yang dilakukan	kegiatan	40	40	40	DLH	Melakukan rapat koordinasi penanganan pengaduan dengan lintas OPD (60% pria, 40% wanita)
							Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan monitoring dan evaluasi lapangan penanganan pengaduan yang telah melakukan progres perbaikan dan progres penanganan pengaduan	kegiatan	30	30	30	DLH	Melakukan monitoring dan evaluasi lapangan penanganan pengaduan atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten yang telah melakukan progres perbaikan dan progres penanganan pengaduan pada usaha/kegiatan yang

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														diadakan (80% pria, 20% wanita)
			3. Meningkatkan pengelolaan sampah	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pengomposan Sampah Organik	Jumlah sampah yang terolah	ton	3,6	4,5	5,6	DLH	Laki - laki 8 ; Perempuan ; 7
							Penyediaan keranjang dan sapu lidi	Jumlah Sampah yang tertangani	buah	30	45	68	DLH	Laki - laki 8 ; Perempuan ; 7
							Pemeliharaan Mesin Pencacah Kompos	Jumlah mesin pencacah kompos yang tersedia	unit	2	3	3	DLH	Laki - laki 8 ; Perempuan ; 7
							Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	Jumlah kendaraan roda tiga yang tersedia	unit	2	2	2	DLH	Laki - laki 8 ; Perempuan ; 7
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Jumlah masyarakat yang dibina	orang	51	65	80	DLH	Laki - laki 20 ; Perempuan ; 31
							Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Jumlah masyarakat yang dibina	orang	53	65	75	DLH	Laki - laki 25 ; Perempuan ; 27

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Jumlah masyarakat yang dibina	orang	46	55	60	DLH	Laki - laki 20 ; Perempuan ; 26
							Pendampingan masyarakat penerima bantuan TPS 3R	Jumlah masyarakat yang didampingi dan dibina	orang	360	360	360	DLH	Laki - laki 250 ; Perempuan ; 110
							Pendampingan usaha/kegiatan pengurangan sampah	Jumlah kelompok yang didampingi	kelompok	21	30	35	DLH	Laki - laki 70% ; Perempuan ; 30%
				PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Penyusunan DED Pembangunan Incinerator	Jumlah dokumen DED pembangunan incinerator	dokumen	1	1	1	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat koordinasi penyusunan dokumen DED meliputi Laki-Laki 50 % dan Perempuan 50%.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
			4. Meningkatkan kualitas tutupan lahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Verifikasi permohonan persetujuan lingkungan	Jumlah Usaha/kegiatan yang diterbitkan Persetujuan Lingkungan	usaha/kegiatan	40	40	40	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat pemeriksaan dokumen Lingkungan Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.
						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengiriman peserta diklat PPLH dan PPNS	Jumlah pejabat Pengawas Lingkungan Hidup & PPNS	orang	3	3	3	DLH	peserta diklat PPLH dan PPNS Perempuan :Laki-laki 50%:50%

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi pengelolaan LH bagi Kegiatan/ Usaha	Jumlah titik Usaha terpantau perizinan lingkungan	usaha/kegiatan	40	40	40	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat Hasil Pengawasan Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Review RPPLH	Tersusunnya dokumen DDDTLH	dokumen	0	1	0	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat penyusunan dokumen yaitu Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Lumajang	Tersusunnya dokumen IKPLHD	dokumen	1	1	1	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat Hasil Penyusunan dokumen IKPLHD Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan Dokumen KLHS Kecamatan Senduro	Tersusunnya dokumen KLHS	dokumen	0	1	0	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat penyusunan dokumen yaitu Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.
							Penyusunan Dokumen KLHS Kecamatan Jatiroto	Tersusunnya dokumen KLHS	dokumen	0	1	0	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat penyusunan dokumen yaitu Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.
							Penyusunan Dokumen KLHS Kecamatan Ranuyoso	Tersusunnya dokumen KLHS	dokumen	0	1	0	DLH	Untuk peserta yang hadir dalam rapat penyusunan dokumen yaitu Laki-Laki 60 % dan Perempuan 40%.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan	Pendampingan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang didampingi	Sekolah	25	30	35	DLH	
							Pendampingan Kegiatan Prokasih	Jumlah lokasi yang didampingi	Lokasi	1	2	3	DLH	
							Pendampingan Kalpataru	Jumlah lembaga/masyarakat yang dibangun untuk programkalpataru	Lembaga/masyarakat	3	3	3	DLH	
							Pendampingan Desa/ Kelurahan Berseri	Jumlah desa/kelurahan yang didampingi dalam program Berseri	Desa/ Kelurahan	6	7	8	DLH	
							Verifikasi Ecopesantren	Jumlah pondok pesantren yang dilakukan pembinaan program eco pesantren	pondok pesantren	2	3	4	DLH	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan evaluasi Tim Focal Point Gender	Jumlah peserta yang mengikuti rapat	orang	15	15	15	DLH	Jumlah peserta yang mengikuti rapat berjumlah 15 orang dengan rincian 8 orang perempuan dan 7 orang laki-laki
			4. Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana										BPBD	8
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Dasar	1. Pengadaan Perlengkapan Siswa	-Jumlah Siswa yang terfasilitasi Pengadaan Perlengkapan Siswa	penyaluran bantuan tas sekolah, seragam dan sepatu. (siswa laki-laki : 5684, siswa perempuan: 5237	siswa	16342	17159	17976	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-Persentase sekolah yang terfasilitasi Bantuan Operasional	-fasilitasi penyaluran bantuan operasional	%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	1. Pengadaan Perlengkapan Siswa	-Jumlah Siswa yang terfasilitasi Pengadaan Perlengkapan Siswa	penyaluran bantuan tas sekolah, seragam dan sepatu. (siswa laki-laki : 5653, siswa perempuan: 5001)	siswa	15810	16600	17390	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-Persentase sekolah yang terfasilitasi Bantuan Operasional	-fasilitasi penyaluran bantuan operasional	%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					3. Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	-Jumlah Sekolah yang terfasilitasi Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	-fasilitasi penyaluran Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	sekolah	23	24	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	-penyaluran bantuan tas sekolah, seragam dan sepatu (siswa laki-laki:12, siswa perempuan:14	sekolah	1	1	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase lembaga yang terfasilitasi Bantuan Operasional	-fasilitasi penyaluran bantuan operasional	%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	penyaluran Alat Praktik belajar dan Peraga belajar Siswa PAUD	sekolah	55	56	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (4 jenis : Wayang, Topeng Kali Wungu 150 Orang, Jaran Kencak 100 orang, Pagelaran Harjalu 100 orang dan Dangung)	Pelestarian kesenian tradisional yang dilestarikan. (4 Jenis (wayang, topeng kaliwungu, jaran kencak, dangung))	Jumlah Pelaku seni laki-laki dan Jumlah Pelaku seni perempuan yang mengikuti (4 jenis : Wayang, Topeng Kali Wungu 150 Orang, Jaran Kencak 100 orang, Pagelaran Harjalu 100 orang dan Dangung) Dan Pagelaran seni dinikmati semua saja (resposif gender)	jenis	4	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adapun pelaku Wayang, Topeng Kali Wungu 150 Orang laki-laki sebanyak 100 orang (60%), perempuan sebanyak 50 orang (40%) dan Jarang Kencak dan Pagelaran Harjalu masing-masing 100 orang laki-laki sebanyak 50 orang (50%) dan Perempuan sebanyak

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														(50 %) Pelaku seni diberi kesempatan yang sama
							Pagelaran Kesenian Jaran Kencak	Seniman untuk Pagelaran Kesenian Jaran Kencak	Orang	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jarang Kencak dan Pagelaran Harjalu masing-masing 100 orang laki-laki sebanyak 50 orang (50%) dan Perempuan sebanyak (50 %) Pelaku seni diberi kesempatan yang sama dan Pagelaran Seni dinikmat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pagelaran Kesenian Topeng Kaliwungu	Seniman untuk Pagelaran Kesenian Topeng Kaliwungu	Orang	150	150	150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Topeng Kali Wungu 150 Orang laki-laki sebanyak 100 orang (60%), perempuan sebanyak 50 orang (40%) Pelaku seni diberi kesempatan yang sama

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pagelaran Kesenian Tradisi Harjalu	Seniman untuk Pagelaran Kesenian Tradisi Harjalu	Orang	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adapun pelaku Wayang, Topeng Kali Wungu 150 Orang laki-laki sebanyak 100 orang (60%), perempuan sebanyak 50 orang (40%) dan Jarang Kencak dan Pagelaran Harjalu masing-masing 100 orang laki-laki sebanyak 50 orang (50%) dan Perempuan sebanyak (50 %) Pelaku seni diberi kesempatan yang sama

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Fasilitasi penampilan kesenian (Kecamatan di seluruh Kabupateng Lumajang)		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Pagelaran seni tradisi (Harjalu) (alun -alun Kab. Lumajang) 80 Orang		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Pagelaran Jaran Kencak (Alun Alun Kab. Lumajang)		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Pengiriman Tim Kesenian Luar Provinsi TMII Jakarta		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengiriman Tim Kesenian dalam Provinsi (Jatim Specta (Nganjuk), FKKS (Pacitan), Festival Karya Tari (Surabaya))		Kali	0	3	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Fasilitasi Jaran Kencak (Kudus)		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Hadrah (selok Awar-awar)		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Al-Banjari (Jambekumbu)		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Peralatan gamelan (Tempur Sari)		Kali	0	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan teknis manajemen pertunjukkan seni tradisional	Jumlah Laki-laki dan Jumlah Perempuan yang mengikuti pelaksanaan pelatihan seimbang Laki-laki 50% perempuan 50% dan dinikmati pertunjukannya oleh semua (Resposip Gender)	Kali	6	8	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							FESTIVAL BINTANG RADIO SEMERU FM	Jumlah Laki-laki dan Jumlah Perempuan yang mengikuti pelaksanaan pelatihan seimbang Laki-laki 50% perempuan 50% dan dinikmati pertunjukannya oleh semua (Resposip Gender)	Paket	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							LOMBA PIDATO	Resposip Gender	Paket	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi secara terpadu	Museum Daerah Kabupaten Lumajang museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	pengunjung Museumum bisa laki-laki bisa perempuan	Museum daerah	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Museum Daerah Resposif Gender Bisa dinikmati oleh semua
							Seminar Kajian Koleksi Museum (DAK-NF)	Jumlah Peserta Seminar Target bisa laki-laki bisa perempuan	Orang	60	60	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Museum Daerah Resposif Gender Bisa dinikmati oleh semua
							Kajian kegiatan FGD/DAK-NF	Jumlah Peserta Target bisa laki-laki bisa perempuan	Orang	75	75	75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Peserta Target Target bisa laki-laki bisa perempuan
						Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		SDM yang ditingkatkan	Kegiatan	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Kegiatan Museum Wengi (DAK-NF)	Yang menikmati pertunjukan Museum Wengi Peserta Target bisa laki-laki bisa perempuan					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Yang menikmati pertunjukan Museum Wengi Peserta Target bisa laki-laki bisa perempuan
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Festival Museum Daerah (DAK-NF)	Yang menikmati pertunjukan Festival Museum Daerah Peserta Target bisa laki-laki bisa perempuan Peserta Seminar Target bisa laki-laki bisa perempuan	orang	50	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Yang menikmati pertunjukan Festival Museum Daerah Peserta Target bisa laki-laki bisa perempuan Peserta Seminar Target bisa laki-laki bisa perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							kegiatan belajar bersama (DAK-NF)	orang	50	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Kegiatan Lomba (DAK-NF)	Kegiatan	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	sarana dan prasana yang dipelihara dan disediakan	unit	10	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pemeliharaan Sarpras Museum (DAK-NF)Penyediaan tanda penunjuk arah (DAK-NF)	Unit	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemeliharaan Sarpras Museum (DAK-NF)Penyediaan tanda penunjuk arah (DAK-NF) dinikmati pengunjung museum (resposif gender)
							Penyediaan Sarana Prasarana Museum (DAK-NF)penyediaan alat pemadam kebakaran (DAK-NF)	Unit	2	2	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	sarana dan prasarana yang direvitalisasi	Unit	8	8	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pemeliharaan Bangunan Gedung (DAK-NF) Pemenuhan Ruang Laktasi	Pemeliharaan Bangunan Gedung (DAK-NF) Pemenuhan Ruang Laktasi	Paket	1			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
								Pemeliharaan Bangunan Gedung (DAK-NF) Pemenuhan Ruang Laktasi dinikmati pengunjung museum (resposif gender)	Pket	1			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemenuhan Ruang Laktasi dinikmati pengunjung museum (resposif gender)
								Pemenuhan Sarana Difabel dinikmati pengunjung museum (resposif gender)	Paket	1			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemenuhan Sarana Difabel dinikmati pengunjung museum (resposif gender)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen PPRG	Jumlah penguatan PPRG oleh Focal Point PUG	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	sosialisasi penguatan tentang pemahaman PPRG kepada para pengelola program. Peserta diikuti laki-laki (25%) dan perempuan (75%) dalam rangka penyusunan dokumen PPRG.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rehab Gedung Farmasi	Jumlah rehab gedung farmasi selesai di tahun 2022	unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	Rehab 1 unit gedung farmasi RSUD Dr. haryoto sehingga pelayanan farmasi ramah gender (fasilitas untuk lansia, bayi, pengguna kursi roda. aman dan nyaman bagi petugas dan pengguna layanan)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penataan Kelas Rawat Inap Jaminan Kesehatan Nasional (KRI – JKN) di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Haryoto	Persentase tempat tidur rawat inap kelas standar	%	60	62	65	Dinkes PP & KB	Penataan TT Rawat Inap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan responsif gender (privasi pasien)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan gedung OK dan ICU	Jumlah Bangunan yang dibangun, yang responsif gender	unit	0	1	0	Dinkes PP & KB	jumlah bangunan yang memfasilitasi kepentingan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Contohnya tersedia WC (bagi laki-laki, perempuan, dan Disabilitas), Ruang Laktasi, Kursi roda. Papan rambatan untuk disabilitas
							Pembangunan WC di ruang rawat inap	Jumlah bangunan WC terpisah bagi laki-laki dan perempuan	unit	4	4	4	Dinkes PP & KB	penambahan kamar mandi bagi laki-laki dan perempuan terpisah sehingga aman dan nyaman

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengadaan tempat duduk/kursi tunggu	Jumlah tempat duduk khusus bagi disabilitas, lansia, dan ibu hamil	unit	0	2	0	Dinkes PP & KB	tempat duduk/kursi tunggu khusus untuk disabilitas, lansia, dan ibu hamil
							Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah papan rambatan untuk disabilitas	unit	0	2	2	Dinkes PP & KB	penambahan papan rambatan/handrail bagi disabilitas
						Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	<i>pelaksanaan distribusi obat dan vaksin ke puskesmas</i>	persentase fasilitasi distribusi Obat dan Vaksin ke puskesmas yang dilaksanakan	%	56	56	56	Dinkes PP & KB	pendistribusian obat dan vaksin ke seluruh sasaran kelompok masyarakat untuk upaya kesehatan masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan ruang BSL Labkesda	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun, yang responsif gender	fasilitas	0	1	0	Dinkes PP & KB	jumlah fasilitas yang mengakomodir kepentingan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Contohnya tersedia WC laki-laki dan perempuan, Ruang Laktasi, Kursi roda. Papan rambatan untuk disabilitas
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehab Pustu Ranupane	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara, yang responsif gender	fasilitas	1	0	0	Dinkes PP & KB	jumlah fasilitas yang mengakomodir kepentingan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Contohnya tersedia WC laki-
						Rehab Pustu Jarit	1			0	0	Dinkes PP & KB		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Rehab Pustu Kraton			1	0	0	Dinkes PP & KB	laki dan perempuan, Ruang Laktasi, Kursi roda. Papan rambatan untuk disabilitas
							Rehab Pustu Wonogriyo			1	0	0	Dinkes PP & KB	
							Rehab Pustu Sumberurip			1	0	0	Dinkes PP & KB	
							Rehab Pustu Dawuhan Wetan			1	0	0	Dinkes PP & KB	
						Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara, yang responsif gender	unit	0	1	1	Dinkes PP & KB	jumlah puskesmas yang mengakomodir kepentingan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Contohnya tersedia WC laki-laki dan perempuan, Ruang Laktasi, Kursi roda. Papan rambatan untuk disabilitas. Rencana rehabilitasi pkm tunjung

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														dan pkm ranuyoso
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan fisik TPS B3 puskesmas yang layak	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan	unit	1	2	2	Dinkes PP & KB	pembangunan TPS B3 dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3. Rencana Lokasi TPS B3 di pkm tempursari , pronojiwo,c andipuro.penanggal,pasirian,bades,gucialit,sukodono,kedungjangan,tekung

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pembangunan fisik IPAL puskesmas yang layak		unit	0	2	2	Dinkes PP & KB	pembangunan IPAL dimaksudkan agar cairan limbah dapat digunakan kembali serta agar tidak mencemari lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat. Rencana Lokasi IPAL di pkm tempeh, labruk, sumbersari, sukodono, randugung, klakah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pembelian alat antropometri		unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	untuk 25 puskesmas dengan masing2 mendapatkan 5 alat. Antropometri terutama untuk menilai atau menentukan status gizi anak, kesehatan ibu hamil, dan ibu menyusui

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penyediaan Cold Storage	unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	pengadaan cold storage dimaksudkan untuk memastikan kualitas obat/vaksin agar terjaga kualitasnya sehingga aman untuk semua kelompok sasaran (anak-anak, remaja, WUS). Rencana lokasi cold storage di pkm pronojiwo, pasirian, rotrunan, kedungjajang, jatiroto,
							Alat laboratorium Labkesda	set	1	0	0	Dinkes PP & KB	lokasi di Labkesda
							Pengadaan medical air compressor	unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	lokasi rsp

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengadaan USG 2D Digital		unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	lokasi di 19 pkm
							Perangkat Sistem Informasi		unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	lokasi di 21 pkm
							Pengadaan Ambulanse		unit	0	1	0	Dinkes PP & KB	lokasi di pkm rogotrunan
							Pengadaan Instalasi Air Bersih		unit	1	0	0	Dinkes PP & KB	lokasi di Labkesda
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan alkes gawat darurat	Persentase kelengkapan alat kesehatan rumah sakit	%	64%	68%	70%	Dinkes PP & KB	pemenuhan alat kesehatan melalui sumber dana non BLUD untuk menjamin pelayanan kesehatan terpenuhi bagi seluruh pasien rumah sakit (baik laki/perempuan; bayi, lansia, dan
						Pengadaan alkes rawat inap	Dinkes PP & KB							
						Pengadaan alkes rawat jalan	Dinkes PP & KB							
						Pengadaan alkes ruang operasi	Dinkes PP & KB							

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengadaan alkes radiologi					Dinkes PP & KB	disabilitas)	
							Pengadaan alkes NICU					Dinkes PP & KB		
							Pengadaan bahan habis pakai	jumlah bahan habis pakai yang disediakan	item	50	50	50	Dinkes PP & KB	penyediaan bahan habis pakai untuk menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien rumah sakit (baik laki-laki/perempuan, bayi, lansia, dan disabilitas)
							Pengadaan alat kedokteran umum	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	unit	20	20	20	Dinkes PP & KB	pemenuhan alat kesehatan untuk menjamin

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Kesehatan yg diadakan				Dinkes PP & KB	pemuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien rumah sakit (baik laki-laki/perempuan, bayi, lansia, dan disabilitas)	
							Pengadaan Alat Laboratorium Patologi					Dinkes PP & KB		
							Pengadaan kursi roda					Dinkes PP & KB		
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Gawat Darurat termasuk EKG)	jumlah jenis alkes/ alat penunjang yang diadakan	unit	21	21	21	Dinkes PP & KB	pengadaan alkes dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan program kesehatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							- Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal) - Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (Set Laboratorium)							masyarakat oleh puskesmas bagi semua kelompok sasaran
						Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan kalibrator alkes dan kalibrasi kalibrator	jumlah alat kalibrasi yang diadakan	unit	2	4	4	Dinkes PP & KB	pengadaan kalibrator dimaksudkan untuk menjaga alkes agar tetap bisa berfungsi optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat (laki, perempuan, dan disabilitas)
								jumlah alat kalibrasi yang dipelihara	unit	4	4	4	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengadaan Obat, Vaksin	Pengadaan Obat-Obatan yankes dasar	Persentase jenis obat sesuai format	%	68	70	72	Dinkes PP & KB	pengadaan obat-obatan dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas bagi semua kelompok sasaran
							Pengadaan Obat-Obatan	jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan	jenis	399	399	399	Dinkes PP & KB	pengadaan obat-obatan dan vaksin untuk menunjang pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien rumah sakit baik laki-laki, perempuan, bayi, ibu hamil, lansia, dan disabilitas

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	item	50	50	50	Dinkes PP & KB	pengadaan bahan habis pakai untuk menunjang pemenuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien rumah sakit baik laki-laki, perempuan, bayi, ibu hamil, lansia, dan disabilitas
							pengadaan Bahan Kimia					Dinkes PP & KB		
							pengadaan Isi Tabung Gas					Dinkes PP & KB		
							Pengadaan bahan kimia					Dinkes PP & KB		
							pengadaan isi tabung gas					Dinkes PP & KB		
							pengadaan bahan habis pakai lainnya					Dinkes PP & KB		
							pengadaan alat kedokteran umum					Dinkes PP & KB		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengadaan belanja Bahan-isi Tabung Gas		Tabung	1100	1100	1100	Dinkes PP & KB	pengadaan isi tabung gas oksigen dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas bagi semua kelompok sasaran
							Pengadaan belanja bahan medis habis pakai		%	68	70	72	Dinkes PP & KB	pengadaan bahan medis habis pakai dimaksudkan untuk menunjang pelayanan kesehatan dasar oleh puskesmas bagi semua kelompok sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan alkes oleh tenaga terampil level 2 di puskesmas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara rutin	Unit	300	300	375	Dinkes PP & KB	pemeliharaan alkes dimaksudkan untuk menjaga alkes agar tetap bisa berfungsi optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat (laki, perempuan, dan disabilitas)
							Kalibrasi alkes puskesmas		Unit	417	450	500	Dinkes PP & KB	kalibrasi alkes dimaksudkan untuk menjaga alkes agar tetap bisa berfungsi optimal sehingga bermanfaat bagi masyarakat (laki, perempuan, dan disabilitas)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengawasan tekhnis medis kasus komplikasi kebidanan	Jumlah kasus ibu hamil yang terkawal	kasus	4	4	4	Dinkes PP & KB	peserta terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan pengelola program. Tema acara terkait hal-hal mengenai penyebab dan solusi kasus komplikasi kebidanan
							Pembinaan POGI (Sasaran : Semua SPOG)	Jumlah dokter spesialis OBGYN laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pembinaan	orang	9	9	9	Dinkes PP & KB	peserta terdiri dari para dokter, dokter spesialis OG, Tema acara terkait hal-hal mengenai penyebab dan solusi kasus komplikasi obstetri dan ginekologi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Perencanaan dan Evaluasi program (Sasaran : 25 Kepala Puskesmas)	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan dari Puskesmas yang dievaluasi capaian program kesga nya	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	peserta terdiri dari para kepala puskesmas . Tema terkait program kesehatan di puskesmas
							Validasi data (sasaran Pengelola Program)	jumlah peserta laki-laki dan perempuan dari Puskesmas yang tervalidasi jenis datanya	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Rakor TIM PENAKIB Kabupaten (Sasaran : Tim Penakib Kabupaten)	Jumlah laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam Tim Penakib Kabupaten mendukung program kesga untuk menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Lumajang	orang	15	15	15	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Replikasi Paket Peralinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif (Sasaran : Puskesmas Pronojiwo, Kunir, Labruk, Pasrujambe)	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti rakor	orang	7	0	0	Dinkes PP & KB	
							Sosialisasi dan Lokakarya Pembentukan MSF Paket Peralinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif	Jumlah anggota MSF laki-laki dan perempuan yang tersosialisasi paket Peralinan Aman, IMD, ASI Eksklusif	orang	50	0	0	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Workshop tim survey tool Assessment baseline survey dan survey pengaduan masyarakat Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif	Jumlah anggota MSF laki-laki dan perempuan yang menyusun kuesioner yanblik	orang	50	0	0	Dinkes PP & KB	
							Lokakarya Analisa dan monitoring penyebab pengaduan dan penyusunan darf JPP Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif	Jumlah anggota MSF laki-laki dan perempuan yang melakukan analisis monitoring penyebab	orang	50	0	0	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pendampingan teknis penyusunan Janji Pelayanan Publik paket persalinan aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif (pajak rokok spesifik)	Jumlah anggota MSF laki-laki dan perempuan terdampingi penyusunan JPP	orang	80	0	0	Dinkes PP & KB	
							Workshop penyusunan kartu kontrol Paket Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif serta penusunan laporan akhir	Jumlah anggota MSF laki-laki dan perempuan yang menyusun kartu kontrol	orang	40	0	0	Dinkes PP & KB	
							Deklarasi JPP	Jumlah anggota MSF laki-laki dan perempuan yang menyusun JPP	orang	30	0	0	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Konsolidasi KMPK se Kabupaten Lumajang	Jumlah ketua MSF laki-laki dan perempuan yang yang terbentuk di 25 Puskesmas	orang	25	0	0	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Penyeliaan fasilitatif (P4K) terintegrasi desa siaga Orientasi kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, fasilitator/tenaga pendamping desa Pelaksanaan kegiatan KIA di Kelas Ibu Pendataan & pemutakhiran sasaran program kesehatan	persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	
					2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pendampingan Puskesmas dalam Pelayanan Maternal (Sasaran : 25 Puskesmas)	Jumlah nakes laki-laki dan perempuan dari Puskesmas yang dilakukan pendampingan dalam pelayanan Maternal	orang	150	150	150	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Jampersal	Jumlah rujukan kasus ibu hamil risti, bersalin, nifas dan BBL risiko tinggi yang dibiayai jampersal	orang	1779	1790	1800	Dinkes PP & KB	
						Pertemuan tim AMP (Tim AMP Kabupaten)	Jumlah konklusi hasil rapat terkait kesehatan ibu bersalin	konklus i	1	1	1	Dinkes PP & KB	
						AMP Internal (Sasaran : Puskesmas yang mempunyai Kasus)	Jumlah rekomendasi kasus kesehatan ibu bersalin	kasus	4	4	4	Dinkes PP & KB	
						Pembelajaran Petugas AMP (Sasaran : 3 orang (Dokter, Bidan Puskesmas, Bidan Desa) di 25 Puskesmas)	Jumlah nakes laki-laki dan perempuan mendapatkan materi AMP pembelajaran	orang	75	75	75	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Penemuan kasus kematian Wanita Usia Subur/WUS, ibu dan bayi serta pelaksanaan autopsy verbal	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	
							Peningkatan kapasitas dokter dalam pelayanan KIA dengan metode Blended Learning	jumlah puskesmas menerapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan standard	Puskesmas	4	4	4	Dinkes PP & KB	
							Peningkatan kapasitas bidan dalam pelayanan KIA dengan metode Blended Learning	jumlah puskesmas menerapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan standard	Puskesmas	8	8	9	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							In House Training Kasus Maternal (OJT Tatalaksana Penyebab Kematian Ibu dan Bayi terbanyak bagi Bidan)	jumlah puskesmas menerapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan standard	Puskesmas	3	3	3	Dinkes PP & KB	
							Peningkatan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Sisrute Dan PSC 119 Dalam Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang menyusun dokumen laporan	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	
							OJT USG Obstetri Dasar Terbatas bagi Dokter	Jumlah dokter peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti OJT	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Seminar Strategi Penurunan AKI-AKB	Jumlah nakes laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi lokakarya	orang	75	75	75	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pendampingan Puskesmas Dalam Pelayanan Neonatal	Jumlah nakes laki-laki dan perempuan dari Puskesmas yang dilakukan pendampingan dalam pelayanan Neonatal	orang	150	150	150	Dinkes PP & KB	
							Penguatan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan bayi baru Lahir	Jumlah Puskesmas yang dilakukan sufas	Puskesmas	5	5	5	Dinkes PP & KB	
							Orientasi MTBM/MTBS S bagi Nakes	Jumlah Bidan yang dilakukan Orientasi MTBM/MTBS	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Pelacakan dan pendampingan kasus ibu dan bayi dengan faktor risiko dan komplikasi	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Monev terpadu program kesga dan gizi (10 Puskesmas Lokus AKI)	Jumlah puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi program kesga dan gizi	Puskesmas	10	10	10	Dinkes PP & KB	
							Evaluasi pelaksanaan MTBS/MTBM dan SDIDTK (Sasaran : 25 Puskesmas)	Jumlah petugas laki-laki dan perempuan yang melakukan evaluasi pelaksanaan MTBS/MTBM dan SDIDTK	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	
							Orientasi kelas ibu balita	Jumlah nakes dari puskesmas yang terorientasi dan melaksanakan kelas ibu balita	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	
							Orientasi SDIDTK bagi petugas kesehatan	Jumlah nakes dari puskesmas yang terorientasi dan melaksanakan Orientasi SDIDTK	orang	75	75	75	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Seminar Kesehatan Balita	Jumlah petugas kesehatan laki-laki dan perempuan yang melakukan seminar kesehatan balita	orang	100	100	100	Dinkes PP & KB	
							Konseling /edukasi gizi seimbang	Persentase pelayanan kesehatan balita	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	
						5.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Model Sekolah/Madrasah Sehat	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang model sekolah/madrasah sehat	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Pengelola Program UKS (Sasaran : Pengelola Program UKS Puskesmas)	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang pertemuan pengelola program UKS	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Sektap UKS	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Sektap UKS	orang	15	15	15	Dinkes PP & KB	
							Monitoring dan Evaluasi Model Sekolah/Madrasah Sehat	jumlah petugas laki laki dan perempuan yang melakukan monitoring dan evaluasi model sekolah/madrasah sehat	orang	5	5	5	Dinkes PP & KB	
							Rapat Koordinasi Tim Faskab Sekolah/Madrasah Sehat	jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang sekolah/madrasah sehat	orang	10	10	10	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengawasan minum TTD dan Pelaksanaan UKS (pemeriksaan Kesehatan, TTD rematri, edukasi gizi seimbang, edukasi Kesehatan reproduksi, lingkungan sehat)	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	
						6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pertemuan validasi data ptm	• Jumlah petugas yang melakukan evaluasi data program ptm sebanyak 50 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	Orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam rangka validasi data program ptm yang menghadirkan peserta dari pemegang program ptm dan pengelola data puskesmas yang terdiri dari perempuan dan laki-laki

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pertemuan evaluasi program PTM	• Jumlah petugas yang melakukan evaluasi program ptm sebanyak 50 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	Orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam rangka evaluasi capaian dan hasil kinerja program ptm dimana peserta dari pemegang program ptm dan pengelola data yang terdiri dari perempuan dan laki-laki

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							workshop refresh sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM)	• Jumlah peserta yang mengikuti workshop refresh SIPTM sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	Orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	workshop dalam rangka refresh pengetahuan mengenai cara pengisian dan mengaplikasikan sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM) yang menghadirkan peserta dari pemegang program ptm dan lintas jejaring dari klinik . Peserta diikuti oleh laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penguatan pelaksanaan program PANDU PTM di puskesmas	• Jumlah peserta yang mengikuti penguatan pelaksanaan program pandu ptm sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	Orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam rangka penguatan tentang pelaksanaan program Pandu PTM di Puskesmas bagi pemegang program ptm dan dokter atau perawat puskesmas . Peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan .

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Deteksi Dini PTM dan penyuluhan faktor resiko PTM (GERDU PAS) GERAKAN TERPADU DETEKSI DINI PEMERIKSAAN USIA PRODUKTIF	• Jumlah peserta yang melaksanakan pemeriksaan deteksi dini faktor risiko PTM sebanyak 150 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	Orang	150	150	150	Dinkes PP & KB	pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular bagi ASN Dinkes PP & KB dan di lingkungan pemerintahan Kab. Lumajang. Pemeriksaan dilakukan 10 kali dalam 1 tahun.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Koordinasi dan Advokasi penggunaan dana desa untuk Posbindu	• Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi dan advokasi sebanyak 60 orang (25% Perempuan dan 75% Laki-laki)	Orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	pertemuan koordinasi dan advokasi dalam penggunaan dana desa untuk dialokasikan dalam kebutuhan pelaksanaan posbindu di Desa. peserta dari kepala desa dan lintas sektor di pemerintahan Kab. Lumajang. Dimana peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut Seminar kesehatan dalam rangka peringatan HALUN	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Seminar kesehatan dalam rangka peringatan HALUN	orang	55	60	80	Dinkes PP & KB	
						Orientasi penggunaan panduan praktis CAREGIVER informal pada perawatan jangka panjang bagi lansia pada petugas kesehatan	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Orientasi penggunaan panduan praktis CAREGIVER informal pada perawatan jangka panjang bagi lansia pada petugas kesehatan	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Orientasi Penggunaan P3G pada Pelayanan kesehatan lansia	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Orientasi Penggunaan P3G pada Pelayanan kesehatan lansia	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Rapat Koordinasi pengelola program lansia	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rapat Koordinasi pengelola program lansia	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Refresh kader lansia	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Refresh kader lansia	orang	55	75	80	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Monitoring Evaluasi pelaksanaan caregiver PJP bagi lansia di puskesmas	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang Monitoring Evaluasi pelaksanaan caregiver PJP bagi lansia di puskesmas	orang	3	3	5	Dinkes PP & KB	
							Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	
						8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Workshop strategi penanganan masalah preventif pada Hipertensi	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam Workshop strategi penanganan masalah preventif pada Hipertensi bagi pemegang program dan tenaga kesehatan Puskesmas .Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki
							Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas.	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Koordinasi dan penguatan program pada kasus hipertensi	• Jumlah peserta Koordinasi dan penguatan program pada kasus hipertensi sebanyak 50 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam rangka koordinasi dan penguatan program pada kasus-kasus hipertensi bagi pemegang program dan lintas sektor. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki
						9. Pengelolaan pelayanan Penderita Diabetes Militus							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Bimtek penalaksanaan Gizi pada penderita Diabetes melitus	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam Bimtek penalaksanaan Gizi pada penderita Diabetes melitus bagi pemegang program dan tenaga kesehatan Puskesmas. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki
							Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di wilayah kerja puskesmas	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Koordinasi dan penguatan program pada kasus diabetes	• Jumlah peserta Koordinasi dan penguatan program pada kasus diabetes sebanyak 50 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan dalam rangka koordinasi dan penguatan program pada kasus-diabetes bagi pemegang program dan lintas sektor. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki
						10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait kesehatan jiwa berat	• Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait kesehatan jiwa berat sebanyak 60 orang (25% Perempuan dan 75% Laki-laki)	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan Advokasi dan koordinasi lintas sektor terkait kesehatan jiwa berat bagi lintas sektor. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka penanganan masalah jiwa berat dan masalah pasung

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penguatan penanganan masalah kesehatan jiwa berat bagi kader kesehatan jiwa	• Jumlah peserta Penguatan penanganan masalah kesehatan jiwa berat bagi kader kesehatan jiwa sebanyak 50 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	pertemuan Penguatan penanganan masalah kesehatan jiwa berat bagi kader kesehatan jiwa dalam rangka deteksi dini dan pendampingan untuk masalah jiwa berat. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki.
							Monev posyandu jiwa	Jumlah kegiatan Monev posyandu jiwa sejumlah 12 lokasi yang tersebar di 25 Puskesmas	kegiatan	12	20	25	Dinkes PP & KB	monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan posyandu di wilayah puskesmas di mana peserta merupakan ODGJ baik perempuan maupun

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														laki-laki.
							Pendampingan ODGJ Berat	Jumlah kegiatan pendampingan bagi ODGJ berat ataupun pasung dengan sasaran 22 ODGJ yang ada di wilayah 25 puskesmas	kali	22	22	22	Dinkes PP & KB	kegiatan pendampingan ODGJ berat ataupun pasung yang membutuhkan pendampingan dalam perawatan maupun pengobatan dengan sasaran 22 ODGJ berat baik laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANG AN	
					11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rapat Koordinasi Petugas Program Faskes	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (54.8% laki-laki, dan 45.2% perempuan) yang dilaksanakan 4 kali dengan responsif gender	Orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Evaluasi dan Validasi Data yang diselenggarakan akan mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan. Adapun nama aktivitas disesuaikan lagi berdasarkan desk dengan kementerian kesehatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Cetak Form TB	Jumlah Form TB yang di cetak : - Buku TB UPK (60 buku) - TB 01 (1995 lbr) - TB 02 (1995 lbr) - TB 04 (80 buku) - TB 05 (250 buku) - TB 06 (80 buku)	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	Form TB yang dicetak sesuai dengan standart, dapat di gunakan oleh laki-laki dan perempuan , namun belum disediakan form khusus untuk disabilitas (tunanetra)
							Penguatan TB Lintas Sektor	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (54.8% laki-laki, dan 45.2% perempuan) yang dilaksanakan 1 kali dengan responsif gender	Orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan penguatan TB Lintas Sektor diselenggarakan dengan mengacu pada responsif gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pertemuan Koordinasi Manajemen Program TB	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 61 orang (54.8% laki-laki, dan 45.2% perempuan) yang dilaksanakan 1 kali dengan responsif gender	Orang	61	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan penguatan TB Lintas Sektor diselenggarakan dengan mengacu pada responsif gender
					12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rakor Petugas Program	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (43.75% laki-laki, dan 56.25% perempuan) yang dilaksanakan 1 kali dengan responsif gender	Orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Rakor Petugas Program tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan Sosialisasi HIV Lintas Sektor yang diselenggarakan mengkomodifikasi kepentingan laki-laki dan perempuan. nama aktivitas disesuaikan lagi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														berdasarkan desk dengan kementerian kesehatan
							Deteksi dini kasus HIV/AIDS dan Hepatitis pada Ibu hamil dan kelompok berisiko	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Dinkes PP & KB		
							Belanja APD untuk covid-19	jumlah belanja BMHP untuk penerima 25 puskesmas	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pemberian alokasi BMHP untuk penanganan kasus covid yang dilakukan oleh puskesmas . Terdiri dari hand sanitizer dan masker

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengiriman sampel covid-19	persentase pengiriman sampel covid-19 di kabupaten lumajang, melibatkan petugas dari dinas kesehatan lumajang (100% laki-laki)	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pengiriman sampel covid-19 sebagai bagian dari penanganan kasus covid-19 di kabupaten lumajang, dari Dinkes PP & KB lumajang ke BBTCL surabaya
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengiriman sampel penunjang diagnosa penyakit akibat bencana	persentase pengiriman sampel di kabupaten lumajang, melibatkan petugas dari dinas kesehatan lumajang (100% laki-laki)	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pengiriman sampel sebagai bagian dari penanganan penyakit akibat bencana di kabupaten lumajang, yang dialami oleh masyarakat terdampak (laki,perempuan,termasuk disabilitas, anak-anak dan lansia)
							Pelayanan dukungan operasional vaksinasi	persentase tercukupinya operasional vaksinasi	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan vaksinasi pada masyarakat terdampak (laki,perempuan,termasuk disabilitas, anak-anak dan lansia)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Penyediaan logistik kesehatan bencana (BHP, obat, vaksin)	persentase penyediaan logistik kesehatan di daerah terdampak bencana	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	penyediaan logistik secara merata pada masyarakat terdampak (laki, perempuan, terasuk disabilitas, anak-anak dan lansia)
							Penyediaan peralatan gadar bencana	persentase penyediaan peralatan gadar yang memadai di daerah terdampak bencana	persen	80	85	90	Dinkes PP & KB	
							Rapat koordinasi penanganan bencana	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi tentang kebencanaan	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rapat Penyusunan Perbup Juknis Strakom	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rapat Penyusunan Perbup Juknis Strakom	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Sosialisasi Perbup Juknis Strakom	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Sosialisasi Perbup Juknis Strakom	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	
							Rapat pembahasan Analisis Data Linsek dan Lintas Program	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rapat pembahasan Analisis Data Linsek dan Lintas Program	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Stunting dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Tim Stunting Kabupaten	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Stunting dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Tim Stunting Kabupaten	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan Kecamatan dan Desa Lokus Stunting	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rapat Koordinasi dan Konsolidasi dengan Kecamatan dan Desa Lokus Stunting	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Stunting dalam rangka : - pembahasan Teknis Monitoring dan Evaluasi Lokus Stunting	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Penanganan Stunting dalam rangka : - pembahasan Teknis Monitoring dan Evaluasi Lokus Stunting	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Rebuk Stunting Kecamatan (Rakor Tim Stunting dalam rangka Perbup terkait peran desa dalam penanggulangan stunting)						Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rembug Stunting tingkat DESA	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rembug Stunting tingkat DESA	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							Rembuk Stunting Kabupaten	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rembuk Stunting Kabupaten	orang	75	75	75	Dinkes PP & KB	
							Pendampingan Tim Kabupaten terhadap Desa Lokus Stunting (Sasaran ; Kecamatan dan Desa Lokus Stunting) Kecamatan : Tekung, Yosowilangun, Candipuro, Pasirian, Tempeh	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pendampingan Tim Kabupaten terhadap Desa Lokus Stunting	orang	5	5	5	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pembinaan Kader Pembangunan Manusia	orang	30	40	50	Dinkes PP & KB	
							Pelatihan motivator ASI pada kader dan masyarakat	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pelatihan motivator ASI pada kader dan masyarakat	orang	20	25	30	Dinkes PP & KB	
							Desiminasi hasil bulan intensifikasi timbang dan vitamin A pada lintas sektor dan lintas program	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Desiminasi hasil bulan intensifikasi timbang dan vitamin A pada lintas sektor dan lintas program	orang	55	60	75	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Orientasi pengukuran antropometri dan penentuan status gizi balita bagi kader posyandu kader KPM dan guru PAUD	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Orientasi pengukuran antropometri dan penentuan status gizi balita bagi kader posyandu kader KPM dan guru PAUD	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							Review Kinerja Tahunan Aksi Integrasi Stunting	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Review Kinerja Tahunan Aksi Integrasi Stunting	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertemuan pembahasan sistem alur rujukan penanganan balita gizi buruk pre dan post perawatan	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pertemuan pembahasan sistem alur rujukan penanganan balita gizi buruk pre dan post perawatan	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita (Sasaran : Pengelola Program Gizi)	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pertemuan Persiapan Bulan Intensifikasi Penimbangan balita	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A (sasaran : Puskesmas Lokus Stunting)	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Monitoring dan Evaluasi Bulan Intensifikasi Timbang dan Vitamin A	orang	3	3	3	Dinkes PP & KB	
							Orientasi Peningkatan Manajemen Laktasi pada Petugas (Sasaran : Pengelola Gizi Puskesmas)	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Orientasi Peningkatan Manajemen Laktasi pada Petugas	orang	30	30	40	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Audit Kasus Gizi (sasaran : Tim Penanggulangan Masalah Gizi Puskesmas)	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pertemuan Audit Kasus Gizi	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rakor Tim Penanggulangan GAKI Kabupaten	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Rakor Tim Penanggulangan GAKI Kabupaten	orang	15	15	20	Dinkes PP & KB	
							Orientasi Pelaporan Program Gizi menggunakan E-PPGBM bagi Petugas PUSKESMAS	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Orientasi Pelaporan Program Gizi menggunakan E-PPGBM bagi Petugas PUSKESMAS	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Seminar dan Pencanaan Tablet Tambah Darah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Remaja Putri	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Seminar dan Pencanaan Tablet Tambah Darah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Anemia Remaja Putri	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	
							Monev Pelaksanaan Pemberian PMT	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang melakukan Monev Pelaksanaan Pemberian PMT	orang	2	3	5	Dinkes PP & KB	
							belanja bahan dan pangan untuk pemberian nutrisi pada balita gizi buruk dan ibu hamil		orang	152 balita, 59 bumil	100 balita 50 bumil	100 balita 50 bumil	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertemuan Evaluasi Program Gizi (4 bulanan) (Sasaran : Pengelola Gizi UKM dan UKP)	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang Pertemuan Evaluasi Program Gizi	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Penimbangan rutin balita; Pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, PAUD, TK; Pelaksanaan bulan penimbangan, bulan vitamin A, pemberian TTD pada rematri dan ibu hamil Pemberdayaan masyarakat, kader, guru, toma, toga, di level kecamatan	Persentase balita stunting tertangani	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Inspeksi Kesling, pemicuan STBM, perilaku kesehatan, Stop BAB Sembarangan Pendataan & pemutakhiran sasaran program kes (KIA, Gizi, kasus penyakit) Pelacakan dan pendampingan penduduk dengan risiko masalah KIA Gizi (pendekatan PIS PK) Edukasi, konseling Pemberian Makan Bayi Anak, ASI Eksklusif, dan Gizi seimbang							

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pemberian Makanan Tambahan bumil KEK dan balita kurus berbahan baku lokal, Vitamin A, TTD ibu hamil dan Rematri, pengawasan minum TTD Peningkatan cakupan pelayanan melalui kunjungan rumah, sweeping balita yang tidak datang ke Posyandu Pembinaan Posyandu, Poskestren, Posyandu Remaja, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya.							
						Pengelolaan pelayanan Kesehatan							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Kerja dan Olahraga								
							Evaluasi Dan Pembinaan K3 Perkantoran (Segar Berdaya)C& Pembinaan K3 Perkantoran	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti evaluasi k3 perkantoran	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	
							Koordinasi Lintas Sektor Terkait Peregangan Di Tempat Kerja	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuro koordinasi lintas sektor	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	
							Workshop Penerapan Strategi Advokasi Penguatan GP2SP Di Perusahaan Formal Bagi Pengelola	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi gp2sp di perusahaan formal'	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Workshop Advokasi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Pos Ukk	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi pengembangan pos ukk	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rakor Program Kesja	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi GP2SP	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Workshop Aplikasi Sipgar & Pengukuran Kebugaran Jasmani Bagi Kader Kesorga Desa	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi sosialisasi SIPGAR	orang	210	210	210	Dinkes PP & KB	
							Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Jasmani Melalui Aplikasi Sipgar Bagi Pengelola Kesorga	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi sosialisasi SIPGAR	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Pengukuran Kebugaran Jasmani Pada Kelompok Instruktur Senam	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti sosialisasi pengukuran kebugaran	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Workshop Pembinaan GP2SP Tingkat Kabupaten	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi GP2SP	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Validasi Laporan Program Kesja Dan Evaluasi Target	terpnuhinya laporan kesja berdasarkan petugas kesorga laki-laki dan perempuan	laporan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Validasi Data Laporan Pengelola Kesorga	terpnuhinya laporan kesorga berdasarkan petugas kesorga laki-laki dan perempuan	laporan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Monev Implementasi K3	terpnuhinya data implemnatasi k3 berdasarkan petugas k3 di puskesmas (laki dan perempuan).	kali	12	12	12	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Monev Konseling Pengukuran Kebugaran	terpnuhinya data konseling pengukuran kebugaran berdasarkan petugas kesorga di puskesmas (laki dan perempuan).	kali	12	12	12	Dinkes PP & KB	
							Instruktur Senam Bkor	Jumlah instruktur senam laki-laki dan perempuan yang menerima honor 12 kali dalam 1 tahun	orang	3	3	3	Dinkes PP & KB	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Dinkes PP & KB	
							Workshop KPSPAM/ HIPPAM	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang memperoleh materi tentang peningkatan kualitas air bersih	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pelatihan Tukang/ Wusan	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi tentang pembuatan jamban sehat dan marketing sanitasi	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	
							Workshop Pendampingan Berkelanjutan Sbs & Intervensi Kesling	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi tentang peningkatan kualitas jamban	orang	45	45	45	Dinkes PP & KB	
							Workshop Percepatan 5 Pilar STBM	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi tentang percepatan 5b Pilar STBM	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							Workshop Peningkatan Kapasitas Petugas Terkait Stbm	jumlah peserta laki-laki 10 orang dan perempuan 15 orang dalam mengikuti peningkatan kapasitas STBM	orang	45	45	45	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Workshop Percepatan Penghapusan Alkes Bermerkuri	jumlah peserta laki-laki 10 orang dan perempuan 15 orang yang mendapatkan materi penghapusan alkes bermerkuri	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	
							Workshop Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Dan Limbah Isoman	jumlah peserta laki-laki 10 orang dan perempuan 15 orang yang mendapatkan materi pengelolaan limbah medis	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	
							Sosialisasi Rpm Dan Penguatan Uji Internal	jumlah peserta laki laki dan perempuan yang mendapatkan materi peningkatan kualitas air dan pemeliharaan air	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							VALIDASI DATA PENGELOLA KESLING	terpenuhinya laporan kesehatan lingkungan berdasarkan petugas (10 orang laki dan 15 orang perempuan).	laporan	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							FASILITASI KOORDINASI LIMBAH FASYANKES	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi pengelolaan limbah medis fasyankes	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							FASILITASI KOORDINASI PENGELOLA KESLING	jumlah peserta laki laki 10 orang dan perempuan 15 orang yang mendapatkan materi pengelola kesling	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							WORKSHOP ORIENTASI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN	jumlah peserta laki laki 10 orang dan perempuan 15 orang yang mendapatkan materi teknik kesling	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							WORKSHOP FASILITASI PENGEMBA NGAN TFU PRIORITAS	jumlah peserta laki laki 10 orang dan perempuan 15 orang yang mendapatkan materi pengembangan TFU prioritas	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	
							WORKSHOP ADVOKASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS AIR MINUM AMAN	jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi peningkatan kualitas air minum aman	orang	45	45	45	Dinkes PP & KB	
							MONEV INSPEKSI TFU	terpenuhinya data TFU prioritas (laki dan perempuan).	TFU	5	5	5	Dinkes PP & KB	
							MONEV DESA STBM	terpenuhinya data desa STBM berkelanjutan (laki dan perempuan).	desa	4	4	4	Dinkes PP & KB	
							MONEV SARANA AIR MINUM	terpnuhinya data sarana air minum berdasarkan pemilik (laki dan perempuan).	sarana air minum	5	5	5	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						MONEV UJI PETIK SAMPEL AIR	terpnuhinya sampel sarana air bersih berdasarkan pemilik (laki dan perempuan).	sampel	5	5	5	Dinkes PP & KB	
						Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan						Dinkes PP & KB	
						Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa Online	jumlah kerjasama dengan media massa cetak	media	3	4	4	Dinkes PP & KB	
						Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa Online	jumlah kerjasama dengan media massa cetak	media	3	4	4	Dinkes PP & KB	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pembayaran tenaga kerja bulanan	jumlah tenaga kesehatan tradisional yang akan di rekrut di 2 Puskesmas Kab. Lumajang	orang	2	3	3	Dinkes PP & KB	jumlah tenaga kesehatan tradisional yang direkrut sebanyak 2 orang, laki-laki (50%) dan perempuan (50%)
							Sosialisasi asuhan mandiri Toga dan Akupresur bagi Pengelola Puskesmas	jumlah pengelola program Yankestrad yang hadir dari 25 Puskesmas yang mendapat materi Asman TOGA & akupresure	orang	0	25	25	Dinkes PP & KB	Peserta diikuti laki-laki (8 org) dan perempuan (17 org) .
							Rapat koordinasi Tim Binwasdal	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti rakor Tim Binwasdal untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kab. Lumajang	orang	0	10	10	Dinkes PP & KB	Rapat koordinasi Tim Binwasdal. Peserta diikuti laki-laki (50%) dan perempuan (50%) .

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Monev pelayanan kesehatan tradisional	jumlah kunjungan ke Faskes, Penyehat tradisional, dan kelompok Asman guna meningkatkan pelayanan kesehatan tradisional	kali	5	30	30	Dinkes PP & KB	jumlah kunjungan ke Faskes, Penyehat tradisional, dan kelompok Asman. 25 Puskesmas (Laki - laki 8 orang, perempuan 17 orang). 1.246 org hatra (921 orang perempuan , 325 orang laki-laki) . 42 Kelompok Asman (90% perempuan dan 10% laki-laki)
							Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi data	jumlah peserta laki-laki dan perempuan dari 25 Puskesmas yang tervalidasi jenis datanya	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	Pertemuan Validasi Data dan Evaluasi data. Peserta diikuti laki-laki (8 org) dan perempuan (17 org) .

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pembinaan Asosiasi Penyehat Tradisional	Jumlah peserta pembinaan dari Asosiasi hatra yang telah terbentuk di Kab. Lumajang, laki-laki dan perempuan dalam pelayanan kesehatan tradisional	orang	0	200	200	Dinkes PP & KB	Pembinaan dilakukan sebanyak 4x dengan jumlah peserta masing-masing pembinaan terdiri dari 50 orang dari 4 Asosiasi hatra (laki-laki 20 orang, perempuan 30 orang) yang telah terbentuk.
							Pembinaan kelompok asman	Jumlah kelompok Asman yang diberikan pembinaan tentang TOGA dan akupresure	kelompok	0	42	50	Dinkes PP & KB	Pembinaan pada 42 Kelompok Asman (90% perempuan dan 10% laki-laki)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertemuan Pelayanan Kesehatan Tradisional	jumlah puskesmas menerapkan pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan standard	orang	25	25	25	Dinkes PP & KB	Peserta Pertemuan pengelola program Yankestrad . Jumlah peserta sebanyak 35 orang (90% perempuan , 10% laki-laki)
							Sosialisasi Rumah Sakit dan Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Integrasi	Jumlah nakes laki-laki dan perempuan yang tersosialisasi Pelayanan Kesehatan Integrasi di Puskesmas dan Rumah Sakit	orang	45	45	45	Dinkes PP & KB	Jumlah peserta sebanyak 45 orang (50% perempuan dan 50% laki-laki)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	pemeriksaan kesehatan haji	persentase Calon Jamaah Haji yang Berangkat dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji sebanyak 100% dengan proporsi 55% perempuan 45% laki-laki	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pemeriksaan kesehatan haji sebanyak 2 kali dalam setahun, meliputi pemeriksaan administrasi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan kebugaran dan vaksinasi meningitis serta influenza, serta mampu memenuhi syarat istitha'ah untuk berangkat ke tanah suci

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penyelidikan epidemiologi kasus KLB	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan penyelidikan dan penanggulangan kasus KLB mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan kasus, hingga pengambilan dan pengiriman sampel yang dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam dan sifatnya insidental
							Honor contact person PD3I	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pemberian apresiasi honorarium kontak person PD3I rumah sakit mulai januari sampai desember

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Honor doktor spesialis pd3i	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pemberian apresiasi honorarium dokter spesialis PD3I yang tercantum dalam SK PD3I mulai januari sampai desember
							Belanja Bahan Uji Sampel	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pembelian jasa untuk pengujian bahan sampel PD3I
							Pengiriman Sampel Kasus PD3I, Penyakit Potensial Wabah dan Keracunan Makanan ke BBLK	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan pengiriman sampel kasus PD3I, penyakit potensial wabah, dan keracunan makanan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Surveilans Kasus KIPI	persentase Kegiatan Surveilans Kasus KIPI yang dilaporkan sebanyak 10 kasus dan dilaksanakan oleh anggota seksi survim (50% laki-laki, dan 50% perempuan)	persen	100%	100%	100%	Dinkes PP & KB	kegiatan Surveilans KIPI mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan kasus, hingga TL lanjut pelaporan kepada komnas KIPI dan sifatnya insidental
							Pengambilan Logistik Kesehatan Haji ke Provinsi	Jumlah pengambilan logistik kesehatan haji ke Provinsi sebanyak 2 kali pengambilan yang dilaksanakan oleh 100% petugas laki-laki.	kali	2	2	2	Dinkes PP & KB	kegiatan perjadi ke Provinsi dalam rangka persiapan pemeriksaan jamaah haji

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengiriman dan Validasi Kartu Kesehatan Haji dan ICV	Jumlah kegiatan pengiriman dan validasi kartu kesehatan haji dan ICV sebanyak 1 kali (100% laki-laki)	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	kegiatan pengiriman dan validasi kartu kesehatan haji dan ICV di asrama haji sukolilo. Petugas yang berangkat adalah petugas laki-laki, karena kegiatan membutuhkan ketangkasan dan fisik yang kuat.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sosialisasi BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela)	Jumlah kegiatan pertemuan sosialisasi BICARA yang diikuti oleh 40 orang koordinator imunisasi puskesmas (75% perempuan, dan 25% laki-laki)	kali	2	2	2	Dinkes PP & KB	sosialisasi penguatan tentang program BICARA (Bulan Imunisasi Campak Rubela) untuk koordinator imunisasi puskesmas . Peserta diikuti laki-laki dan perempuan dalam rangka persiapan kegiatan penyuntikan.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							workshop deteksi dini kasus indera	• Jumlah peserta workshop deteksi dini kasus indera sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	workshop deteksi dini kasus indera bagi pemegang program dan tenaga kesehatan puskesmas . Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka deteksi dini dan pemeriksaan kasus indera di pelayanan puskesmas

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pemantapan program gilut	Jumlah peserta Pemantapan program gilut dengan peserta sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Pemantapan program gilut bagi petugas pemegang program dan tenaga kesehatan di puskesmas. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka peningkatan capaian program kesehatan gilut

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pemantapan program indera	Jumlah peserta Pemantapan program indera dengan peserta sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Pemantapan program indera bagi petugas pemegang program dan tenaga kesehatan di puskesmas. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka peningkatan capaian program kesehatan indera

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rakor Petugas Program Faskes	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (43.75% laki-laki, dan 56.25% perempuan) yang dilaksanakan 4 kali dengan responsif gender	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Rakor Petugas Program Faskes di sempurnakan kembali redaksi nya menjadi Pertemuan Koordinasi Lintas Program P2M. Pertemuan mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengadaan Bahan Kimia Fogging	Jumlah bahan Kimia yang disediakan adalah 116 liter dilaksanakan dalam 1 kali kegiatan dengan responsif gender	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	aktivitas pengadaan bahan kimia fogging digunakan untuk menyediakan bahan baku untuk fogging di Kabupaten Lumajang dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini pada kasus DBD dengan mengkomodir kepentingannya gender.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Monev Program P2PM	Data penyakit menular yang terkumpul berbasis gender sebesar 50%	kasus	11	11	11	Dinkes PP & KB	Data Penyakit menular pada aktivitas monev P2PM terdiri dari TB, Kusta, Malaria, DBD, GHBR, Leptospirosis, Kecacingan, Hepatitis, Diare ISPA, dan HIV
							Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Menular	Presentase jumlah kasus yang di PE < 24 jam	%	100	100	100	Dinkes PP & KB	kasus penyakit menular yang dilakukan PE adalah kasus dengan Penyakit Menular dengan responif gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pemantauan PSN Puskesmas	Presentase angka bebas jentik (ABJ) dari jumlah total rumah yang diperiksa di lokasi PSN	%	95	95	95	Dinkes PP & KB	Jumlah kegiatan di lapangan untuk pemantauan PSN dengan responsif gender
							Penguatan Program PPIA Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (54.8% laki-laki, dan 45.2% perempuan) yang dilaksanakan 1 kali dengan responsif gender	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	Pertemuan Penguatan Program PPIA (Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak) di Kabupaten Lumajang diselenggarakan dengan mengacu pada responsif gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Bimtek Pelaporan Program DBD	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (54.8% laki-laki, dan 45.2% perempuan) yang dilaksanakan 1 kali dengan responsif gender	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	Pertemuan Bimtek Pelaporan Program DBD diselenggarakan dengan mengacu pada responsif gender
							Pertemuan Lintas Sektor Program Zoonosis	Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 orang (54.8% laki-laki, dan 45.2% perempuan) yang dilaksanakan 1 kali dengan responsif gender	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	Pertemuan Lintas Sektor Program Zoonosis diselenggarakan dengan mengacu pada responsif gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat Koordinasi Penanggulangan Kasus KLB	jumlah kegiatan koordiasi terkait penanggulangan kasus KLB yang diikuti oleh 50 orang (50% laki-laki dan 50% perempuan)	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	kegiatan penguatan koordinasi terkait penaggulan gan kasus KLB yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. peserta diikuti oleh laki-laki dan perempuan dalam rangka penguatan teknis pelaksanaan
							Rapat Evaluasi Capaian Kasus KLB	Jumlah kegiatan evaluasi terkait capaian kasus KLB yang telah dilakukan di tahun 2022 (50% laki-laki, dan 50% perempuan)	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	kegiatan evaluasi penaggulan gan kasus KLB yang akan dilaksanakan selama tahun 2022. peserta diikuti oleh laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Sosialisasi Surveilans Berbasis Masyarakat	jumlah kegiatan sosialisasi surveilans berbasis masyarakat yang diikuti oleh kader wilayah desa dan puskesmas (90% perempuan, dan 10% laki-laki)	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	kegiatan sosialisasi surveilans berbasis masyarakat membahas tentang isue terkait wabah penyakit yang menjadi trend dimasyarakat serta cara penanggulangannya.
							Monev program surveilans dan imunisasi	jumlah kegiatan monev surveilans dan imunisasi dengan sasaran 25 Puskesmas	kali	12	12	12	Dinkes PP & KB	kegiatan pembinaan dan pendampingan program surveilans dan imunisasi yang dilakukan sebanyak 12 kali setahun dengan sasaran 25 puskesmas

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Surveilans Aktif Rumah Sakit Penyakit Berpotensi KLB	jumlah kegiatan monev surveilans yang melibatkan rumah sakit pemerintah dan swasta	kali	12	12	12	Dinkes PP & KB	kegiatan berupa pemantauan dan pembinaan surveilans ke rumah sakit pemerintah dan swasta
							Bimtek program UBM bagi petugas kesehatan	Jumlah peserta Bimtek program UBM bagi petugas kesehatan dengan peserta sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Bimtek program UBM bagi petugas kesehatan bagi pemegang program dan tenaga kesehatan puskesmas. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka pembentukan layanan UBM di Puskesmas.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Monev penerapan KTR di 7 kawasan						Dinkes PP & KB	
							Sosialisasi penerapan Perbub KTR	Jumlah peserta Sosialisasi penerapan Perbub KTR dengan peserta sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Sosialisasi penerapan Perbub KTR bagi lintas sektor. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka percepatan penerapan Perbup KTR di Kab. Lumajang

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Koordinasi dan Penguatan Program kasus Penyakit tidak menular	• Jumlah peserta Koordinasi dan Penguatan Program kasus Penyakit tidak menular sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	pertemuan Koordinasi dan Penguatan Program kasus Penyakit tidak menular bagi pemegang program dan lintas sektor. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangka peningkatan capaian program PTM

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Rapat koordinasi pengawas KTR	• Jumlah peserta Rapat koordinasi pengawas KTR sebanyak 60 orang (50% Perempuan dan 50% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	pertemuan Rapat koordinasi pengawas KTR bagi tim pengawas KTR di Kab. Lumajang dalam rangka penguatan kinerja dalam penerapan perbup KTR. Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Workshop deteksi dini pada kasus iva	Jumlah peserta Workshop deteksi dini pada kasus iva dengan peserta sebanyak 60 orang (75% Perempuan dan 25% Laki-laki)	orang	60	60	60	Dinkes PP & KB	Pertemuan Workshop deteksi dini pada kasus iva bagi pemegang program dan tenaga kesehatan puskesmas . Peserta terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam rangkapaningkatan layanan kasus iva di Puskesmas .
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Monev verifikasi klaim JKN	Jumlah pertemuan monitoring verifikasi klaim JKN sesuai pedoman	Pertemuan	12	12	12	Dinkes PP & KB	
							Monev verifikasi klaim JKN insidental	Jumlah monitoring ke Faskes yg mengajukan klaim JKN	kali	13	13	13	Dinkes PP & KB	
							HR PPTK	Jumlah HR PPTK yang terealisasikan	Bulan	12	12	12	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Lembur PNS & Non-PNS	Jumlah hari lembur PNS dan Non PNS yang dilaksanakan	Bulan	12	12	12	Dinkes PP & KB	
							Pembayaran PBI-D	Persentase pembiayaan kesehatan yang tertangani	%	72	72	72	Dinkes PP & KB	
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							Dinkes PP & KB	
							Honor Tim FLS	jumlah tim laki-laki 13 dan perempuan 5 yang mendapatkan honor 4 kali dalam 1 tahun	orang	18	18	18	Dinkes PP & KB	
							ATK Operasional	jumlah ATK yang tersedia dalam 1 tahun	kali	0	2	2	Dinkes PP & KB	
							Rakor Tim FLS Kabupaten	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang mengikuti rakor FLS	orang	0	30	30	Dinkes PP & KB	
							Sosialisasi Regulasi KKS 2022 Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang mengikuti sosialisasi regulasi KKS	orang	0	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Workshop FKDS	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang mengikuti workshop FKDS	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	
							Seminar KKS dengan lintas sektor terkait	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang mengikuti seminar KKS	orang	0	30	30	Dinkes PP & KB	
							Rakor Verifikasi Provinsi (bedah dokumen, audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi)	terpenuhinya data penilaian kabupaten sehat	lapoaran	0	8	8	Dinkes PP & KB	
							Validasi Data FLS	terpenuhinya data penilaian kabupaten sehat	lapoaran	0	8	8	Dinkes PP & KB	
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit							Dinkes PP & KB	
								persentase pengadaan bahan dan jasa kelengkapan operasional rumah sakit	%				Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		79	80	80	Dinkes PP & KB		
							Pengadaan bahan Bakar dan Pelumas		48	50	50	Dinkes PP & KB		
							Pengadaan jasa uji Laboratorium		74	80	80	Dinkes PP & KB		
							Pengadaan Jasa Pengolahan Sampah		100	100	100	Dinkes PP & KB		
							Pengadaan Pengolahan Air Limbah		64	70	70	Dinkes PP & KB		
												Dinkes PP & KB		
							Pelayanan vaksinasi	persentase peserta vaksinasi yang dilayani	%	80%	80%	80%	Dinkes PP & KB	peserta vaksinasi yang dilayani mencakup laki-laki dan perempuan, dan lansia yang memenuhi syarat untuk menerima vaksin

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
													Dinkes PP & KB	
													Dinkes PP & KB	
						Operasional Pelayanan Puskesmas							Dinkes PP & KB	
						Pemenuhan operasional Puskesmas	persentase pemenuhan operasional puskesmas	persen	82	83	83		Dinkes PP & KB	
						pelayanan dukungan operasional vaksinasi	Persentase fasilitas operasional vaksinasi di fasyankes	persen	100	100	100		Dinkes PP & KB	
						penyediaan insentif vaksinator	persentase terpenuhinya insentif bagi vaksinator	persen	100	100	100		Dinkes PP & KB	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pembangunan pagar dan Paving	persentase tercukupinya operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun, yang responsif gender	fasilitas	0	0	100	Dinkes PP & KB	bangunan yang mengakomodir kepentingan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Contohnya tersedia WC laki-laki dan perempuan, Ruang Laktasi, Kursi roda. Papan rambatan untuk disabilitas

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Ruangan BSL 2	persentase tercukupinya operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun, yang responsif gender	fasilitas	0	0	100	Dinkes PP & KB	bangunan yang mengakomodir kepentingan laki-laki, perempuan, dan disabilitas. Contohnya tersedia WC laki-laki dan perempuan, Ruang Laktasi, Kursi roda. Papan rambatan untuk disabilitas
							Instalasi air bersih (sumur bor)	persentase tercukupinya sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan	persen	100	0	0	Dinkes PP & KB	
						PCR	Dinkes PP & KB							
						AAS	Dinkes PP & KB							
						Chemistri Autoanalyser	Dinkes PP & KB							

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pembinaan Mutu dan Akreditasi	Laporan Perbaikan Mutu Akreditasi di seluruh Puskesmas	Laporan	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Rakor persiapan PKP	Jumlah Pertemuan koordinasi Pedoman PKP dengan lintas bidang dan pengelola PKP	Pertemuan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Monev PKP	Jumlah monitoring Pelaksanaan PKP sesuai pedoman di seluruh Puskesmas	kali	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Valdat SP2TP	Data SP2TP seluruh Puskesmas tervalidasi	data	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Koordinasi Teknis Terintegrasi PIS-PK	Jumlah pertemuan koordinasi terintegrasi antara lintas sektor, lintas bidang dan Puskesmas	Pertemuan	3	3	3	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat kabupaten	Jumlah pertemuan koordinasi terintegrasi antara lintas bidang di Dinkes PP & KB	Pertemuan	4	4	4	Dinkes PP & KB	
							Verlap PIS-PK	Jumlah monitoring Pelaksanaan PIS-PK sesuai pedoman di seluruh Puskesmas	kali	25	25	25	Dinkes PP & KB	
							Penyelenggaraan Dokter Muter	Jumlah monitoring Pelaksanaan Dokter Muter sesuai pedoman di seluruh Puskesmas	kali	25	25	25	Dinkes PP & KB	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							Dinkes PP & KB	
							Upah Tenaga Kontrak Petugas PSC 119	Upah tenaga kontrak call center PSC 119	ORANG BULAN	72	108	108	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Software PSC 119	Peeliharaan aplikasi Komunikasi Gawat Darurat PSC 119 berbasis internet	KEGIATAN	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Radiomedik PSC 119	Pemeliharaan perangkat Radio Medik Gawat Darurat dan RPU Radio medik	KEGIATAN	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Ambulan PSC 119	Pemeliharaan kendaraan Roda 4 Ambulans PSC 119	KEGIATAN	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Pengadaan Jasa Pemeliharaan Sepeda Motor Roda 2 PSC 119	Pemeliharaan kendaraan Roda 2 Ambulans PSC 119	KEGIATAN	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Penyelenggaraan Rujukan PSC 119	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyelenggaraan layanan ambulans gawat darurat	orang kali	80	120	120	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Penyelenggaraan P3K Lintas Bidang & Lintas Instansi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyelenggaraan Petugas Siaga kegiatan yang diselenggarakan lintas bidang dan lintas sektor yang beresiko menimbulkan kegawat darurat	orang kali	0	72	90	Dinkes PP & KB	
							Penyelenggaraan P3K Lebaran & Nataru	Lembur Penyelenggaraan Petugas Siaga kegiatan Pos Pengamanan di masa Libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru yang beresiko menimbulkan kegawat darurat	ORANG JAM	960	960	960	Dinkes PP & KB	
							Rapat Koordinasi Kegawatdaruratan	Penyelenggaraan pertemuan koordinasi dalam penanggulangan kegawat darurat di lingkungan Dinas Kesehatan	KEGIATAN	3	3	3	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengadaan Rig dual VHF PSC 119	Pembelian perangkat RIG Komunikasi Radio Medik	PAKET	0	1	1	Dinkes PP & KB	
							Pengadaan HT PSC 119	Pembelian perangkat HT Komunikasi Radio Medik	BH	0	10	0	Dinkes PP & KB	
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								Dinkes PP & KB	
						Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							Dinkes PP & KB	
							Penyusunan dokumen Profil Kesehatan	jumlah dokumen profil kesehatan dengan data yang terpilah	dokumen	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Penyusunan dokumen SPM	jumlah dokumen SPM dengan data yang terpilah	dokumen	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	persentase pemeliharaan komputer, peralatan dan jaringannya	%	96	96	98	Dinkes PP & KB	pemeliharaan komputer, peralatan dan jaringannya

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
									62	65	67			
							Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer			62	65	67	Dinkes PP & KB	a untuk mendukung kinerja SDM
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							Dinkes PP & KB	
						Monev pelaksanaan simpul	Jumlah monitoring Pelaksanaan simpul di seluruh Puskesmas	kali	25	25	25		Dinkes PP & KB	
						Rapat koordinasi simpul	jumlah peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti koordinasi simpul	orang	25	25	25		Dinkes PP & KB	
						Rapat evaluasi simpul	jumlah peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti evaluasi simpul	orang	25	25	25		Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pengembangan SIMRS e logistik	persentase pengembangan SIM RS	jumlah jenis SIMRS yang dikembangkan	1	1	1	Dinkes PP & KB	pengembangan SIM RS sebagai pendukung pengelolaan dan pengintegrasian informasi kesehatan rumah sakit
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								Dinkes PP & KB	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertimbangan Teknis Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	BA Perizinan	laporan	12	12	12	Dinkes PP & KB	lokasi di Dinkes PP & KB, Tim Perizinan Fasyankes SK Bupati
							Rakor Pembinaan Izin Operasional Fasyankes	Jumlah Pertemuan koordinasi pembinaan izin operasional sesuai Pedoman PKR	pertemuan	2	2	2	Dinkes PP & KB	
							Pra Visitasi dan Visitasi Fasyankes	persentase faskes berrizin di kab. Lumajang	persentase	100	100	100	Dinkes PP & KB	faskes memiliki legal izin operasional
							Koordinasi dan Evaluasi teknis PKR	Jumlah Pertemuan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKR	pertemuan	5	5	5	Dinkes PP & KB	
							Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rakor Kesehatan Rujukan	Jumlah Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor	pertemuan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Monev Sistem Rujukan FKTP dan FKRTL	Jumlah monitoring Pelaksanaan sistem rujukan	kali	26	30	32	Dinkes PP & KB	
							Validasi Data Standart Layanan Fasyankes Rujukan	persentase data laporan tahunan dan RS Online seluruh Faskes tervalidasi	persentase	100	100	100	Dinkes PP & KB	kegiatan dimaksudkan agar tidak terjadi review kelas RS oleh Kemenkes dan BPJS
							Workshop Pemanfaatan Rekam Medik Elektronik Digitalisasi	Jumlah pertemuan penguatan smart hospital 4.0	pertemuan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pemantauan dan Evaluasi Mutu Akreditasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	Laporan Mutu dan Kesiapan RS	laporan	7	8	9	Dinkes PP & KB	lokasi di Dinkes PP & KB, Tim Mutu FKRTL SK Bupati
							Workshop Manajemen Rawat Inap	Jumlah pertemuan manajemen unit layanan penunjang rujukan	pertemuan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Workshop PPI lanjutan	Jumlah pertemuan update kompetensi petugas PKR	pertemuan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
							Workshop Peningkatan Mutu Fasyankes	Jumlah pertemuan fasilitasi kompetensi fasyankes rujukan	pertemuan	1	2	2	Dinkes PP & KB	
							Lokakarya Mutu dan Akreditasi Faskes Rujukan	Jumlah pertemuan pemantauan mutu dan akreditasi PKR	pertemuan	1	2	3	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Workshop Mutu Perizinan	Jumlah pertemuan peningkatan layanan perizinan	pertemuan	1	1	1	Dinkes PP & KB	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									Dinkes PP & KB	
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota								Dinkes PP & KB	
					Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								Dinkes PP & KB	
							Monitoring praktik tenaga kesehatan	Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dimonitoring	Perijinan nakes	100	100	100	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat koordinasi perijinan	Organisasi profesi yang hadir memberikan dukungan terkait perijinan tenaga kesehatan	Persentase	100	100	100	Dinkes PP & KB	
						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							Dinkes PP & KB	
						Pertemuan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah perijinan tenaga kesehatan yang dibina, diawasi dan dievaluasi tindak lanjutnya	Perijinan nakes	100	100	100	Dinkes PP & KB		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota							Dinkes PP & KB	
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							Dinkes PP & KB	
						Pertemuan Data SDMK	Updating data SISDMK	Fasyankes	68	68	68	Dinkes PP & KB	
						Penyusunan dokumen renbut	Jumlah dokumen renbut fasyankes	Dokumen	30	30	30	Dinkes PP & KB	
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Gaji dokter umum dan perawat ponkesdes	Jumlah dokter umum yang diberi honor	Dokter	6	6	6	Dinkes PP & KB	
								Jumlah perawat yang diberi honor	Perawat	127	127	127	Dinkes PP & KB	
							Pemberian insentif non ASN	127 perawat					Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Internsip	Persentase peserta PIDIlulus	Persentase	100	100	100	Dinkes PP & KB	
							Pemberian insentif non ASN						Dinkes PP & KB	
							Pemberian insentif non ASN						Dinkes PP & KB	
							pembayaran gaji sumber daya manusia di puskesmas						Dinkes PP & KB	
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pengelolaan jabatan fungsional kesehatan	Jumlah DUPAK yang dinilai	Berkas	250	270	300	Dinkes PP & KB	
							Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Rakor	Orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								Dinkes PP & KB	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Persentase peserta ukom lulus	Persentase	100	100	100	Dinkes PP & KB	
							Penyelenggaraan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas	Persentase nakes yang mengikuti kredensial di puskesmas	Persentase	10	20	30	Dinkes PP & KB	
							Pelatihan Medis	Jumlah SDM Kesehatan laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan medis dan sejenisnya	orang	100	100	100	Dinkes PP & KB	
							Pelatihan Manajemen/ keuangan/ umum	Jumlah SDM laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan manajemen/ keuangan/ umum dan sejenisnya	orang	100	100	100	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								Dinkes PP & KB	
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								Dinkes PP & KB	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pembinaan pemilik toko alkes/optik	Jumlah toko yang dibina	Toko	25	25	25	Dinkes PP & KB	pembinaan kepada pemilik toko alkes/optik, baik laki-laki, perempuan maupun penyandang disabilitas
							Monev pemilik toko alkes/optik	Jumlah toko yang di monev	Toko	25	25	25	Dinkes PP & KB	monev dimaksudkan untuk memastikan alkes/optik yang dijual telah memiliki ijin edar, dokumen jual beli ada dan jelas sehingga tidak merugikan masyarakat luas
													Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Verifikasi lapangan dalam rangka Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat dan saryanfar	persentase fasyanfar yang memenuhi standar persyaratan perizinan	%	49	51	53	Dinkes PP & KB	Sarana apotek, toko obat dan saryanfar memenuhi persyaratan perizinan sehingga tidak merugikan masyarakat
							Verifikasi lapangan dalam rangka Pengawasan Perizinan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase sarana produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	%	0	0	0	Dinkes PP & KB	Sarana UMOT memenuhi persyaratan sehingga tidak merugikan masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Penyediaan Dan Pengelolaan Data Perizinan Dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional						Dinkes PP & KB	
							visualisasi data optik	buah	1	1	1	Dinkes PP & KB	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Verifikasi lapangan dalam rangka Fasilitasi Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat dan Umot	Persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	100	100	100	Dinkes PP & KB	Sarana apotek, toko obat dan saryanfar memenuhi komitmen peizinan sehingga tidak merugikan masyarakat
					Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						Dinkes PP & KB		
							Pendataan produk PKRT	Jumlah produk PKRT yang didata	Buah	250	250	250	Dinkes PP & KB	pendataan produk PKRT kepada pemilik (baik laki-laki, perempuan maupun penyandang disabilitas <terdapat 1 orang penyandang disabilitas>)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Dinkes PP & KB	
						Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	persentase spp irt yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	40	42	44	Dinkes PP & KB	Penerbitan SPP IRT sesuai ketentuan dan persyaratan sehingga tidak merugikan pelaku usaha

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Rapat Pengkajian ulang sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam Pengkajian ulang sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	orang	15	15	15	Dinkes PP & KB	Pengkajian ulang untuk mencegah sarana tidak memenuhi syarat
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Dinkes PP & KB		
							Workshop TPM	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi hygiene sanitasi makanan di TPM	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Workshop DAM	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mendapatkan materi hygiene sanitasi makanan di DAM	orang	40	40	40	Dinkes PP & KB	
					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								Dinkes PP & KB	
					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							bimtek hygiene sanitasi makanan bagi PKL dan Kantin	Jumlah peserta laki laki dan perempuan yang mengikuti bimtek hygiene sanitasi makanan pada pedagang kaki lima dan kantin	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								Dinkes PP & KB	
						Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Perjalanan dinas TKP2M					Dinkes PP & KB		
							Rapat Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan tkp2m	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan tkp2m	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	Mendapatkan data tindak lanjut pengawasan sarana industri rumah tangga
							Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	persentase pangan irt yang memenuhi syarat	%	65	65	65	Dinkes PP & KB	Sarana produksi IRTP memenuhi syarat sehingga tidak merugikan masyarakat
							Sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga	Jumlah sampel yang di periksa	sampel	34	34	34	Dinkes PP & KB	Pangan produksi IRTP memenuhi syarat sehingga tidak merugikan masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Rapat Linsek Inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam Inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)	orang	15	15	15	Dinkes PP & KB	Mendapatkan data sarana produksi IRTP yang akurat
						Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga							Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Pemutakhiran Data	jumlah frekuensi Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut	kali	1	1	1	Dinkes PP & KB	Mendapatkan data sarana produksi IRTP yang mutakhir
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							Dinkes PP & KB	
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							Dinkes PP & KB	
						Rakor Tim Pokjandal Desi Aktif Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Rakor Tim Pokjandal Desi Aktif Kabupaten Lumajang	orang	0	35	35	Dinkes PP & KB	koordinasi tim pokjandal dalam pengembangan DESI Aktif

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rapat koordinasi tim PHBS tingkat Kabupaten	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Rapat koordinasi tim PHBS tingkat Kabupaten	orang	0	35	35	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Forum Komunikasi Pelaksanaan Germas Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan Forum Komunikasi Pelaksanaan Germas Tingkat Kabupaten	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Forum Kemitraan Germas bersama Lintas Sektor	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan Forum Kemitraan Germas bersama Lintas Sektor	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertemuan Jejaring Komunikasi Ormas dalam Optimalisasi PHBS	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan Jejaring Komunikasi Ormas dalam Optimalisasi PHBS	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	
							Pendampingan Pembudayaan Germas	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pendampingan Pembudayaan Germas	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	
							Petemuan evaluasi pengembangan Desi Aktif	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Petemuan evaluasi pengembangan Desi Aktif	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes Puskesmas	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan Koordinasi Program Desa Siaga bagi Petugas Promkes Puskesmas	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	
							Bimtek Manajemen Pengelolaan Desi aktif Bagi Petugas Puskesmas	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Bimtek Manajemen Pengelolaan Desi aktif Bagi Petugas Puskesmas	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	
							Pertemuan Monev Penerapan SUSI Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan Monev Penerapan SUSI Tingkat Kecamatan	orang	0	35	35	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Monitoring Evaluasi Pelaksana Desa Siaga Aktif Inovatif	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Monitoring Evaluasi Pelaksana Desa Siaga Aktif Inovatif	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	
							Monev PHBS dalam penerapan GERMAS	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Monev PHBS dalam penerapan GERMAS	orang	120	120	120	Dinkes PP & KB	monitoring PHBS di tatanan sekolah melalui penerapan Buku Harian Anak terhebat
							Audiensi/Advokasi Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Audiensi/Advokasi Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Tingkat Kecamatan	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan	orang	0	30	30	Dinkes PP & KB	
							Koordinasi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Koordinasi Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan	orang	30	30	30	Dinkes PP & KB	
							Penggerakan Masyarakat di Tatanan mendukung Kluster Edukasi dan Perilaku Sehat	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Penggerakan Masyarakat di Tatanan mendukung Kluster Edukasi dan Perilaku Sehat	orang	400	400	400	Dinkes PP & KB	kegiatan SDK

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							Dinkes PP & KB	
						Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						Dinkes PP & KB	
						Pertemuan FGD penyelenggaraan GERMAS	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan FGD penyelenggaraan GERMAS	orang	50	50	50	Dinkes PP & KB	forum komunikasi dalam upaya penerapan program promkes dan Germas
						Kampanye Program Kesehatan	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Kampanye Program Kesehatan	orang	360	450	450	Dinkes PP & KB	
						Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Massa Online	jumlah media massa Online yg menjalin kerjasama	media	3	3	3	Dinkes PP & KB	MOU dg media

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Elektronik	media	2	2	2	Dinkes PP & KB	MOU dg media
							Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Konten Media Promosi Kesehatan	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	pemantauan dan evaluasi program promosi kesehatan
							Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Desa/Kelurahan	orang	0	140	140	Dinkes PP & KB	pembinaan Germas dg penguatan strakom

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pendampingan Pemberdayaan Penggerak Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pendampingan Pemberdayaan Penggerak Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Desa/Kelurahan	orang	0	50	50	Dinkes PP & KB	kemitraan dg Ormas dalam upaya pemberdayaan dan penggerak n GERMAS
							Pengembangan dan Penggandaan Media Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah jenis media informasi	media	3	3	3	Dinkes PP & KB	pengadaan media promosi kesehatan
							penyusunan inovasi promosi kesehatan	jumlah Inovasi yang ada	inovasi	1	1	1	Dinkes PP & KB	pembinaan dan stimulasi Inovasi Promosi kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/								Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					Kota								
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Dinkes PP & KB	
						Rakor Pokjandal Posyandu Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Rakor Pokjandal Posyandu Kabupaten Lumajang	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Rakor Linsek Linprog dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Rakor Linsek Linprog dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							Capacity Building Pengelola Program Posyandu Kabupaten Lumajang	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Capacity Building Pengelola Program Posyandu Kabupaten Lumajang	orang	35	50	50	Dinkes PP & KB	
							Advokasi dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Advokasi dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	orang	0	25	25	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Peningkatan Kapasitas Kader (Sistem Informasi Posyandu)	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader (Sistem Informasi Posyandu)	orang	35	150	150	Dinkes PP & KB	
							Peningkatan Kapasitas Kader (Sistem Informasi Posyandu)	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader (Sistem Informasi Posyandu)	orang	35	35	35	Dinkes PP & KB	
							Rapat Kerja Mabisaka	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Rapat Kerja Mabisaka	orang	0	20	20	Dinkes PP & KB	
							Rapat Kerja Pimsaka SBH	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Rapat Kerja Pimsaka SBH	orang	20	20	20	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pertemuan Sinergi Pengembangan Sbh Promkes Dan Pamong /Kwaran	Jumlah peserta laki-laki dan perempuan yang mengikuti Pertemuan Sinergi Pengembangan Sbh Promkes Dan Pamong /Kwaran	orang	35	50	50	Dinkes PP & KB	
							pelayanan pembinaan poskesdes	jumlah Ponkesdes yang dibina	poskesdes	198	198	198	Dinkes PP & KB	
							pelayanan pembinaan posyandu	jumlah Posyandu yang dibina	posyandu	1295	1295	1295	Dinkes PP & KB	
							pelayanan pembinaan poskestren	jumlah Poskestren yang dibina	poskestren	43	43	43	Dinkes PP & KB	
							pelayanan pembinaan pangkalan SBH	jumlah pangkalan SBH yang dibina	pangkalan	25	25	25	Dinkes PP & KB	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
			9. Terkenalnya laju pertumbuhan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Grand design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lumajang (5 Pilar)	Jumlah Dokumen GDPK	Dokumen GDPK	1	1	1	Dinkes PP & KB	Menyajikan data terpilah
						Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) terkait GDPK	Jumlah kegiatan RAKERDA terkait GDPK	Kegiatan	1	1	1	Dinkes PP & KB	menerbitkan 2 regulasi SK dan Perbup terkait Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (Data terpilah)
					Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian dan pelayanan KB	verifikasi dan validasi data	jumlah kegiatan verifikasi dan validasi data	kegiatan	1	1	1	Dinkes PP & KB	membuat papan data terkait dengan GDBK (data terpilah)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Rapat Koordinasi Program KKBPK	Jumlah Lembaga yang bermitra	Lembaga	8	8	8	Dinkes PP & KB	Dilaksanakan 4 kali kegiatan yang di hadiri peserta laki-laki dan perempuan
						Pengendalian Program KKBPK	Rapat Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	Jumlah kegiatan rapat Monitoring dan Evaluasi Program KKBPK	kegiatan	2	2	2	Dinkes PP & KB	Dihadiri Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Mitra laki-laki dan perempuan
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pembinaan Kader PPKBD dan Sub PPKBD	jumlah kegiatan pembinaan kader PPKBD dan Sub PPKBD	Kegiatan	1	1	1	Dinkes PP & KB	dilaksanakan di 21 Kecamatan (kader laki-laki dan perempuan)

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pembinaan Unmet Need [PUS yang belum ber KB]	Jumlah lokasi Pembinaan Unmet Need [PUS yang belum ber KB]	Kecamatan	10	10	10	Dinkes PP & KB	Pelayanan KB untuk perempuan dan laki-laki di 10 Kecamatan (Gucialit, Tempursari, Ranuyoso, Padang, Pronojiwo, Tekung, Rowokangkung, Jatiroto, Sumbersuko, Kunir)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Sosialisasi Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R	Jumlah Sosialisasi Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R	Kegiatan	1	1	1	Dinkes PP & KB	Dihadiri oleh Kepala Desa Laki-Laki dan Perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						Dinkes PP & KB		
						Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang terbentuk	PIK-R	19	19	19	Dinkes PP & KB	peserta terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan	
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan kader BKB	Jumlah Pembinaan Kader Kelompok Tribina yang menjadi binaan	Kader BKB	630	630	630	Dinkes PP & KB	pembinaan Kader BKB (laki-laki dan perempuan) di 21 Kecamatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pembinaan kader BKR	Jumlah Pembinaan Kader Kelompok Tribina yang menjadi binaan	Kader BKR	630	630	630	Dinkes PP & KB	pembinaan Kader BKR (laki-laki dan perempuan) di 21 Kecamatan
							Pembinaan kader BKL	Jumlah Pembinaan Kader Kelompok Tribina yang menjadi binaan	Kader BKL	630	630	630	Dinkes PP & KB	pembinaan Kader BKL (laki-laki dan perempuan) di 21 Kecamatan
							Pembinaan kader UPPKA	Jumlah Pembinaan Kader Kelompok Tribina yang menjadi binaan	Kader UPPKA	630	630	630	Dinkes PP & KB	pembinaan Kader UPPKA (laki-laki dan perempuan) di 21 Kecamatan
							Pembinaan PIK-R	Jumlah Pembinaan Kader Kelompok Tribina yang menjadi binaan	Ketua PIK-R	55	55	55	Dinkes PP & KB	Peserta PIK-R (laki-laki dan perempuan) di 21 Kecamatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKS)	Sosialisasi Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga	Jumlah lokasi Sosialisasi Edukasi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga	Desa Lokus Stunting	19	19	19	Dinkes PP & KB	Ibu dan keluarga (saudara laki-laki dan perempuan)
							Sosialisasi Pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin	Jumlah lokasi kegiatan sosialisasi pemahaman kespro dan stunting bagi calon pengantin	Desa Lokus Stunting	19	19	19	Dinkes PP & KB	Sosialisasi bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan
							Rapat Koordinasi Evaluasi Intervensi BKB terkait stunting	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Intervensi BKB terkait stunting	Kegiatan	1	1	1	Dinkes PP & KB	kegiatan dihidri oleh kader BKB laki-laki dan perempuan
							workshop pengolahan data terkait stunting	Jumlah Kegiatan workshop pengolahan data terkait stunting	Kegiatan	1	1	1	Dinkes PP & KB	kegiatan dihidri oleh kader BKB dan PIK-R laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP PKS)	Edukasi Pengasuhan Remaja pada Anggota BKR Pro PN	Jumlah Anggota BKR yang diedukasi	BKR	64	64	64	Dinkes PP & KB	Edukasi pengasuhan remaja untuk anggota BKR Laki-laki dan perempuan
							Edukasi PUP dan Triad KRR pada PIK-R Pro PN	Jumlah Kegiatan Edukasi PUP dan Triad KRR pada PIK-R Pro PN	Kegiatan	5	5	5	Dinkes PP & KB	Edukasi PUP dan Triad KRR pada PIK-R Pro PN Laki-laki dan perempuan di 21 kecamatan
			3.Meningkatnya ketahanan pangan										Dinas Ketahanan Pangan	11

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	4. Meningkatkan penangan kawasan kumuh	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat PAMSIMAS	Jumlah penduduk yang terlayani infrastruktur Air Minum	RUMAH	3.500	3.500	3.500	DPKP	Pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi derajat kesehatan dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Infrastruktur Air Minum Perdesaan	Jumlah Penambahan SR Kawasan Perdesaan	RUMAH	2.046	2.046	2.046	DPKP	Pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi derajat kesehatan dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	(Optimalisasi Peningkatan SPAM Perdesaan	Jumlah Penambahan SR Kawasan Perdesaan	RUMAH	100	100	100	DPKP	Pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi derajat kesehatan dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor	Jml SPAM Bukan Jaringan perpipaan di kawasan pedesaan yg dibangun	lokasi	2	2	2	DPKP	Pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi derajat kesehatan dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Hibah Air Minum Perdesaan	Jml SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan pedesaan yg diperluas	Sambungan Rumah	1.655	1.655	1.655	DPKP	Pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi derajat kesehatan dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Renovasi Sarana Air Bersih	jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang diperbaiki	paket	1	1	1	DPKP	Pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air minum dapat memenuhi derajat kesehatan dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rapat Koordinasi	Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi	dokumen	1	-	-	DPKP	Rapat koordinsdi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pihak konsultan , dengan bentuk kegiatan berupa pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan rapat koordinasi dengan prosentase laki2 dan perempuan 50% - 50%

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Jml Sarana sistem pengelolaan air limbah domestik yg disediakan	unit	1.650	1.650	1.650	DPKP	Pembangunan infrastruktur air limbah domestik dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air limbah domestik dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah	Jml Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman yg dibangun	unit	8	8	8	dpkp	Pembangunan infrastruktur air limbah domestik dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur air limbah domestik dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Drainase Lingkungan					
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Drainase Lingkungan	Panjang Drainase terbangun	m	3.500	3.500	3.500	dpkp	Pembangunan drainase lingkungan yang aman bagi perempuan, ibu hamil, lansia, anak-anak dan difabel, dengan adanya pembangunan drainase lingkungan dapat mengurangi adanya genangan dan mencegah terjadi banjir

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kegiatan penerbitan PBG dan SLF; Sosialisasi PBG dan SLF	Jumlah rekomendasi teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan jumlah rekomendasi teknis sertifikat laik fungsi (SLF) yg diterbitkan	Rumah ; Rekomtek	1000 ; 5	1000 ; 100	1000 ; 100	DPKP	Kegiatan sosialisasi PBG dan SLF dilakukan dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam pelaksanaannya.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penyusunan Perbup Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Penyusunan Perda Penyerahan PSU	Jml Produk Hukum terkait bangunan gedung	dokumen	2	2	2	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pihak konsultan dan OPD terkait dalam penyusunan Perbup maupun Perda, dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan rapat koordinasi.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Fasilitasi Bantuan PSU Perumahan MBR ; Pemeliharaan PSU Perumahan Aset Pemda	Jml Perumahan yg difasilitasi penyediaan PSUnya	Perumahan	1	2	3	DPKP	Pemeliharaan PSU perumahan dapat meningkatkan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Penerbitan persetujuan Site Plan Perumahan ; Monev Perumahan ; Sosialisasi Peraturan Perumahan	Rekomtek	20	21	22	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pihak pengembang dan Tim Teknis Site Plan Kab. Lumajang dalam penerbitan persetujuan site plan perumahan , dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam kegiatan rapat koordinasi. Kegiatan sosialisasi peraturan perumahan dilakukan dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam pelaksanaannya.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Conveyor dan BOP PISEW	Jumlah infrastruktur terbangun	Bangunan	2	3	4	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pelaksana pada program PISEW dan kegiatan pengadaan conveyor, dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam kegiatan rapat koordinasi.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Pembuatan DED Siteplan Kumuh	Jumlah dokumen rencana tapak(siteplan) dan DED yang disusun	dokumen	1	-	-	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pihak pelaksana dalam pembuatan DED Siteplan Kumuh, dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam kegiatan rapat koordinasi.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	jumlah lokasi permukiman kumuh yg telah dilakukan pembangunan pemugaran/peremajaan	lokasi	6	7	8	DPKP	Pembangunan infrastruktur jalan dan drainase dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur jalan dan drainase dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN ANNANYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan nya di Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Hibah Uang untuk Pembangunan Jalan Lingkungan	Jumlah POKMAS yang diberdayakan	POKMAS	53	60	65	DPKP	Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan infrastruktur infrastruktur jalan lingkungan dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan DED atau Siteplan Relokasi Korban Bencana	Jumlah DED atau Siteplan yang tersusun	Dokumen	1	-	-	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pihak pelaksana dalam pembuatan DED Siteplan Relokasi Korban Bencana, dengan pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan rapat koordinasi.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus dan PSU	jumlah rumah yang terbangun dan panjang PSU rumah khusus yang terbangun	Rumah dan meter	35 Unit	40	45	DPKP	Pembangunan rumah khusus bencana dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan rumah khusus bencana dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM										
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Pengelolaan Kelembagaan Rumah Susun	Jml Lembaga Pengelola Rumah susun yg difasilitasi pengelolaannya	Lembaga	2	-	-	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga pihak pelaksana dalam pengelolaan kelembagaan Rumah Susun, dengan pengaplikasian pengarusutan aman gender dalam setiap kegiatan rapat koordinasi.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Rumah	1.475	1.500	1.500	DPKP	Perbaikan rumah tidak layak huni dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan rumah khusus bencana dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada DaerahKabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan permukiman kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Rumah	150	160	170	DPKP	Perbaikan rumah tidak layak huni dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pemenuhan akses oleh perempuan, lansia, ibu hamil, anak-anak dan disabilitas, serta pembangunan rumah khusus bencana dapat memenuhi derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan yang pro gender

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renja OPD Tahun 2023, Penyusunan Perubahan Renja OPD 2023, dan Penyesuaian Dokumen Perjanjian Kinerja	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	Jenis	2	2	2	DPKP	Rapat koordinasi unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk penyusunan Dokumen Renja dan PK, dengan bentuk kegiatan berupa pengaplikasian pengarusutamaan gender dalam kegiatan rapat koordinasi dengan proporsi laki2 dan perempuan yang setara

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
			5. Meningkatkan kondusivitas wilayah	1. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Rapat Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada Ormas	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan : 200 Organisasi Kemasyarakatan (LSM=45, Agama=17, Budaya=12, Profesi=43, Pemuda=17, Wanita=16, Sosial=28, Yayasan=19)	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BAKESBANGPOL	
							2. Monitoring evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang termonitoring dan terevaluasi	Laporan	10 Kecamatan	15 Kecamatan	21 Kecamatan	BAKESBANGPOL	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				2. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	1. Pelaksanakan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan : Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan mengundang 100 Siswa SMP	Jumlah Siswa siswi yang telah mendapatkan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika	Orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang	BAKESBANGPOL	
						2. Manitoring dan evaluasi pencegahan penyalagunaan Narkotika	1. Manitoring dan evaluasi pencegahan penyalagunaan Narkotika di 11 Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang termonitoring dan terevaluasi dari 21 Kecamatan yang akan difasilitasi 11 Kecamatan	Kecamatan	11 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	BAKESBANGPOL	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
				4. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Sosialisasi Peran Pemilih Pemula dengan mengundang 200 siswa siswa SMA di Kabupaten Lumajang	Jumlah Sekolah yang telah mendapatkan sosialisasi tentang Peran Pemilih Pemula	Orang	200 Siswa Siswi	400 Siswa Siswi	400 Siswa Siswi	BAKESBANGPOL	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
	pemenuhan kenyamanan pengguna fasilitas sub terminal	meningkatkan kenyamanan pengguna sub terminal	6.meningkatnya fasilitas dan pelayanan sub terminal	program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	pengelolaan terminal	Rehabilitasi pemeliharaan terminal (fasiliats utama pendukung) Dinas perhubungan	pembenahan ruang fasilitas Ruang tunggu laki dan perempuan seperti kursi sandar , charger ,fentilasi dan kursi roda	jumlah akses ruang tunggu untuk fasilitas pengguna terminal	fasilitas	1	2	2	DISHUB	
							penambahan toilet umum antara laki2 dan perempuan , serta akses untuk pengguna disabilitas	jumlah kebutuhan fasilitas toilet yang memadai	fasilitas	2	2	2		
							penambahan fasiltas tempat ibadah untuk laki laki dan perempuan	jumlah fasilitas tempat ibadah yang memadai dan nyaman untuk laki laki dan perempuan	fasilitas	1	1	1		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							penambahan fasilitas ruang laktasi untuk kenyamanan ibu menyusui dan bayi	jumlah ruang laktasi yang nyaman untuk ibu menyusui	fasilitas	1	1	1		
	pemenuhan kenyamanan bagi pelajar	meningkatkan kenyamanan pelajar laki-laki dan perempuan pengguna bus angkutan gratis	6.meningkatnya fasilitas bagi pelajar dan pelayanan pengguna bus angkutan pelajar	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota		penambahan jumlah bus sekolah supaya lebih banyak rute yang terlayani	jumlah bus angkutan pelajar	fasilitas	2	2	2		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
			7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olah raga										DISPORA	
			8. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rakor PPRG Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Rakor PPRG	Desa	189	189	189	Dinsos PPPA	Rakor dihadiri oleh Sekretaris Desa
							Desk PPRG Semua OPD	Jumlah OPD yang melaksanakan Desk PPRG	OPD	52	52	52	Dinsos PPPA	Desk Dokumen ARG OPD
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG	Pelatihan PPRG Desa	Jumlah Desa yang mengikuti pelatihan PPRG Desa	Desa	50	50	50	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						termasuk PPRG								
						Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Sosialisasi Perda PUG	Jumlah Sosialisasi Kebijakan kepada Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha	Kegiatan	2	0	0	Dinsos PPPA	Peserta Sosialisasi OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Perempuan berdaya di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mengikuti sosialisasi Perempuan berdaya di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Ormas	27	27	27	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							FGD Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti FGD Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Ormas	27	27	27	Dinsos PPPA	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti Rapat Koordinasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Ormas	11	11	11	Dinsos PPPA	
							Lokakarya PUSPA	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mengikuti Lokakarya PUSPA	Ormas	11	11	11	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pendampingan PUSPA ke Kecamatan Lokus	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Pendampingan PUSPA ke Kecamatan Lokus	Ormas	4	4	4	Dinsos PPPA	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Workshop Pengasuh Lembaga Layanan Perempuan	Jumlah Lembaga yang mengikuti Workshop Pengasuh Lembaga Layanan Perempuan	Lembaga	27	27	27	Dinsos PPPA	
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Bimtek Konseling pada Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimtek Konseling pada Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga	27	27	27	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Desk Data Perempuan terkait pemberdayaan gender	Jumlah fasilitas Desk Data Perempuan terkait pemberdayaan gender	Kecamatan	21	21	21	Dinsos PPPA	
							Sosialisasi kebijakan dan hukum terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah kegiatan Sosialisasi kebijakan dan hukum terkait Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan SK Bupati terkait TPPO	Jumlah Kebijakan terkait SK TPPO	Dokumen	1	0	0	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM										
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Rumah Curhat Tingkat Kecamatan	Jumlah Rumah Curhat tingkat kecamatan yang dibina	Kecamatan	7	7	7	Dinsos PPPA	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Profil Data Gender dan Anak	jumlah kegiatan Penyusunan Profil Data Gender dan Anak	kegiatan	2	2	2	Dinsos PPPA	
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Diseminasi Profil Data Gender dan Anak - Profil Data Gender Sosial	Jumlah kegiatan Diseminasi Profil Data Gender dan Anak	Kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Kabupaten/Kota	- Profil Data Gender Anak							
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokakarya Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga yang mengikuti Lokakarya Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Lembaga	40	40	40	Dinsos PPPA	lembaga 20, lembaga pemerintahan (OPD 20)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan Forum Anak Desa	Jumlah Forum Anak Desa yang terbentuk	Forum	5	10	15	Dinsos PPPA	
							Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Jumlah Forum Anak Tingkat Kecamatan yang terbentuk	Forum	5	10	15	Dinsos PPPA	5 kecamatan (Sumbersuko, Senduro, Sukodono, Lumajang,

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
													Kunir)	
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan Tim Gugus Tugas (Desa Layak Anak, PRA, SRA)	Jumlah Tim Gugus Tugas (Desa Layak Anak, PRA, SRA) yang terbentuk	Desa	5	10	15	Disdalduk, KB dan PP	5 Desa (Desa Purwosono, Kadang Tepus, Karang Sari, Banjarwaru, Sukosari) 15 Puskesmas sesuai SK PRA, 21 Sekolah sesuai SK Bupati
							Lokakarya Perlindungan anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah kegiatan Lokakarya Perlindungan anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pembinaan Puspaga	Jumlah Kegiatan Pembinaan Puspaga	kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Jejaring	Jumlah kegiatan Pembinaan Jejaring	kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi KLA	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi pencegahan kekerasan terhadap anak	kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Sosialisasi Perbup Pencegahan pernikahan anak	Jumlah kegiatan sosialisasi regulasi pencegahan pernikahan anak	Kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Tim PPT-PPA	Jumlah kegiatan rapat koordinasi Tim PPT-PPA	Kegiatan	6	6	6	Dinsos PPPA	
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kegiatan	1	1	1	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pendampingan kasus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah pendampingan pada layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	pendampingan	30	30	30	Dinsos PPPA	21 Kecamatan
			4.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen IKM	melakukan survei pelayanan terhadap masyarakat perempuan dan laki-laki	dokumen	10	4	4	Dinsos PPPA	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan konsumsi rakor	orang	150	198	199	Dinsos PPPA	
								Penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	orang	23			Dinsos PPPA	dilakukan 20 kali
								Penyediaan perjalanan dinas luar daerah	orang	25			Dinsos PPPA	dilakukan 25 kali
							Penyelenggaraan rapat pembahasan isu gender	Melakukan rapat tentang isu gender	orang	7	7	7	Dinsos PPPA	focal point

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				Program Penanganan Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek dasar PSM	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota yang mendapat bimtek dasar Terdiri dari perempuan 43 orang dan laki-laki 162 orang	orang	205	205	205	Dinsos PPPA	
							Sosialisasi penyuluh sosial masyarakat	Jumlah penyuluh sosial masyarakat yang disosialisasi terdiri dari Laki-laki 17 orang dan perempuan 13 orang	orang	30	30	30	Dinsos PPPA	
							fasilitasi penyuluh sosial masyarakat	Jumlah penyuluh sosial masyarakat yang difasilitasi yang terdiri dari Laki-laki 10 dan perempuan 10	orang	20	40	60	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan TKSK	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditingkatkan kemampuannya terdiri dari perempuan 4 orang dan laki-laki 17 orang	orang	21	21	21	Dinsos PPPA	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Raker Pengurus Karang taruna	Jumlah pengurus karang taruna yang melakukan Raker yang terdiri dari Perempuan 9 orang dan laki-laki 41 orang	orang	50	50	50	Dinsos PPPA	
							Pembinaan Dasar Organisasi Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang melakukan pembinaan dasar organisasi karang taruna yang terdiri dari perempuan 7 orang dan laki-laki 198 orang	orang	205	205	205	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Sosialisasi penguatan kelembagaan karang Taruna	Jumlah karang taruna yang disosialisasi	orang	22	22	22	Dinsos PPPA	
							Penyediaan seragam olah raga untuk karang taruna	jumlah karang taruna yang mendapatkan seragam olahraga	orang	50	75	100	Dinsos PPPA	
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	Penyediaan Alat Bantu	Pemberian bantuan kursi roda	Jumlah Disabilitas terlantar yang menerima alat bantu kursi roda terdiri dari 20 orang perempuan dan 30 orang laki-laki	orang	50	60	70	Dinsos PPPA	
							Pemberian bantuan kurk (alat penyangga)	Jumlah Disabilitas terlantar yang menerima alat bantu kurk (alat penyangga) terdiri dari 25 orang perempuan dan 70 orang laki-laki	orang	100	110	120	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pemberian bantuan kaki tangan palsu	Jumlah Disabilitas terlantar yang menerima alat bantu kaki tangan palsu terdiri dari 15 orang perempuan dan 85 orang laki-laki	orang	100	110	120	Dinsos PPPA	
							Pemberian bantu jalan kaki empat	Jumlah Disabilitas terlantar yang menerima alat bantu jalan kaki empat terdiri dari 90 orang perempuan dan 10 orang laki-laki	orang	100	110	120	Dinsos PPPA	
							Pemberian bantu street walker	Jumlah Disabilitas terlantar yang menerima alat bantu jstreet walker	orang	50	60	70	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pemberian alat bantu dengar	Jumlah Disabilitas terlntar yang menerima alat bantu dengar terdiri dari 25 orang perempuan dan 25 orang laki-laki	orang	50	60	70	Dinsos PPPA	
							pemberian alat bantu tongkat putih	Jumlah Disabilitas terlntar yang menerima alat bantu tongkat putih terdiri dari 40 orang perempuan dan 10 orang laki-laki	orang	50	60	70	Dinsos PPPA	
							pemberian alat bantu puzzlle	Jumlah Disabilitas terlntar yang menerima alat bantu puzzlle terdiri dari 50 orang perempuan dan 50 orang laki-laki	orang	100	110	120	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Pemberian alat bantu regret	Jumlah Disabilitas terLantar yang menerima alat bantu regret terdiri dari 50 orang perempuan dan 50 orang laki-laki	orang	100	110	120	Dinsos PPPA	
						Penyediaan Permakanan	Bantuan sosial disabilitas	Jumlah disabilitas yang mendapatkan permakanan	orang	1631	1631	1631	Dinsos PPPA	
							Pemberian anak terlantar yang mendapatkan permakanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan permakanan terdiri dari 410 anak perempuan dan 289 anak laki-laki	orang	699	700	750	Dinsos PPPA	
							Pemberian bantuan makanan kepada lansia terlantar	jumlah lansia terlantar yang mendapatkan permakanan 15 lansia perempuan	orang	15	15	15	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						Bantuan Sandang	pemberian bantuan sandang kepada Anak terlantar	jumlah anak terlantar yang mendapat bantuan sandang yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 50 anak laki-laki	orang	105	105	105	Dinsos PPPA	
							pemberian bantuan sandang kepada lansia terlantar	jumlah lansia terlantar yang mendapat bantuan sandang terdapat 15 lansia perempuan	orang	15	15	15	Dinsos PPPA	
						Akses pemberian pendidikan dasar	Anak terlantar yang mendapatkan pendidikan dasar	jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pendidikan dasar	orang	675	700	750	Dinsos PPPA	
							Disabilitas yang mendapatkan pendidikan dasar	jumlah disabilitas yang mendapatkan pendidikan dasar	orang	50	50	50	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan lainnya bukan korban HIV/AIDS/NAPZA di luar panti sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum		orang	12	12	12	Dinsos PPPA	
							Reunifikasi dan pemulangan ke keluarga		orang	20	20	20	Dinsos PPPA	
				Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah korbak, korcam yang melaksanakan koordinasi teknis PKH			orang	30	30	30	Dinsos PPPA	
						Jumlah pendamping PKH yang mendapatkan bimbingan teknis	bimbingan teknis pendampingan KPM		orang	154	154	154	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal al quran	pemberiaan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal al quran	jumlah pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal al quran perempuan 130 dan laki-laki 70	orang	800	1000	1000	Dinsos PPPA	
						Jumlah mahasiswa yang mendapat sosialisasi beasiswa	sosialisasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal al quran	jumlah mahasiswa yang mendapat sosialisasi pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal al quran perempuan 80 dan laki-laki 37	orang	100	100	100	Dinsos PPPA	
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KUBE yang mendapat BIMTEK	Bimbingan teknis terhadap anggota KUBE	jumlah anggota KUBE yang mendapat Bimbingan teknis sebanyak 50 orang perempuan	orang	50	50	50	Dinsos PPPA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KERJA	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Rakor Focal Point Gender Internal (Dinsos PPPA)			Jumlah kegiatan Rakor Focal Point Gender Internal (Dinsos PPPA)	Kegiatan	2		
		Menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Rotan Sintestis	Jumlah pencari kerja yang dilatih rotan sintesis (bagi laki-laki dan perempuan petani tembakau/ buruh pabrik rokok)	orang	40	40	40	Dinas Tenaga Kerja	2 angkatan, bagi laki-laki dan perempuan petani tembakau/ buruh pabrik rokok
							Pelatihan Pengolahan Makanan	Jumlah pencari kerja yang dilatih pengolahan makanan (bagi perempuan petani tembakau/ buruh pabrik rokok)	orang	40	40	40	Dinas Tenaga Kerja	2 angkatan, bagi perempuan petani tembakau/ buruh pabrik rokok

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							Pelatihan Batik Tulis	Jumlah pencari kerja yang dilatih batik tulis (bagi perempuan dan laki-laki petani tembakau/ buruh pabrik rokok)	orang	20	20	20	Dinas Tenaga Kerja	1 angkatan bagi perempuan dan laki-laki petani tembakau/ buruh pabrik rokok
							Pelatihan menjahit bagi penyandang disabilitas	pencari kerja penyandang disabilitas	orang	20	20	20	Dinas Tenaga Kerja	1 angkatan bagi penyandang disabilitas
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan konsumsi rakor	Jumlah Fasilitasi Rakor Focal point gender	kali	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja	2 kali (per semester)
			Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Penyelenggaraan Bursa kerja	Jumlah pencari laki-laki dan perempuan ditempatkan melalui penyelenggaraan Bursa pasar kerja	orang	150	200	250	Dinas Tenaga Kerja	1 kali

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	Monitoring dan pembinaan pekerja disabilitas di perusahaan	pekerja penyandang disabilitas	orang	30	35	40	Dinas Tenaga Kerja	pekerja disabilitas yang sudah terdata bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja
							Pemberdayaan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas	penyandang disabilitas	orang	20	20	20	Dinas Tenaga Kerja	1 kali

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah / Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	Koperasi	110 Koperasi	120 Koperasi	130 Koperasi	7	DINKOP UM	
			3.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan										DPMD	18
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk	1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah	1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Bimbingan Teknis SKP Online bagi Non Tenaga Pendidikan	Jumlah ASN tenaga non pendidik laki-laki dan perempuan yang mendapat BIMTEK SKP Online	ASN	3152	3152	2994	BKD	Target adalah laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
	mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	a n					Bimbingan Teknis SKP Online bagi Tenaga Pendidikan	Jumlah ASN tenaga pendidik Laki-laki dan Perempuan yang mendapat BIMTEK SKP Online	ASN	2892 ASN	2892 ASN	2892 ASN	BKD	Target adalah laki-laki dan perempuan
						Pembinaan Disiplin ASN	Sosialisasi Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi bagi ASN laki-laki dan Perempuan	ASN	100%	100%	100%	BKD	Target adalah laki-laki dan perempuan
						Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang dibina terkait responsif gender	ASN	100%	100%	100%	BKD	Materi responsif gender terkait KDRT, perselingkuhan, dll

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi Internal	Jumlah Rapat Vokal Point Gender yang dilaksanakan	Kali	0	1 kl	1 kl	BKD	
				Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelatihan APN bagi bidan (2 angkt)	Jumlah Bidan yang dilatih APN	Bidan	40	80	80	BKD	
							Diklat leadership bagi Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Lumajang	Jumlah Kepala OPD yang di diklat yang responsif gender	Orang	25	0	0	BKD	Materi responsif gender terkait pentingnya pengambilan kebijakan oleh perempuan
			2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Reses	Pelaksanaan Reses untuk meningkatkan partisipasi dari Pimpinan dan Anggota Perempuan di DPRD dan Sekretariat DPRD	Laporan	3	3	3	SEKRETARIAT DPRD	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang melibatkan peran dari Pimpinan dan Anggota Perempuan di DPRD dan Sekretariat DPRD	Fasilitasi	1	1	1	SEKRETARIAT DPRD	
				7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.012.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi aula dan pemisahan kamar mandi laki - laki dengan perempuan	Jumlah aula serta toilet laki - laki dan perempuan yang direhabilitasi	1 Aula dan 2 toilet	-	1 aula, 1 toilet laki - laki dan 1 toilet perempuan	-	Kecamatan	
				7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.01	MUSRENBANG Kecamatan dengan lebih melibatkan perempuan dan difabel dibandingkan	MUSRENBANG Kecamatan dengan lebih melibatkan perempuan dan difabel dibandingkan dengan tahun -	60 Orang dari RT/ RW, BPD, PKK, Tokoh	Laki - laki : Perempuan = 30 : 30 (termasuk 1 orang)	Laki - laki : Perempuan = 30 : 30 (termasuk 1 orang)	Laki - laki : Perempuan = 30 : 30 (termasuk 1 orang difabel)	Kecamatan	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				N		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	n dengan tahun - tahun sebelumnya			tahun sebelumnya	difabel)	difabel)		
			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Sosialisasi manajemen bagi pengurus organisasi kepemudaan	Jumlah peserta sosialisasi manajemen OKP	Pemuda	50 pemuda (30 laki-laki, 20 Wanita)	50 pemuda (30 laki-laki, 20 Wanita)	50 pemuda (30 laki-laki, 20 Wanita)	DISPORA	
							Jambore / kemah kepemudaan	Jumlah peserta jambore	Pemuda	0	260 (156 laki-laki 96 Perempuan)	0	DISPORA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Sosialisasi pembentukan kader pemuda	Jumlah peserta sosialisasi manajemen OKP	Pemuda	0	45 (27 Laki-laki 18 Perempuan)	0	DISPORA	
				Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Lomba gobak sodor	Jumlah peserta gobak sodor	Orang	0	180 (90 laki-laki 90 perempuan)	360 (180 laki-laki 180 perempuan)	DISPORA	Ditahun 2024 kategori peserta umum dan pelajar
							Lomba dagongan	Jumlah peserta dagongan	Orang	0	150 (90 laki-laki 60 perempuan)	300 (180 laki-laki 120 perempuan)	DISPORA	
							Lomba terompah panjang	Jumlah peserta terompah	Orang	0	150 (90 laki-laki 60 perempuan)	300 (180 laki-laki 120 perempuan)	DISPORA	
							Lomba enggrang	Jumlah peserta enggrang	Orang	0	90 (63 laki-laki 27 perempuan)	180 (126 laki-laki 54 perempuan)	DISPORA	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Lomba Sumpitan	Jumlah peserta sumpitan	Orang	0	90 (63 laki-laki 27 perempuan)	180 (126 laki-laki 54 perempuan)	DISPORA	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Menyiapkan Makan Minum Tamu yang lebih responsif gender dalam pelaksanaan acara kedinasan	Memilah jumlah tamu antara laki laki dan perempuan dalam penyajian konsumsi	Jumlah Tamu kegiatan	5000 orang	5000 orang	5000 orang	SETDA-Bagian Umum	
				Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Dialog/Audensi Masyarakat.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Mencantumkan Gender atau kolom gender dalam setiap undangan ataupun daftar hadir, pada Dialog / Audensi.	Jumlah Jenis dokumen perencanaan.	jenis dokumen	2	2	2	SETDA-Bagian Tu dan Protokol	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip pengadaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Presentase	85	86	87	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip pengadaan	Jumlah peserta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	orang	350	450	450 orang		
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pengadaan bingkisan Hari Raya bagi Alim Ulama dan Umara yang responsif gender dalam penyusunannya	jumlah alim ulama dan umara se - Kabupaten Lumajang	orang	750	850	800	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				program perekonomian dan pembangunan	pelaksanaan kebijakan perekonomian	koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	mencantumkan gender dalam surat undangan	Jumlah peserta BUMD dan BLUD yang dilakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi	kebijakan	5	5	5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi dokumen kerjasama daerah yang responsif gender dalam penyusunannya	Jumlah fasilitasi koordinasi kerjasama daerah yang dilaksanakan	MOU kerjasama	12 MOU	12 MOU	12 MOU	SEKRETARIAT DAERAH (Bag. Tata Pemerintahan)	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN		
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, benar dan bersih (good and clean government)	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kepuasan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah peserta musrenbangcam	100 orang	3.100.000	9.183.000	##### #	Kecamatan Pasirian		
								Jumlah desa yang terfasilitasi	11 desa	1.500.000					
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		Jumlah jenis dokumen yang difasilitasi	12 dokumen	3.000.000	5.940.000	6.534.000		Kecamatan Pasirian	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
			3. Meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)										Dinas Komunikasi Dan Informatika	
			4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1. Pembinaan kepada petugas pajak dilingkungan BPRD bagi petugas pajak laki laki dan perempuan, 25 orang adalah perempuan	Jumlah petugas pajak perempuan di lingkungan BPRD yang terbina	Orang	50	50	50	BPRD	
							2. Pembinaan kepada penambang Minerba bagi penambang Laki laki dan perempuan, 10 orang adalah perempuan	Jumlah penambang Minerba perempuan yang terbina	Orang	130	250	250	BPRD	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
							3. Bimtek petugas pemutakhiran data wajib pajak daerah bagi petugas pemutakhiran data laki laki dan perempuan, 42 orang adalah perempuan	Jumlah petugas pemutakhiran data wajib pajak daerah (perempuan) yang terbina pajak daerah	Orang	115	100	100	BPRD	63
							4. Sosialisasi pajak daerah melalui Podcast	Jumlah Masyarakat tersosialisasi pajak daerah	Orang	10	550	550	BPRD	vocal point gender
							5. Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat umum melalui Organisasi wanita (PKK/GOW/DW) dan Penyandang Disabilitas	Jumlah anggota organisasi wanita dan penyandang disabilitas yang tersosialisasi pajak daerah	Orang	100	580	580	BPRD	1. Organisasi wanita: 80 orang 2. Penyandang Disabilitas: 20 orang

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							6. Sosialisasi PBB-P2 kepada petugas pungut desa/kecamatan bagi petugas pungut desa/kecamatan laki laki dan perempuan, 105 orang adalah perempuan	Jumlah petugas pungut desa (perempuan) yang terbina pajak daerah	Orang	250	400	400	BPRD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi FPG	Jumlah peserta rapat, disabilitas 10%, dan Perempuan 4 orang	orang	10	15	20	BPRD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor BPRD untuk Ruang Laktasi	Jumlah jenis gedung yang direhab	jenis	-	1	-	BPRD	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Rehab pintu depan untuk penyandang disabilitas dan ramah anak	Jumlah jenis gedung yang direhab	jenis	-	1	-	BPRD	
			5. Meningkatkan penyenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan	Pengawasan Keuangan	Reviu APBD	Meningkatnya kuantitas dan kualitas reviu dokumen PPRG (GAP, GBS, KAK)	dokumen	14	15	16	INSPEKTORAT	*Dilaksanakan PKS untuk meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan reviu / evaluasi PPRG
				Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pelayanan Inspektorat Service Centre (ISC)	Terfasilitasinya seluruh pengaduan / permohonan konsultasi yang masuk baik laki-laki, perempuan, dan orang dengan kebutuhan khusus	orang	100% laki-laki dan perempuan	100% laki-laki dan perempuan	100% laki-laki dan perempuan	INSPEKTORAT	* Pemeriksaan atas pengaduan / pemenuhan permohonan konsultasi memperhatikan kesetaraan dan kebutuhan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
														gender
			6.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan										BAPPEDA	30
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi dari Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Makmin Rapat Koordinasi	Jumlah koordinasi dankonsultasi SKPD, Jumlah fasilitasi rakor	Kegiatan	3	3	3	Bappeda	Peserta rapat terdiri dari laki-laki dan perempuan
							Penyediaan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah	Jumlah kegiatan dalam daerah yang terfasilitasi					Bappeda	ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah terdiri dari laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
							Penyediaan Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	Jumlah kegiatan luar daerah yang terfasilitasi					Bappeda	ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah terdiri dari laki-laki dan perempuan
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rakor Sub kegiatan PPM, Rakor Kapasitas Aparatur Desa	jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen				Bappeda	Kegiatan rakor diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Fasilitasi Ekspos kajian sejarah, pembayaran upah tenaga bulanan fasilitasi RPJM desa	Jumlah dokumen asistensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi, 2 orang tenaga bulanan yang terbayarkan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
						pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Monitoring dan Evaluasi RKP desa di 21 Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintahan yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang melakukan kegiatan monev
						sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Fasilitasi IPM, Fasilitasi Aksi Stunting, Fasilitasi Sub Pembangunan Manusia, Fasilitasi PUG, Fasilitasi Kabupaten Layak Anak, Fasilitasi Penghapusan Pernikahan Anak, Fasilitasi Kabupaten Sehat, Fasilitasi Germas	jumlah Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penyusunan kajian IPM Kecamatan, Fasilitasi Penyusunan Kajian Pembangunan Manusia Desa Ranupane, RAD Stunting Penyusunan RAD PUG, RAD KLA	Jumlah Dokumen Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Monev IPM, Monev sub pembangunan manusia, Monev aksi stunting, monev PUG, Monev Kab sehat, Monev Kab Layak Anak, Monev Germas, Monev Implementasi SIKAT	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang melakukan kegiatan monev

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Pembayaran upah tenaga bulanan, fasilitasi TKPK, Kajian Analisis kemiskinan, Penyusunan RPKD, Penyusunan LP2KD, Penyusunan RAT PK, Pendampingan Ranupane	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Dokumen				Bappeda	1 orang tenaga upah bulanan yang terbayarkan, peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi
				kegiatan Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	review rencana aksi sub program interkoneksi wisata, Review rencana aksi sub program agro industri, Review RIPPARDA FS pariwisata argosari, Identifikasi potensi ekspor Kabupaten Lumajang	jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun	Dokumen				Bappeda		

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN		
						Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perngkat daerah bidang perekonomian	Asistensi dengan lembaga vertikal sub progrm interkoneksi wisata, Asistensi dengan lembaga vertikal sub program agro industri, Asistensi dengan lembaga vertikal KSPN	jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan asistensi
						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	pembayaran Upah Bulanan (2Orang), Monitoring sub program interkoneksi wisata, Monitoring sub program agro industri, Monitoring KSPN	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang disusun	Dokumen				Bappeda	terbayarnya upah tenaga kerja bulanan , peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang melaksanakan kegiatan money

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN		
						koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	fasilitasi KISS KSPN	Jumlah monitoring penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	kegiatan				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi
						koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	review rencana aksi sub program agrosilvopastura, review rencana aksi sub program restorasi lahan, review rencana aksi agropolitan, review rencana aksi indeks ketahanan daerah, Review masterplan RTH, Review rencana aksi KKMA	jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	Dokumen				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi dengan lembaga vertikal sub program agrosilvopastura, Asistensi dengan lembaga vertikal agropolitan, Asistensi dengan lembaga vertikal sub program restorasi lahan, Asistensi dengan lembaga vertikal indeks ketahanan daerah	Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	Dokumen				Bappeda	pserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan asistensi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Pembayaran upah bulanan, monitoring sub program agrosilvopastura, monitoring sub program restorasi lahan, monitoring program agropolitan, monitoring indeks ketahanan daerah , monitoring KKMA	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	Dokumen				Bappeda	Peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang melaksanakan kegiatan monev
						koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	KISS perhutsos, KISS indeks ketahanan daerah, KISS agropolitan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang disusun	Dokumen				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Kegiatan koordinasi dan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Review rencana aksi IPDMIP penyusunan RKP3 penyusunan rencana induk RPUJJ dan RPUJM, penyusunan rencana induk SPALD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	Dokumen				Bappeda	
						Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Asistensi dengan lembaga vertikal IPDMIP	Jumlah dokumen asistensi perencanaan pembangunan daerah bidang infratraktur	Dokumen				Bappeda	Peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mengikuti kegiatan asistensi
						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infratraktur	Pembayaran Upah Bulanan, rapat monev IPDMIP, rapat monev RISPALDI	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Dokumen				Bappeda	Peserta yang melaksanakan kegiatan monev terdiri dari laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Fasilitasi KISS IPDMIP	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang disusun	Dokumen				Bappeda	peserta terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi
						koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Review rencana aksi KSPN, review rencana aksi pokja PKP, review rencana aksi sub program akses hutso dan retribusi lahan, penyusunan rencana aksi RP3KPKPK	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	Dokumen				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Asistensi dengan lembaga vertikal KSPN, asistensi dengan lembaga vertikal pokja PKP, nsistensi dengan lembaga vertikal sub program akses hutsos dan retribusi lahan	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	Kegiatan				Bappeda	Peserta kegiatan asistensi terdiri dari laki-laki dan perempuan
						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Rapat monev KSPN, rapat monev pokja PKP, rapat monev sub program akses hutsos dan retribusi lahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur yang disusun	Dokumen				Bappeda	Peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi terdiri dari laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Fasilitasi KISS pokja PKP	jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang disusun	Dokumen				Bappeda	Peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi terdiri dari laki-laki dan perempuan
				Program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan	Analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas TAPD, rakor perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen kajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	Dokumen				Bappeda	Peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi terdiri dari laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Verifikasi rancangan renja PD, Verifikasi rancangan akhir renja PD, fasilitasi DAK, fasilitasi DBHCHT, fasilitasi CSR fasilitasi usulan musrenbang prop, rapat koordinasi verifikasi renja PD	Jumlah fasilitasi sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah	Kegiatan				Bappeda	Peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi terdiri dari laki-laki dan perempuan
						Pelaksanaan konsultasi publik	Forum konsultasi publik RKPD 2023, Forum konsultasi publik RKPD	Jumlah konsultasi publik	Kegiatan				Bappeda	peserta yang mengikuti forum konsultasi publik terdiri dari laki-laki dan perempuan
						Koordinasi pelaksanaan forum SKPD / lintas SKPD	Forum PD prioritas tematik (lintas PD) rakor forum PD	Jumlah fasilitasi [pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas PD	Kegiatan				Bappeda	peserta yang mengikuti kegiatan forum PD terdiri dari laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
						Pelaksanaan musrenbang Kabupaten / kota	Musrenbang RKPD 2023 Kab., Musrenbang RKPD Kec. , Bimtek fasilitator, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Rakor Musrenbang	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrenbang	Kegiatan				Bappeda	peserta yang mengikuti kegiatan musrenbang terdiri dari laki-laki dan perempuan
						Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan	Desk verifikasi usulan kecamatan, rakor musrenbang di kecamatan	Jumlah bahan koordinasi musrenbang cam	Kegiatan				Bappeda	desk verifikasi diikuti oleh laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN		
						Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota	pembayaran upah TKB, penyusunan juknis perencanaan dan pendanaan, konsultasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, kaji banding perencanaan pembangunan daerah, pendampingan penyusunan RKPD perubahan 2022, Sosialisasi regulasi perencanaan pembangunan daerah, penetapan dokumen RLPD 2023	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Pembayaran upah TKB, fasilitasi forum satu data, penyusunan ASB perencanaan, fasilitasi penyusunan buku identifikasi permasalahan daerah, kabupaten lumajang dalam angka	Jumlah dokumen fasilitasi dan informasi pembangunan daerah terfasilitasi	Dokumen				Bappeda	peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi terdiri dari laki-laki dan perempuan
					Pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	Fasilitasi bimtek aplikasi pembangunan daerah (SIPD)	Jumlah fasilitasi pengelolaan aplikasi pembangunan daerah dan jumlah aplikasi yang dikelola	Kegiatan					Bappeda	peserta fasilitasi terdiri dari laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
					pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten / kota	Pembayaran upah TKB, monev dan pengendalian renja PD, RKPD dan RPJMD, monev dan pengendalian DAK, dekon TP, DBHCHT dan TKDD lainnya monev SPM	Jumlah fasilitasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah, jumlah fasilitasi monitoring perencanaan pembangunan daerah	Kegiatan				Bappeda	kegiatan monev diikuti oleh laki-laki dan perempuan
						Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Koordinasi pengendalian kerja sama antar daerah	Jumlah pengendalian pelaksanaan kerja sama antar daerah yang terfasilitasi	Kegiatan				Bappeda	koordinasi dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan
						Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDG's	Jumlah fasilitasi penyusunan laporan evaluasi pembangunan daerah	Kegiatan				Bappeda	kegiatan monev diikuti oleh laki-laki dan perempuan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang-bidang penyelenggaraan otonomi daerah	Monitoring dan evaluasi smartcity, penyusunan strategi peningkatan ekonomi pasca covid-19	Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan, jumlah kajian di bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang disusun	Kegiatan				Bappeda	kegiatan monev diikuti oleh laki-laki dan perempuan
						Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	Kajian evaluasi capaian program pembangunan kab. Lumajang	Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum yang dilakukan, jumlah kajian di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum yang disusun	Kegiatan				Bappeda	Analisa responsif gender agar tidak terjadi kesenjangan
						Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Penyusunan roadmap penguatan sistem inovasi daerah	Jumlah kajian di bidang penelitian dan pengembangan	Dokumen				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Penelitian dan pengembangan pariwisata	penyusunan PDRB sektor pariwisata	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan pariwisata yang disusun	Dokumen				Bappeda	
					kegiatan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Penelitian dan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah	Penyusunan PDRB sektor koperasi dan UKM	Jumlah kajian di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Dokumen				Bappeda	
						Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	Rencana aksi pengembangan kawasan ekonomi pesisir	Jumlah kajian di bidang kelautan dan perikanan yang disusun	Dokumen				Bappeda	
						Penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika	Review masterplan dan smartcity	Jumlah kajian di bidang komunikasi dan informatika yang disusun	Dokumen				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI			INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN	
					Pengembangan inovasi dan teknologi	Penelitian, pengembangan dan perancangan di bidang teknologi dan informasi	Optimalisasi aplikasi SIKAT, aplikasi SIMIN (sistem informasi manajemen inovasi dan perencanaan), aplikasi perencanaan desa, fasilitasi administrasi TKB, penyelenggaraan LAHAR JAVA, fasilitasi partisipasi inotek, Fasilitasi partisipasi KIPP, fasilitasi pengisian IID dan IGA	Jumlah fasilitasi penelitian dan pengembangan jumlah aplikasi yang dibuat	Dokumen				Bappeda	
						Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Fasilitasi HKI hasil kelitbangan	Jumlah fasilitasi kegiatan HAKI yang dilakukan	Dokumen				Bappeda	

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
				PROGRAM	Penegakan	Sosialisasi	Rapat							
			7. Meningkatkan ketertarikan dan ketertiban umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rapat koordinasi tim penyuluh/panitian dalam menentukan sasaran/objek penyuluhan/sosialisasi	Jumlah pegawai tim koordinasi	orang	7	7	7	SATPOL PP	Rapat koordinasi dilakukan tim penyuluh/panitian dalam menentukan sasaran/objek penyuluhan/sosialisasi
							Sosialisasi / penyuluhan perda/perkada	Jumlah perda/perkada yang disosialisasikan	Perda/Perkada	13	13	13	SATPOL PP	Sosialisasi dilakukan pada kantor Satpol PP, sekolah, Kantor desa, Kantor pasar, pihak UMKM

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	RENCANA AKSI				INDIKATOR	SATUAN	TARGET			OPD	KETERANGAN
								Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Orang	150	155	160	SATPOL PP	Materi responsif gender terkait Perda/perkada
			8. Meningkatkan Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Sosialisasi Anjab dan ABK 2. Menyusun pedoman penyusunan Anjab dan ABK 3. Fasilitasi penyusunan Anjab dan ABK melalui grub WA	Jumlah OPD yang menerima Sosialisasi mengenai penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	OPD	52	52	52	SETDA-Bagian Organisasi	
						Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sosialisasi Penyusunan SOP	Jumlah OPD yang menerima pembinaan mengenai SOP	OPD	52	52	52		

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PENGARUSTAMAAN GENDER
KABUPATEN LUMAJANG

5.1. Monitoring

5.1.1 Pengertian Monitoring

Monitoring menurut pendapat Subarsono (2019) adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Tujuan kegiatan monitoring antara lain :

- a. menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran;
- b. menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar;
- c. melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil pemantauan mengharuskan untuk itu.

Dalam melakukan monitoring diperlukan Data dan Informasi untuk mendukung Pemantauan (monitoring) yang dilakukan. Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan antara lain :

- a. Metode dokumentasi: dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.
- b. Metode survei: tujuannya untuk menjangkau data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran;
- c. Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survey;
- d. Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan;
- e. Metode campuran: misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas; dan
- f. Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholders yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Jenis-jenis Pemantauan (monitoring) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kepatuhan (*compliance*): jenis pemantauan (monitoring) untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*): jenis Pemantauan (monitoring) untuk melihat sejauh mana sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
- c. Akuntansi (*accounting*): jenis Pemantauan (monitoring) untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
- d. Eksplanasi (*explanation*): jenis Pemantauan (monitoring) untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

Pendekatan terhadap pemantauan (monitoring) :

- a. Akuntansi sistem sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.
- b. Eksperimental sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol.
- c. Akuntansi sosial: pendekatan Pemantauan (monitoring) yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak.
- d. Sintesis riset dan praktek: pendekatan Pemantauan (monitoring) yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau.

Pemantauan (monitoring) umumnya dilakukan pada waktu sebelum kegiatan pembinaan atau bersamaan waktunya dengan penyelenggaraan pembinaan (pengawasan atau supervisi). Pemantauan, pengawasan, dan supervisi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan Pemantauan (monitoring) dilakukan terhadap komponen-komponen program.

Pemantauan (monitoring) juga mempunyai hubungan erat dengan evaluasi program. UNESCO (2010) mengidentifikasi lima kaitan dan perbedaan antara Pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Pertama, fokus Pemantauan (monitoring) adalah pada program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Sementara itu evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program. Kedua, Pemantauan (monitoring) menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil pemantauan dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Pemantauan berhubungan dengan dimensi kuantitatif tentang efektivitas program seperti banyaknya output program, sedangkan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif tentang efektivitas program seperti sejauhmana output sesuai dengan norma atau standar yang telah ditentukan. Ketiga, Pemantauan mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program, seperti faktor logistik, yang dapat membantu atau mempengaruhi penampilan program, sedangkan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan peluasan atau pengembangan program. Keempat, kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera dari hasil Pemantauan (monitoring) adalah untuk kepentingan pengelolaan program, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program. Kelima, Pemantauan (monitoring) dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tekannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas program.

Proses pelaksanaan Pemantauan (monitoring) membutuhkan data dan informasi untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dalam pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran Pemantauan (monitoring) adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan Pemantauan (monitoring) adalah pengelola program dan atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan

program. Hasil Pemantauan (monitoring) digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Perbaikan program itu sendiri dilakukan dalam kegiatan supervisi, bukan dalam kegiatan Pemantauan (monitoring).

Sebagaimana halnya dengan supervisi, pemantauan dapat menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil dan pengaruh program yang dilaksanakan. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh pada penyelenggara program, atau dengan mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggaranya atau pelaksana program.

Langkah-langkah pokok untuk melakukan Pemantauan (monitoring) adalah sebagai berikut: Pertama, menyusun rancangan Pemantauan (monitoring), seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk memperbaiki pelaksanaan program, b) sasaran atau aspek-aspek yang akan dimonitor, c) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, d) pendekatan metode, teknik dan instrumen Pemantauan (monitoring), e) waktu dan jadwal kegiatan Pemantauan (monitoring), dan f) biaya Pemantauan (monitoring). Kedua, melaksanakan kegiatan Pemantauan (monitoring) dengan menggunakan pendekatan metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. Ketiga, menyusun dan menyerahkan laporan Pemantauan (monitoring) kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program.

5.1.2 Monitoring Responsif Gender

A. Monitoring Pemantauan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan isu strategis, visi dan misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran Pemantauan (monitoring) perencanaan yang responsif gender adalah dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) PD, dan Rencana Kerja (RENJA) PD. Pemantauan pada RPJMD dan RKPD dilakukan tim yang dibentuk oleh Pokja PUG, sedangkan untuk Renstra dan Renja OPD dilakukan oleh Focal Point masing-masing PD.

B. Monitoring Penganggaran Responsif Gender

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Sasaran dalam melakukan Pemantauan terhadap penganggaran responsif gender adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Pemantauan (monitoring) terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Pemantauan terhadap RKA dilakukan oleh Focal Point sedangkan Pemantauan (monitoring) terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG. Ada dua kegiatan yang harus dilakukan dalam

pemantauan yaitu: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan Pemantauan (monitoring) oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen Pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Di bawah ini adalah format sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan Pemantauan (monitoring) dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

1) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (monitoring) anggaran responsif gender adalah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), *Term of Reference* (TOR), *Gender Budget Statement* (GBS).

Tabel 5.1

Instrumen Pemantauan ARG Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ SubKegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) ¹	(2) ²	(3)	(4) ³	(5) ⁴	(6) ⁵
		Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		Apakah penyusunan kegiatan/sub kegiatan sudah menggunakan analisis gender?			
		Apakah dokumen GBS dijadikan dasar untuk menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK)/TOR?			
		Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan RKA/TOR?			
		Apakah subkegiatan dalam RKA menjawab isu kesenjangan gender?			
		Apakah input (anggaran dan input lainnya) rasional yang ada pada TOR/RKA untuk mengurangi kesenjangan gender?			
		Apakah tujuan kegiatan dalam RKA/TOR berhubungan dengan hasil (outcome) pada RKA?			
		apakah tujuan kegiatan/subkegiatan secara jelas akan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki?			
		Jumlah jawaban (√)			

¹ Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda. ² Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender ³ Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “YA”. ⁴ Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “TIDAK”. ⁵ Kolom 6 isi dengan tanggapan anda jika Anda tidak bisa menjawab “YA” atau “TIDAK”

2) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (monitoring) anggaran responsif gender adalah proses dan hasil yang dicapai melalui dokumen-dokumen pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan.

Tabel 5.2
Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ SubKegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) ¹	(2) ²	(3)	(4) ³	(5) ⁴	(6) ⁵
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan input RKA?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan output RKA?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan outcome RKA ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran pada RKA ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan ?			
		Apakah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sudah memperhatikan penerima manfaat laki-laki dan perempuan?			
		Jumlah jawaban (√)			

¹ Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda. ² Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender ³ Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "YA". ⁴ Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab "TIDAK". ⁵ Kolom 6 isi dengan tanggapan anda jika Anda tidak bisa menjawab "YA" atau "TIDAK"

3) Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, dokumen yang menjadi fokus Pemantauan (monitoring) anggaran responsif gender adalah laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan dengan membandingkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang sudah menerapkan anggaran responsif gender.

Tabel 5.3
Instrumen Pemantauan ARG Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Kegiatan/ SubKegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			Ya	Tidak	
(1) ¹	(2) ²	(3)	(4) ³	(5) ⁴	(6) ⁵
		Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah sesuai dengan RKA dan DPA?			
		Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan?			
		Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah melibatkan perempuan laki-laki dan perempuan?			
		Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan sudah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan?			
		Apakah hasil kegiatan/sub kegiatan dapat mengurangi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi?			
		Apakah alokasi anggaran yang teredia dapat memberikan manfaat maksimal untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai dengan analisa situasi?			
		Jumlah jawaban (√)			

¹ Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda. ² Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender ³ Pada kolom 4, bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “YA”. ⁴ Pada kolom 5 Bubuhkan (√) pada kolom yang tersedia jika Anda menjawab “TIDAK”. ⁵ Kolom 6 isi dengan tanggapan anda jika Anda tidak bisa menjawab “YA” atau “TIDAK”

5.2. Evaluasi

5.2.1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Tujuan Evaluasi menurut Subarsono (2012) antara lain:

- a. menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
- c. mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan;
- d. mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
- e. untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
- f. sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menjelaskan secara sistematis untuk mencapai obyektif, efisien, dan efektif, serta untuk mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan juga membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan satu atau beberapa aspek program perencanaan yang akan datang. Dengan kata lain evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara rinci Anderson (2010) merumuskan tujuan evaluasi meliputi: (1) Memberi masukan untuk perencanaan program; (2) Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program; (3) Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat; (4) Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian.

Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus menerus, berkala dan atau sewaktu-waktu pada saat sebelum, sedang dan atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

Ada dua jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektivitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu produk atau proses. Evaluasi sumatif akan muncul jika suatu cara baru

telah dilakukan atau diimplementasikan secara penuh dalam beberapa waktu bahkan tahun. Scriven (1977) adalah orang pertama yang membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.

Kriteria yang akan dipakai untuk menilai objek evaluasi merupakan tujuan yang paling sulit dalam evaluasi. Apabila yang diacu hanya pencapaian tujuan, maka ini memang pekerjaan yang mudah, namun ini baru pada sebagian dari pada isu kriteria evaluasi. Pencapaian tujuan-tujuan yang penting memang merupakan salah satu kriteria yang penting. Kriteria lainnya yaitu identifikasi kebutuhan dari klien yang potensial, nilai-nilai sosial, mutu dan efisiensi dibandingkan dengan objek-objek alternatif lainnya. Tampaknya ada persetujuan diantara ahli evaluasi bahwa kriteria yang dipakai untuk menilai suatu obyek tertentu hendaknya ditentukan dalam konteks obyek tertentu dan fungsi evaluasinya. Instrumen, instrumen termasuk tes, kuesioner, observasi, interview atau wawancara, laporan ceklis, dan alat-alat ukur lainnya. Data kualitatif dan kuantitatif, merupakan data yang berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dalam suatu evaluasi. Data kualitatif akan berupa atau berbentuk kata-kata atau keterangan tentang kejadian, transkrip wawancara, dan dokumen tertulis. Kata-kata harus dibaca untuk artinya dan iluminasi artinya, tafsiran kejadian dapat digambarkan sebagai tujuan pokok analisis data kualitatif. Data kuantitatif, data berupa angka-angka, analisis data kuantitatif berpendapat kalau ada ia akan berupa jumlah dan dapat diukur. Data kuantitatif memberi jawaban untuk pertanyaan: berapa? Sampai seberapa jauh? Dan berapa banyak? Sebagai tambahan analisis data kuantitatif mencari hubungan antara jumlah (kuantitas), misalnya sikap yang lebih positif terhadap program berhubungan dengan penerimaan informasi yang lebih banyak tentang program itu.

5.2.2. Evaluasi terhadap Penganggaran Responsif Gender

Evaluasi adalah sebuah proses di mana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Evaluasi ini dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saatsaat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisa apakah keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) ataupun dampak (*impact*) dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Pada tahap ini, ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, kemudian (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: pertama, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. Kedua, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan ketiga, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Pada dasarnya instrumen Evaluasi terhadap Penganggaran Yang Responsif Gender yang digunakan sama dengan pemantauan (monitoring). Instrumen Evaluasi hanya menjumlahkan nilai yang ada dalam instrumen pemantauan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi ini menitikberatkan pada dokumen kebijakan kegiatan/sub kegiatan, yaitu sejauh mana substansi kegiatan/sub kegiatan menerapkan prinsip penyusunan anggaran responsif gender. Evaluasi ini mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

Tabel 5.4
Instrumen Evaluasi Anggaran Responsif Gender

Unit Organisasi	Kegiatan/ SubKegiatan	Pertanyaan	Jawaban	
			Ya	Tidak
(1) ¹	(2) ²	(3)	(4) ³	(5) ⁴
		Perencanaan		
		Pelaksanaan		
		pertanggungjawaban		
		Jumlah jawaban (√)		

¹ Kolom 1 Isi dengan unit kerja Anda. ² Kolom 2 Isi dengan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi percontohan anggaran responsif gender ³Kolom 4 isi dengan jumlah jawaban "YA" (total tanda jawaban (√) dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender. ⁴ Kolom 5 isi dengan jumlah jawaban "YA" (total tanda jawaban (√) dari setiap tahap proses penganggaran responsif gender.

Tabel 5.5
Klasifikasi Evaluasi

No	Nilai Variabel	Kriteria Penilaian
1	15-20	Responsif Gender
2	8-14	Kurang Responsif Gender
3	1-7	Tidak Responsif Gender

BAB VI PENUTUP

Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lumajang berpedoman pada (1) Intsruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan tersebut mengamanatkan dua hal penting,yaitu :

1. Pentingnya integrasi isu gender dalam proses pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Perlunya membangun komitmen dari Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan, penganggaran responsive gender (PPRG). Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat mengembangkan pelaksanaan program/kegiatan responsif gender dengan menggalang kerjasama dengan : (1) perguruan tinggi (untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/PPM); (2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melalui pendampingan Desa/kelurahan dan kelompok masyarakat tentang pelaksanaan PPRG; (3) Kalangan dunia usaha dan dunia industri bagi pemahaman tentang pentingnya pengarusutamaan gender dalam keluarga dan masyarakat. Demikian pula menggalang kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan bagi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat semakin baik.
3. Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu memperkuat kelembagaan PUG baik dalam Pokja PUG Kabupaten Lumajang maupun Focal Point di masing-masing perangkat daerah, tingkat kecamatan, desa dan kelurahan yang secara langsung melayani masyarakat.
4. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media massa baik radio, TV, website Kabupaten Lumajang dan media sosial lainnya dalam rangka penyebarluasan tentang pentingnya PPRG di Kabupaten Lumajang. Melibatkan pemimpin informal dalam masyarakat (ulama, kyai, pemuka agama yang lain) agar masyarakat Pekalongan yang agamis memahami pentingnya kesetaraan dan keadilan gender, tidak hanya kelompok perempuan dan laki-laki tetapi juga kelompok miskin, rentan dan kaum difabel.
5. Perlunya perangkat daerah mempublikasikan “pengalaman baik tentang pembelajaran PPRG”, baik melalui PKK, Dharma Wanita, kelompok strategis dalam masyarakat, maupun forum-forum pertemuan masyarakat dalam rangka peningkatan pelaksanaan PPRG di Kabupaten Lumajang.

BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.